

LAPORAN KINERJA 2025

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Padang



(0751)-8962111



upt_padang@postel.go.id



LAPORAN KINERJA BALMON PADANG

2025



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat informasi mengenai capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran, indikator, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi dan umpan balik dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dedikasi dan kerja kerasnya.

Semangat profesionalisme, integritas, dan kolaborasi hendaknya terus dijaga guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan spektrum frekuensi radio ke depan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 1 April 2026

Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Padang



M. HELMI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.....	6
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	9
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS.....	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS.....	15
B. RPJMN BIDANG KOMUNIKASI DAN DIGITAL.....	15
C. PERJANJIAN KINERJA.....	18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	22
---	-----------

SASARAN 1.

1. Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota
2. Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio
3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio
4. Persentase Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Digital
5. Persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT
6. Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif
7. Persentase Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan
8. Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)
9. Persentase Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio
10. Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik
11. Persentase Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)
12. Persentase Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)
13. Persentase Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

SASARAN 2.

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025 Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

BAB IV PENUTUP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Tujuan dari LAKIN ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Balmon Padang selama periode tahun 2025 yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Balmon Padang Tahun 2025 yang telah disepakati antara Kepala Balmon Padang dengan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang di Tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 7.089.526.000 (tujuh miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) selama Tahun Anggaran 2025 guna mendukung realisasi seluruh kegiatan yang ada, baik kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan operasional perkantoran. Persentase realisasi penyerapan anggaran mencapai angka 84,49%. Hal ini disebabkan adanya pagu blokir sebesar Rp1.068.460.000. Jika dihitung realisasi penyerapan tanpa pagu blokir, maka realisasi anggaran adalah sebesar 99,48%. Hal ini membuktikan bahwa hampir seluruh kegiatan direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel di bawah ini:

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital

Tabel 1.
Penilaian Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Capaian 2025	Realisasi (%)
Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	100%	125%
Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	100%	100%
Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105,26%
Persentase Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan /atau Perangkat Telekomunikasi	75%	100%	133,33%
Persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	117,65%
Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	125%
Persentase Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	100%	100%
Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	100%	100%
Persentase Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
Persentase Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	119,38%	119,38%
Persentase Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	103,61%	103,61%
Persentase Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%

2. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien

Tabel 2.
Penilaian Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang Tahun 2025	86,95%	84,39%	97,06%
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97%	100%	10.309%



A. LATAR BELAKANG

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, penyelenggaraan pembangunan nasional dilaksanakan dalam kerangka penguatan arah kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan nasional diarahkan pada penguatan kedaulatan negara, kemandirian ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai fondasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan akuntabel menjadi prasyarat utama dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Transformasi digital menjadi salah satu pilar dalam agenda pembangunan nasional Tahun 2025, seiring dengan besarnya peran teknologi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Pemanfaatan teknologi digital yang optimal mampu mempercepat proses pembangunan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperkuat daya saing nasional di tengah dinamika global yang semakin kompetitif. Dalam mendukung agenda tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital memegang peran strategis sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan digital. Hal ini ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menandai penguatan mandat kementerian dalam mengkoordinasikan transformasi digital nasional. Melalui visi dan misi yang berorientasi pada terwujudnya konektivitas digital yang bermakna, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk mendorong kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia sebagai bagian dari pencapaian Asta Cita.

Transformasi digital juga menjadi instrumen penting dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Digitalisasi proses birokrasi, penguatan sistem informasi, serta integrasi data lintas sektor sebagaimana didorong dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terbukti mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan sektor komunikasi dan digital, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas nasional. Spektrum frekuensi radio, sebagaimana sumber daya alam lainnya, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan terhadap spektrum frekuensi radio terus meningkat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, efisien, dan berkeadilan guna mencegah terjadinya gangguan (interferensi) serta menjamin keberlanjutan pemanfaatannya.

Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kewenangan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur penyesuaian kebijakan di sektor telekomunikasi, termasuk reformasi perizinan berusaha berbasis risiko serta optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio guna mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan dalam lingkup Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk menjamin tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio, mendukung penyelenggaraan layanan komunikasi yang andal, serta mendukung keberhasilan transformasi digital nasional di tingkat daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta pengelolaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menjadi sarana untuk menilai capaian kinerja organisasi secara terukur dan sistematis

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui laporan ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang berada dalam lingkup Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

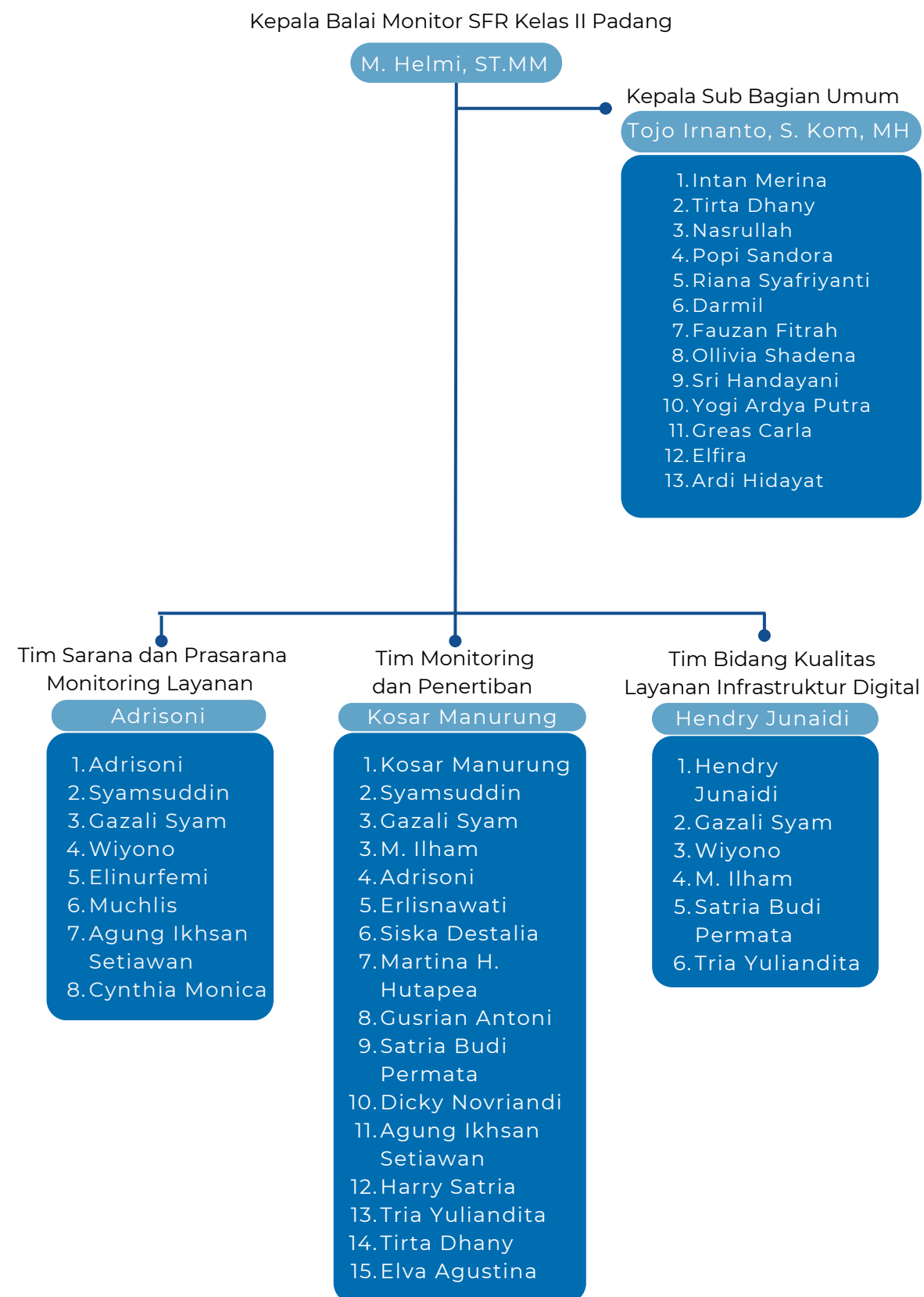
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio;
2. Pelaksanaan pengamatan, pemantauan, serta deteksi dan penentuan lokasi sumber pancaran spektrum frekuensi radio;
3. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
4. Pelaksanaan penertiban dan penyidikan terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio serta standar perangkat pos dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio, serta pendampingan dalam penyelesaian piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
6. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat terkait gangguan spektrum frekuensi radio;
7. Pelaksanaan operasional, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitoring spektrum frekuensi radio;
8. Pelaksanaan ujian amatir radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta hubungan masyarakat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI MONITOR SFR KELAS II PADANG

Bagan 1.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI MONITOR SFR KELAS II PADANG



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi 12 Kabupaten dan 7 kota, terdiri dari 179 kecamatan, dengan luas wilayah Luas Provinsi Sumatera Barat 42.012,89 km² dan penduduk wilayah Provinsi Sumatera Barat berjumlah 5.534.472 jiwa. Di Provinsi Sumatera Barat pertumbuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi mengalami pertumbuhan begitu pesat yang sebarannya tidak bertumpu pada 1 (satu) Kabupaten/Kota saja namun menyebar seperti pembangunan transportable, layanan internet dan akses jaringan telekomunikasi. Begitu pula dengan pengguna spektrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara broadcasting, radio konsesi, operator seluler dan penyelenggara TV Kabel yang tumbuh, dan jumlah pengguna spektrum frekuensi radio yang berizin (ber ISR).

Balmon SFR Kelas II Padang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia ASN di Balmon SFR Kelas II Padang masih terbatas secara teknis, sehingga diperlukan penambahan personel dan peningkatan kapasitas (*capacity building*).
2. Regulasi spektrum belum komprehensif dan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi serta bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga implementasinya belum optimal dan membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif dan tepat sasaran.
3. Masih banyak penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).
4. Pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi Balmon SFR Kelas II Padang masih rendah.
5. Peredaran dan penggunaan perangkat telekomunikasi yang belum memenuhi standar teknis atau belum bersertifikasi masih cukup tinggi.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Balmon Padang Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang Tahun 2025 meliputi:

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian singkat mengenai gambaran umum Balmon SFR II Kelas Padang

2. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja memuat ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun berjalan sebagai dasar penetapan target dan pelaksanaan kinerja.

3. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas memuat uraian mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi serta pelaksanaan dan realisasi penggunaan anggaran selama tahun pelaporan.

4. PENUTUP

Penutup memuat simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.





A. Sasaran Strategis Kementerian Komdigi 2025-2029

Kementerian Komdigi 2025-2029 memiliki 9 sasaran strategis, antara lain :

1. Mempercepat penyediaan konektivitas *broadband* inklusif, berkualitas, dan terjangkau.
2. Mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional.
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional.
4. Mengakselerasi kualitas dan produktivitas masyarakat digital.
5. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan *critizen centric*.
6. Meningkatnya ruang digital yang aman dan berdaulat.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi.
8. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik.
9. Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien.

B. RPJMN Bidang Komunikasi dan Digital 2025-2029

Tahap I Pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 diarahkan pada penguatan fondasi transformasi guna mendukung pencapaian lima sasaran utama, yaitu:

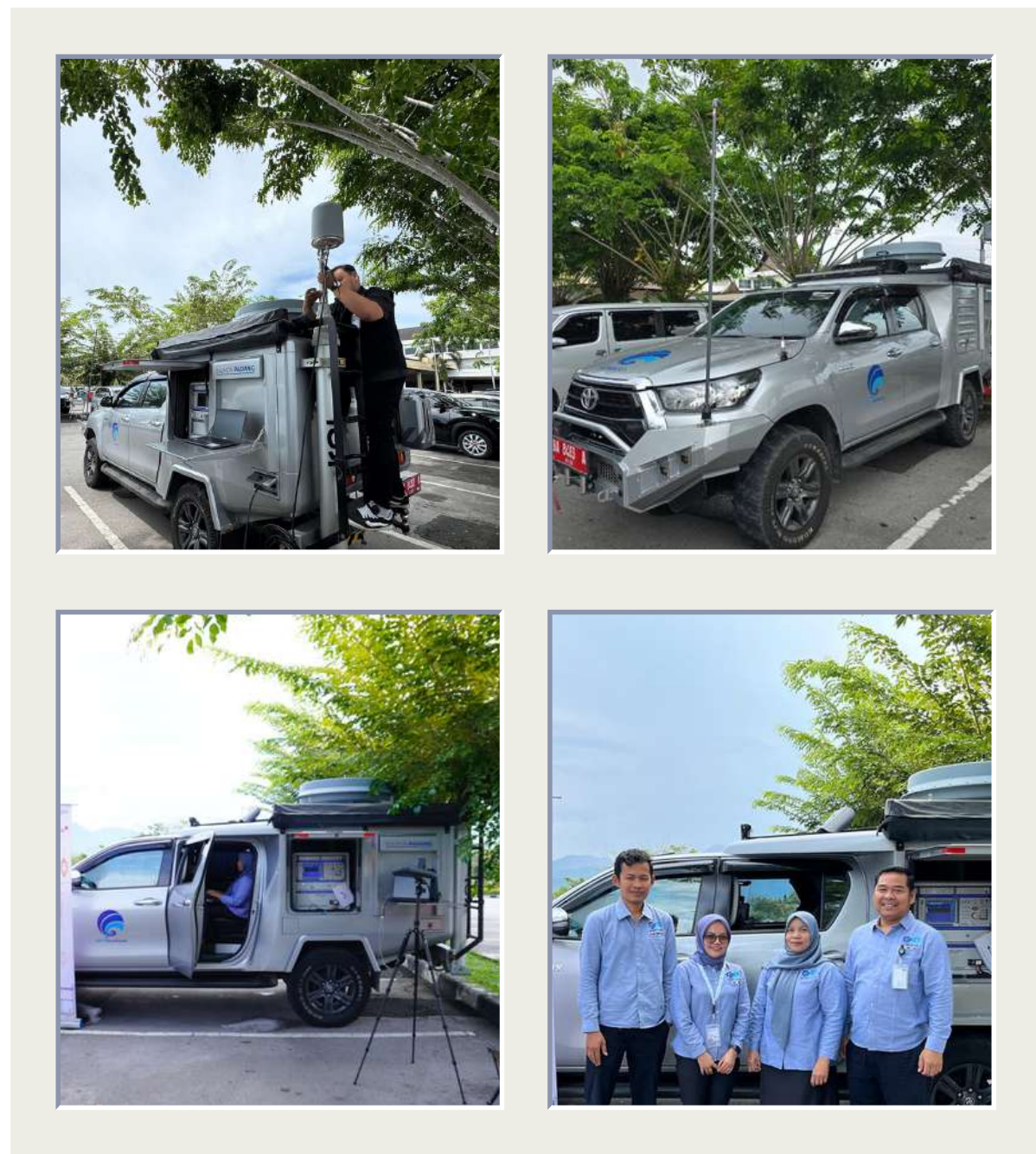
1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang.
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat, dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.

Dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional, ditetapkan 8 (delapan) program Prioritas Nasional (PN), antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara & mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Hasil pemetaan Bappenas menunjukkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital berperan signifikan dalam mendukung Program Prioritas Nasional 1,2,3 serta tetap memberikan dukungan terhadap program nasional lainnya, khususnya Program Prioritas Nasional 7 di bidang pemerintahan digital.



Struktur RPJMN 2025-2029: Bidang Komunikasi dan Digital

Bagan 2.
Struktur RPJMN 2025-2029

STRUKTUR RPJMN 2025-2029; BIDANG KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Struktur PP	Komunikasi Publik dan Media	Ekonomi Digital	Infrastruktur TIK dan Layanan Digital	Pemerintah Digital
	PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia [HAM]	PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
Indikator PN	Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Hak Asasi Manusia	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Stok Infrastruktur terhadap PDB	1. Indeks Reformasi Brokas Wasional 2. Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
PP	Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Ekonomi Digital	Penguatan Konektivitas dan Transisi Energi Listrik	Pemerintah Digital
Indikator PN	1. Indeks Kemerdekaan Pers 2. Informasi Publik 3. Pembangunan dan Informasi Publik	Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB (%)	1. Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional 2. Indeks Transformasi Digital Nasional	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	KP-01 Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	KP-01 Penguatan Pendukung Digital	KP-01 Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran	KP-01 Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital
KP	KP-02 Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik	KP-02 Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	KP-02 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	KP-02 Penguatan Teknologi Pemerintah Digital
				KP-03 Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital ASN
KP				KP-04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
				KP-05 Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital.

Tabel 3.
Penilaian Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Capaian 2025	Realisasi (%)
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	100%	125%
Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	100%	100%
Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105,26%
Persentase Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan /atau Perangkat Telekomunikasi	75%	100%	133,33%
Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	117,65%
Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	125%
Persentase Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	100%	100%
Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	100%	100%
Persentase Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
Persentase Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	119,38%	119,38%
Persentase Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	103,61%	103,61%
Persentase Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR <i>Microwave Link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien.

Tabel 4.
Penilaian Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Capaian 2025	Realisasi (%)
Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang Tahun 2025	86,95%	84,39%	97,06%
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97%	100%	10.309%

Tabel 5.
Benchmark Capaian Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota 2025

UPT DJID	Target	Realisasi	Capaian
Balmon SFR Kelas II Padang	80%	125%	100%
Balmon SFR Kelas II Jambi	80%	125%	100%

Berdasarkan tabel diatas, Balmon Padang berhasil memonitor sebanyak 390 ISR yang mana di target nya sebanyak 309 ISR dan berhasil melampaui target minimal 80% ISR termonitor untuk masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat.



IV. Analisis, Tindak Lanjut serta Efisien

A. Analisa

Pada IK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1. Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan frekuensi radio dilakukan sesuai peruntukannya, berizin, dan tidak menimbulkan gangguan. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi penggunaan frekuensi tanpa izin maupun penggunaan yang tidak sesuai alokasi, sehingga pemanfaatan spektrum menjadi lebih tertib dan efisien di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Padang.
2. Monitoring pita frekuensi radio tidak selalu berjalan optimal karena dipengaruhi kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, serta kendala teknis saat pelaksanaan di lapangan.
3. Keterbatasan ketersediaan perangkat monitoring yang memadai menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan monitoring pita frekuensi radio, khususnya ketika kegiatan harus dilakukan secara bersamaan di beberapa lokasi.
4. Permasalahan teknis pada perangkat monitoring masih mempengaruhi tingkat akurasi dan mutu data yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan dan kalibrasi perangkat secara berkala, serta peningkatan pelatihan teknis bagi pegawai fungsional agar mampu menangani kendala teknis yang terjadi di lapangan.

B. Tindak Lanjut

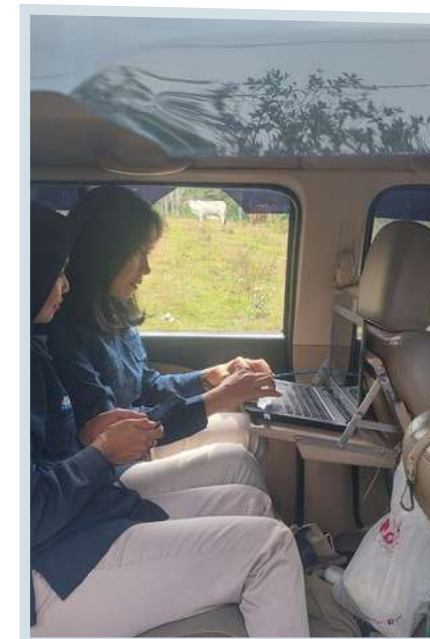
Hasil monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan IK.1 Monitoring Pengguna SFR digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukan atau tidak memiliki izin, serta sebagai bahan pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi). Selain itu, hasil monitoring menjadi rujukan awal dalam penanganan potensi gangguan spektrum frekuensi radio dan digunakan sebagai bahan pelaporan serta evaluasi kinerja kepada pimpinan dan unit kerja terkait. Laporan kinerja ini juga mendukung perencanaan kegiatan monitoring dan pengawasan spektrum frekuensi radio pada periode berikutnya. Dengan adanya laporan kinerja tersebut, proses pengawasan spektrum frekuensi radio dapat dilaksanakan secara lebih terarah, berbasis data, dan berkelanjutan.

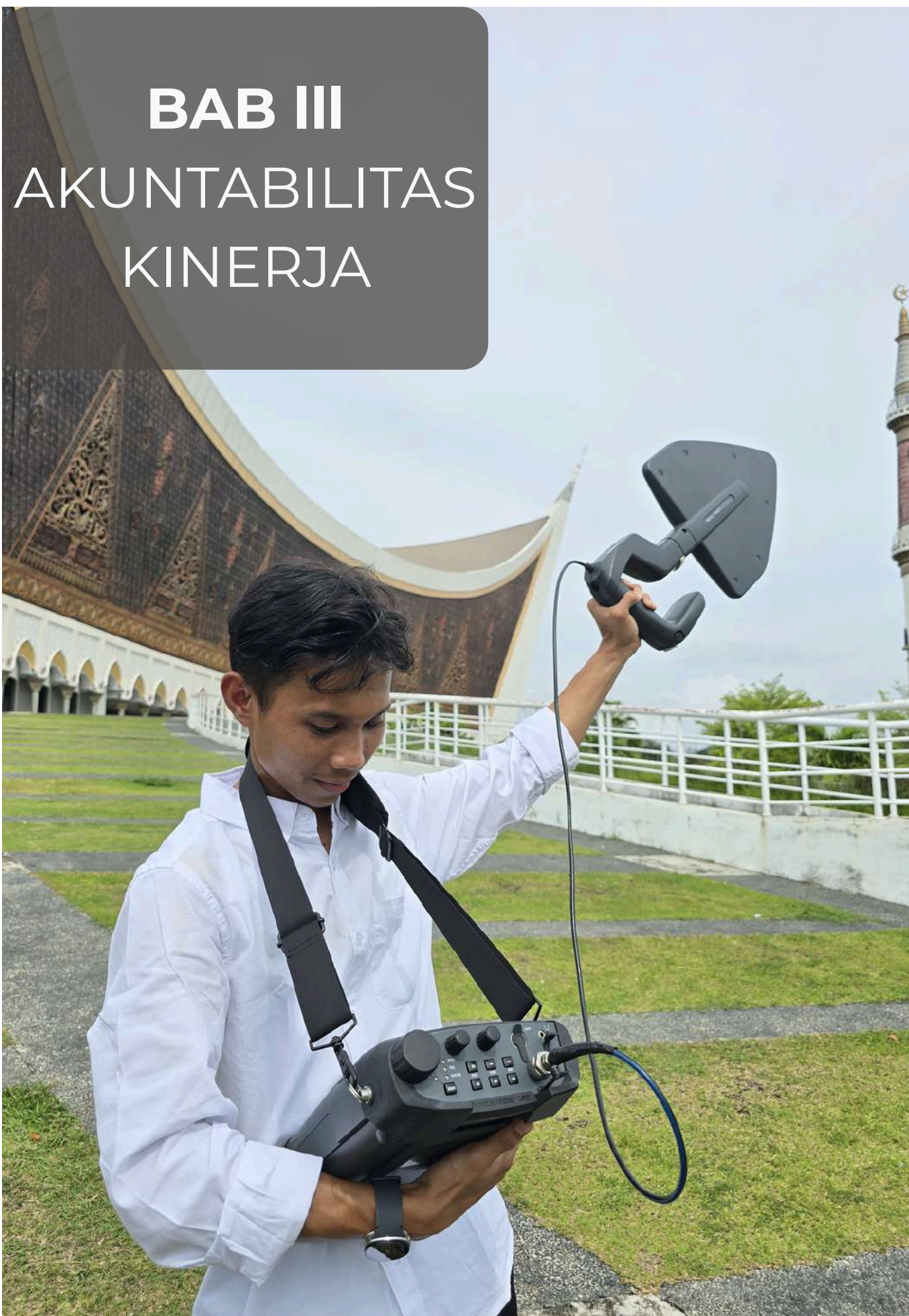
C. Rekomendasi kedepannya

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio pada tahun berikutnya, perlu dilakukan upaya berkelanjutan dengan mempertahankan capaian monitoring sebesar 100% di seluruh kabupaten/kota serta menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, frekuensi monitoring perlu ditingkatkan pada wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penggunaan frekuensi radio tinggi agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal. Pemanfaatan perangkat monitoring bergerak dan transportable juga perlu dioptimalkan, khususnya untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang sulit diakses.

Di samping itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat perlu terus ditingkatkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan lapangan. Penguatan analisis hasil monitoring juga diperlukan agar potensi pelanggaran dan gangguan spektrum frekuensi radio dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan tepat sasaran. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendukung pengendalian spektrum frekuensi radio yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LAKIN 2025 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital.

Tabel 6.

Penilaian Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Capaian 2025	Realisasi %
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	100%	12.500%
Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	100%	100%
Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	10.526%
Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Digital	75%	100%	13.333%
Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	11.765%
Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	12.500%
Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Layanan Sertifikat Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	100%	100%
Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/PKP)	100%	11.938%	11.938%
Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	10.361%	10.361%
Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (Prima Aksi)	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien.

Tabel 7.
Penilaian Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Capaian 2025	Realisasi %
Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Padang Tahun 2025	8.695%	8.439%	9.706%
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97%	100%	10.309%

SASARAN I

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital

Dalam rangka mewujudkan meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital telah dicapai indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota tercapai 100%;
2. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) sebesar 100%;
3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio sebesar 100%;
4. Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Digital sebesar 100%;
5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT sebesar 100%;
6. Penanganan Sanksi Denda Administratif sebesar 100%;
7. Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan sebesar 100%;
8. Penyelenggaraan Layanan Sertifikat Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) sebesar 100%;
9. Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio sebesar 100%;
10. Sosialisasi Pelayanan Publik sebesar 100%;
11. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/PKP) sebesar 119,38%;
12. Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) sebesar 103.61%;
13. Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (Prima Aksi) sebesar 100%.

IKSK-1.1.

Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kegiatan yang terdiri dari: 1) pengamatan kepadatan pendudukan pita frekuensi radio sesuai dengan alokasinya baik HF, VHF, UHF maupun SHF secara rutin, 2) mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio yang berizin dan tanpa izin maupun penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan okupansi di lapangan menggunakan perangkat SMFR tetap dan transportable serta perangkat bergerak.

II. Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2025, target Perjanjian Kinerja indikator ini adalah tercapainya 80% Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di 19 Kabupaten/Kota.

III. Capaian Target

Sasaran Program, **Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital.**

Indikator Kinerja, **Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi).**

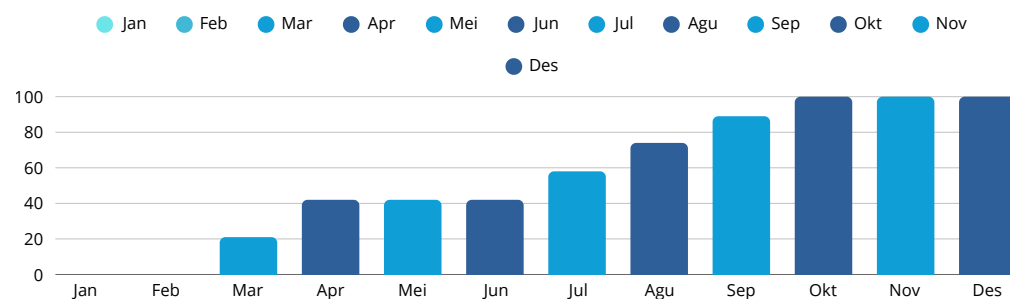
Target		80%
Capaian		100%
Persentase		125.00%

Tabel 8.
Capaian target IK-1 Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	80%	100%	125%
2022	80%	100%	125%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2025	80%	100%	125%

Bagan 3.

Akumulasi capaian monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota 2025



Jumlah Kegiatan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Balai Monitor SFR Kelas II Padang sebagai berikut:

Tabel 9.

Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Balai Monitor SFR Kelas II Padang

Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan
Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	8 Kegiatan
Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	18 Kegiatan
Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Transportasi Laut	1 Kegiatan

Tabel 10.

Target ISR 2025 80% dan terealisasi sebanyak 100%

Kabupaten / Kota	Jumlah ISR Termonitor	Target ISR Termonitor	Jumlah ISR Teridentifikasi	Target ISR Teridentifikasi	Persentase ISR Teridentifikasi
KOTA PADANG	123	109	1742	1394	100%
AGAM	25	19	93	74	100%
PADANG PARIAMAN	32	26	1966	1573	100%
TANAH DATAR	19	13	54	43	100%
PESISIR SELATAN	15	13	33	26	100%
PASAMAN BARAT	15	10	40	32	100%
KOTA SAWAHLUNTO	15	15	41	33	100%
KEPULAUAN MENTAWAI	12	11	24	19	100%

DHARMASRAYA	9	11	34	27	100%
KOTA BUKITTINGGI	26	16	943	754	100%
LIMA PULUH KOTA	18	11	52	42	100%
KOTA PARIAMAN	8	7	31	25	100%
SOLOK	12	7	39	31	100%
SIJUNJUNG	7	7	35	28	100%
KOTA SOLOK	16	10	50	40	100%
KOTA PAYAKUMBUH	9	5	44	35	100%
PASAMAN	8	5	28	22	100%
SOLOK SELATAN	13	8	40	32	100%
KOTA PADANG PANJANG	8	6	56	45	100%
Total	390	309	5345	4275	100%

Balmon Padang berhasil memonitor sebanyak 390 ISR yang mana ditargetnya sebanyak 309 ISR dan berhasil melampaui target minimal 80% ISR termonitor untuk masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat.

Tabel 11.

Benchmark Capaian Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota 2025

UPT DJID	Target	Capaian	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	80%	100%	Persentase Capaian Balmon Padang dan Balmon Jambi sama-sama 100%
Balmon SFR Kelas II Jambi	80%	100%	

Balai Monitor SFR Kelas II Padang dan Balmon SFR Kelas II Jambi menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian monitoring 100%, melampaui target 80%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio di wilayah kerja masing-masing telah optimal. Secara rinci, Balmon Padang berhasil memonitor 390 Izin Stasiun Radio (ISR) dari target 309 ISR. Capaian ini menandakan pengawasan di wilayah Sumatera Barat berjalan sangat baik, dengan jangkauan monitoring yang lebih luas sehingga potensi pelanggaran atau penggunaan frekuensi yang tidak sesuai izin dapat lebih cepat teridentifikasi dan ditindaklanjuti.

IV. Analisa Pencapaian Target

A. Analisa

1. Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan frekuensi radio dilakukan sesuai peruntukannya, berizin, dan tidak menimbulkan gangguan. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi penggunaan frekuensi tanpa izin maupun penggunaan yang tidak sesuai alokasi, sehingga pemanfaatan spektrum menjadi lebih tertib dan efisien di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Padang.
2. Monitoring pita frekuensi radio tidak selalu berjalan optimal karena dipengaruhi kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, serta kendala teknis saat pelaksanaan di lapangan.
3. Keterbatasan ketersediaan perangkat monitoring yang memadai menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan monitoring pita frekuensi radio, khususnya ketika kegiatan harus dilakukan secara bersamaan di beberapa lokasi.
4. Permasalahan teknis pada perangkat monitoring masih mempengaruhi tingkat akurasi dan mutu data yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan dan kalibrasi perangkat secara berkala, serta peningkatan pelatihan teknis bagi pegawai fungsional agar mampu menangani kendala teknis yang terjadi di lapangan.

B. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan IK.1 Monitoring Pengguna SFR digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukan atau tidak memiliki izin, serta sebagai bahan pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi). Selain itu, hasil monitoring menjadi rujukan awal dalam penanganan potensi gangguan spektrum frekuensi radio dan digunakan sebagai bahan pelaporan serta evaluasi kinerja kepada pimpinan dan unit kerja terkait. Laporan kinerja ini juga mendukung perencanaan kegiatan monitoring dan pengawasan spektrum frekuensi radio pada periode berikutnya. Dengan adanya laporan kinerja tersebut, proses pengawasan spektrum frekuensi radio dapat dilaksanakan secara lebih terarah, berbasis data, dan berkelanjutan.

C. Rekomendasi kedepannya

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio pada tahun berikutnya, perlu dilakukan upaya berkelanjutan dengan mempertahankan capaian monitoring sebesar 100% di seluruh kabupaten/kota serta menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, frekuensi monitoring perlu ditingkatkan pada wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penggunaan frekuensi radio tinggi agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal. Pemanfaatan perangkat monitoring bergerak dan *transportable* juga perlu dioptimalkan, khususnya untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang sulit diakses. Di samping itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat perlu terus ditingkatkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan lapangan. Penguatan analisis hasil monitoring juga diperlukan agar potensi pelanggaran dan gangguan spektrum frekuensi radio dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan tepat sasaran. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendukung pengendalian spektrum frekuensi radio yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Melalui monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota dapat terlaksana pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan peruntukannya sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung perkembangan industri telekomunikasi.

Akuntabel

Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan sesuai rencana kerja dan dilaporkan secara terbuka. Seluruh hasil kegiatan ini didokumentasikan dalam laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kompeten

Kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya.

Harmonis

Kegiatan lapangan dilaksanakan dengan kerja sama yang baik antar pegawai serta menjaga hubungan yang saling menghargai dengan stakeholder. Suasana kerja yang harmonis mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.

Loyal

Indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang berkomitmen dalam mewujudkan tercapainya target yang telah ditetapkan.

Adaptif

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan, perbedaan wilayah, serta perkembangan teknologi telekomunikasi. Metode kerja disesuaikan agar kegiatan monitoring tetap efektif meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan kondisi geografis.

Kolaboratif

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kerja sama tim internal Balmon dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, serta pemilik perangkat atau site ISR. Kolaborasi ini mendukung tercapainya target kinerja secara optimal.

IKSK-1.2.

Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mempunyai tugas pokok dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Sumatera Barat. Salah satu kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan adalah kegiatan validasi data pengguna frekuensi radio yang merupakan upaya untuk pembuktian bahwa penggunaan frekuensi radio oleh pengguna frekuensi radio telah memiliki izin dan atau telah digunakan sesuai dengan izin yang diberikan. Kegiatan ini dilakukan dengan inspeksi atau pemeriksaan langsung ke lokasi stasiun radio dan monitoring perangkat telekomunikasi.

II. Capaian Target

Sasaran Program, Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital. Indikator Kinerja, Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi).

Target		100%
Capaian		100%
Persentase		100%

Tabel 12.
Capaian target IK-1 Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

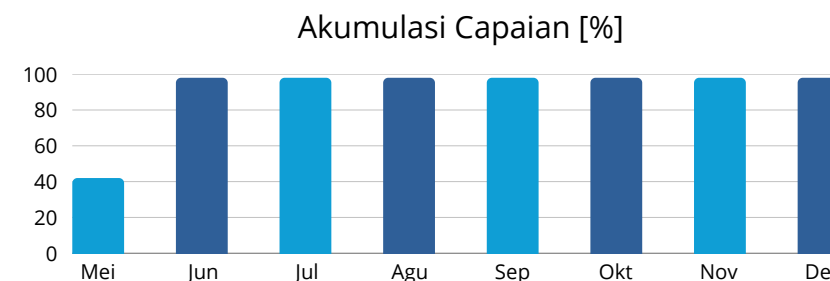
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	50%	87,85%	175,70%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%

A. Pemeriksaan Stasiun Radio

1. Pemeriksaan Microwave Link

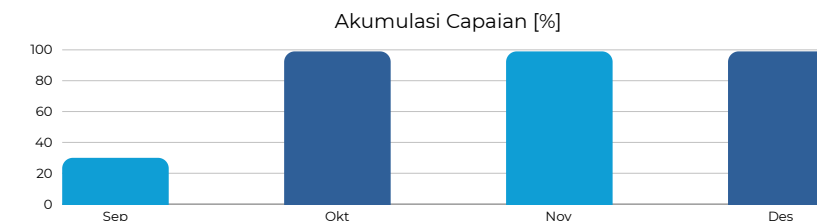
Terkait inspeksi Microwave Link, ISR sampling yang berhasil diinspeksi sebanyak 2.196 dari 2.405 frekuensi menggunakan metode *remote site* maupun open shelter. Stasiun radio tanpa ISR telah ditindaklanjuti oleh pengguna dengan menyesuaikan parameter sesuai izin yang diberikan maupun dengan memproses ISR. *Remote site* dapat diperiksa sejumlah 2.016 stasiun, capaian persentase pemeriksaan stasiun radio (Inspeksi/*Remote Site*) Dapat ditampilkan dalam bentuk grafik:

Bagan 4.
Akumulasi capaian inspeksi Microwave Link, ISR sampling tahun 2025

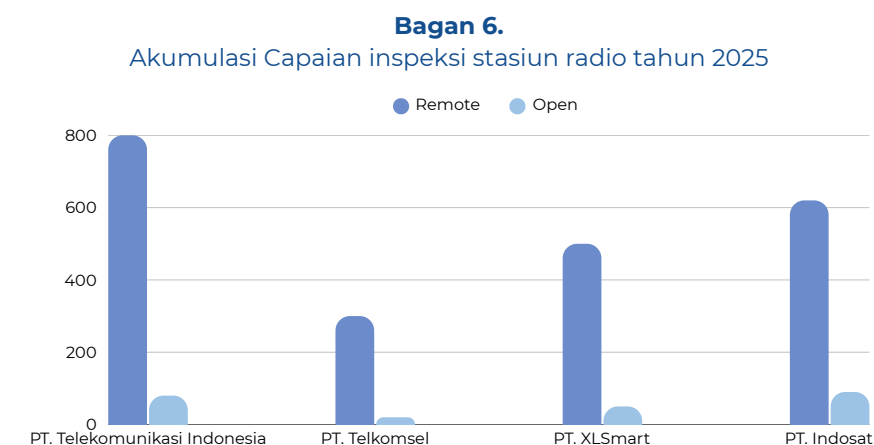


Open Shelter dapat diperiksa sejumlah 185 stasiun, inspeksi Microwave Link, ISR sampling (Inspeksi/*Open shelter*) Dapat ditampilkan dalam bentuk grafik dibawah

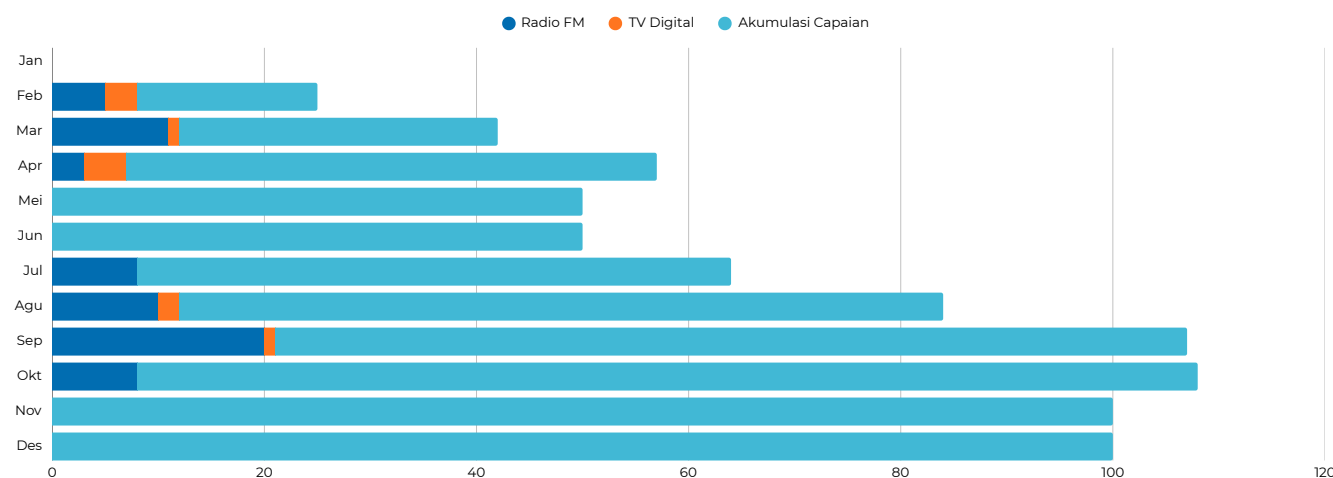
Bagan 5.
Akumulasi Capaian inspeksi Microwave Link, ISR sampling tahun 2025



Grafik Sebaran Frekuensi Radio dan Site Radio MW Link Operator Seluler di Sumatera Barat



Bagan 7.
Akumulasi Capaian parameter teknis stasiun radio tahun 2025



Kegiatan pengukuran parameter teknis stasiun radio bertujuan untuk mengukur kualitas pancaran, *bandwidth*, kecuali dalam rangka pengukuran uji coba/kajian sesuai ketentuan yang berlaku. Prioritas pengukuran dilakukan di daerah padat pengguna, khususnya pada wilayah yang menjadi lintasan pesawat. Setiap temuan ketidaksesuaian wajib ditindaklanjuti dan dipastikan Kembali bahwa semua dinas siaran yang diukur telah sesuai dengan ISR yang dimiliki.

Tabel 13.
Benchmark Capaian Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota 2025

UPT DJID	Target	Capaian	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	100%	100%	Persentase Capaian Balmon Padang dan Balmon Jambi sama-sama 100%
Balmon SFR Kelas II Jambi	100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas terkait persentase pemeriksaan stasiun radio (inspeksi), terlihat bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Kelas II Padang dan Balmon SFR Kelas II Jambi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kedua UPT tersebut memiliki target pemeriksaan sebesar 100% dan berhasil merealisasikan capaian yang sama yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan stasiun radio yang telah direncanakan dalam periode pelaporan berhasil dilaksanakan secara penuh dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan bahwa proses pengawasan terhadap penggunaan frekuensi radio melalui kegiatan inspeksi lapangan telah berjalan secara optimal. Pemeriksaan stasiun radio merupakan salah satu kegiatan penting untuk memastikan bahwa perangkat dan operasional stasiun radio telah sesuai dengan ketentuan perizinan serta standar teknis yang berlaku.

Dengan tercapainya target pemeriksaan secara penuh, potensi pelanggaran penggunaan frekuensi, penyimpangan teknis perangkat, maupun gangguan terhadap pengguna frekuensi lain dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

IV. Analisa Pencapaian Target :

A. Analisa

Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan pemanfaatan spektrum frekuensi radio berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi persyaratan perizinan dan standar teknis yang berlaku. Melalui kegiatan ini, kepatuhan pengguna frekuensi dapat dipantau sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap potensi gangguan komunikasi radio yang dapat berdampak pada layanan publik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pemeriksaan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, khususnya terkait kondisi wilayah yang memiliki karakteristik geografis sulit dijangkau, sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Keterbatasan jumlah personel serta ketersediaan perangkat pemeriksaan juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Di samping itu, keterbatasan jangkauan alat dan kendala teknis tertentu berpotensi mempengaruhi kualitas hasil pengukuran, sehingga pemeliharaan dan kesiapan perangkat menjadi faktor penting. Selain aspek teknis, proses koordinasi dengan pemilik stasiun radio dan instansi terkait masih memerlukan waktu karena adanya tahapan administratif yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan pemanfaatan teknologi terkini, serta penambahan perangkat monitoring menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan stasiun radio ke depannya.

B. Analisis Dampak Kinerja terhadap Masyarakat

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio dilakukan oleh Balai Monitor bertujuan untuk memastikan penggunaan frekuensi radio oleh berbagai pihak sudah sesuai dengan izin dan standar teknis yang berlaku. Dampaknya bagi masyarakat adalah layanan komunikasi yang lebih tertib dan tidak saling mengganggu. Dengan adanya pemeriksaan ini, potensi gangguan sinyal pada layanan penting seperti komunikasi seluler, siaran radio, dan televisi dapat diminimalkan sehingga masyarakat dapat menikmati layanan informasi dan komunikasi yang lebih stabil.

Selain itu, kegiatan pengukuran terhadap stasiun radio FM dan televisi digital juga membantu memastikan kualitas siaran yang diterima masyarakat tetap baik. Ketika parameter teknis seperti kualitas pancaran dan *bandwidth* sesuai dengan ketentuan, masyarakat dapat menerima siaran radio dan televisi dengan suara serta gambar yang lebih jernih.

Hal ini penting karena siaran radio dan televisi masih menjadi salah satu sumber informasi, hiburan, dan edukasi bagi masyarakat. Secara umum, pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio juga mendukung terciptanya pengelolaan spektrum frekuensi yang lebih tertib dan adil bagi semua pengguna. Dengan pengawasan rutin, penggunaan frekuensi yang tidak sesuai izin dapat segera ditindaklanjuti dan tidak merugikan pengguna lain maupun masyarakat. Pada akhirnya, kegiatan ini berkontribusi dalam menjaga kualitas layanan komunikasi dan penyiaran yang dibutuhkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

C. Tindak Lanjut

Hasil pemeriksaan dan pengukuran stasiun radio dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk menilai kesesuaian penggunaan frekuensi radio dengan izin stasiun radio (ISR) yang dimiliki oleh pengguna. Data hasil inspeksi menjadi dasar dalam melakukan tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian, baik melalui pembinaan kepada pengguna, penyesuaian parameter teknis, maupun pengurusan perizinan yang diperlukan. Laporan kinerja ini juga berperan sebagai bahan pendukung dalam pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan, khususnya terhadap stasiun radio yang berada di wilayah dengan tingkat kepadatan penggunaan frekuensi tinggi serta pada lintasan penerbangan. Selain itu, hasil kegiatan dimanfaatkan sebagai bahan pelaporan dan evaluasi kinerja kepada pimpinan dan unit kerja terkait, serta digunakan sebagai referensi dalam perencanaan kegiatan selanjutnya.

D. Rekomendasi kedepannya

Untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan stasiun radio pada periode berikutnya, perlu dilakukan upaya berkelanjutan dengan mempertahankan capaian pemeriksaan sebesar 100% serta menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan pengukuran. Selain itu, intensitas inspeksi perlu ditingkatkan pada wilayah dengan tingkat kepadatan penggunaan frekuensi radio yang tinggi serta pada lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan. Pemanfaatan metode remote site dan open shelter juga perlu dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi pemeriksaan, khususnya pada lokasi yang sulit dijangkau. Di samping itu, koordinasi dengan operator seluler, pengelola stasiun radio, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat untuk mempercepat tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian. Peningkatan kualitas analisis hasil inspeksi dan pengukuran juga diperlukan agar potensi pelanggaran dan gangguan spektrum frekuensi radio dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat sasaran.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan verifikasi site ISR dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan pengguna layanan telekomunikasi. Tim monitoring memberikan pelayanan yang ramah, jelas, dan solutif agar kualitas layanan komunikasi masyarakat tetap terjaga dan tidak saling mengganggu.

Akuntabel

Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja dan didokumentasikan dalam laporan kinerja. Hasil monitoring, inspeksi, pengukuran teknis, serta tindak lanjut temuan lapangan dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan dan publik.

Kompeten

Dalam melaksanakan kegiatan ini, tim pemeriksaan mampu melakukan pengukuran parameter teknis, identifikasi, serta verifikasi kesesuaian izin ISR sehingga hasil pengawasan akurat dan sesuai ketentuan.

Harmonis

Pelaksanaan kegiatan lapangan dilakukan dengan kerjasama yang baik antar pegawai serta komunikasi yang sopan dengan pihak eksternal. Suasana kerja yang saling menghargai mendukung kelancaran kegiatan monitoring dan inspeksi di berbagai wilayah.

Loyal

Tim melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengendalian spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital.

Adaptif

Tim menyesuaikan metode kerja dengan kondisi lapangan, keterbatasan akses lokasi, serta perkembangan teknologi telekomunikasi. Pemanfaatan metode remote site, perangkat bergerak, dan penyesuaian jadwal kerja menjadi bentuk adaptasi agar target kinerja tetap tercapai.

Kolaboratif

Kegiatan dilaksanakan melalui kerja sama tim internal Balmon serta koordinasi dengan pemerintah daerah, operator seluler, pengelola stasiun radio, dan pihak terkait lainnya.

IKSK-1.3.

Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari layanan masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padatnya penggunaan spektrum frekuensi radio oleh masyarakat sangat berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi yang merugikan atau yang dikenal dengan *harmful interference*. Akibat maraknya penggunaan spektrum frekuensi oleh masyarakat tanpa dan/atau tidak sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki, menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio, oleh karena itu dibutuhkan adanya proses pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang handal agar tidak terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) bagi pengguna frekuensi yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

II. Sasaran Kegiatan

Tahapan kegiatan penanganan aduan gangguan spektrum frekuensi radio adalah:

1. Menerima laporan aduan gangguan;
2. Menganalisa laporan pengaduan gangguan;
3. Melakukan observasi dan monitoring di lokasi yang terdeteksi gangguan;
4. Mengidentifikasi sumber gangguan frekuensi;
5. Melaporkan hasil penanganan gangguan;
6. Menginformasikan kepada pelapor terkait hasil penanganan gangguan.

III. Capaian Target

Sasaran Program, Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital.

Indikator Kinerja, Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

Target		95%
Capaian		100%
Persentase		105.26%

Tabel 14.

Capaian target IK-1 Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	97%	150%	15.464%
2022	98%	100%	10.204%

2023	99%	100%	10.101%
2024	100%	100%	100%
2025	95%	100%	10.526%

Pada tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang menerima 1 (satu) Laporan aduan adanya gangguan frekuensi radio dengan gangguan spektrum frekuensi radio penerbangan. Dari keseluruhan laporan yang masuk, gangguan berhasil diselesaikan dan dinyatakan *Clear* oleh Pelapor.

Data penanganan gangguan spektrum frekuensi radio adalah sebagai berikut:

1. Nomor Pengaduan : 140.1/B/LPPNPI/TEK.04.10/IV/2025

Pada tanggal 28 April 2025 dan telah diselesaikan pada 2 Mei 2025

Tabel 15.

Data penanganan gangguan spektrum frekuensi radio

Frekuensi Terganggu (MHz)	Pihak Terganggu	Pihak Pengganggu	Status
TX 1030 MHz RX 1090 MHz	AIRNAV Indonesia (PERUM LPPNPI) Cabang pembantu Padang	Internal	Clear

Perhitungan Capaian menggunakan rumus berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Gangguan SFR yang ditangani}}{\text{Jumlah Total Gangguan SFR}} \times 100\%$$

Indikator kinerja Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio memiliki target sebesar 95%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian indikator pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 105.26%.

Tentunya dengan kemungkinan meningkatnya jumlah gangguan maka Balmon SFR Kelas II Padang di Tahun 2025 harus lebih meningkatkan upaya preventif melalui diskusi, sosialisasi dan upaya pencegahan lainnya sebelum berakhir pada tindakan penegakan hukum.

Tabel 16.

Benchmark Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

UPT DJID	Target	Capaian	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	95%	100%	Persentase Capaian Balmon Padang dan Balmon Jambi sama-sama 100%
Balmon SFR Kelas II Jambi	95%	100%	

Berdasarkan tabel indikator kinerja sebelumnya terkait persentase penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, terlihat bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Kelas II Padang dan Balmon SFR Kelas II Jambi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kedua UPT tersebut memiliki target penyelesaian penanganan gangguan sebesar 95%, namun pada realisasinya keduanya berhasil mencapai capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh laporan atau kasus gangguan frekuensi radio yang ditangani pada periode pelaporan dapat diselesaikan dengan baik dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan efektivitas proses penanganan gangguan yang meliputi penerimaan laporan, analisis teknis, identifikasi sumber gangguan, hingga penyelesaian permasalahan di lapangan. Dengan tingkat penyelesaian yang mencapai 100%, dapat disimpulkan bahwa mekanisme koordinasi, respon teknis, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh kedua Balmon berjalan secara optimal. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja masing-masing telah dilaksanakan secara responsif dan tepat sasaran.

IV. Analisa Pencapaian Target :

A. Analisa

Pada IK-3 Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1. Penanganan gangguan dilakukan dengan mengutamakan analisis berbasis data perizinan, melalui pemetaan lokasi stasiun radio menggunakan perangkat lunak pemantauan guna mengetahui kemungkinan sumber gangguan, baik yang disebabkan oleh penggunaan frekuensi yang sama (*co-channel*) maupun penggunaan frekuensi yang tidak sesuai izin.
2. Penyampaian aduan gangguan dilakukan melalui website, sehingga setiap laporan gangguan dapat terdokumentasi dengan baik dan memudahkan proses penelusuran serta tindak lanjut penanganan gangguan.

B. Analisa Dampak Kinerja terhadap Masyarakat

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio memberikan dampak langsung terhadap kelancaran berbagai layanan komunikasi yang digunakan masyarakat. Dengan adanya proses penerimaan laporan, analisis gangguan, hingga identifikasi sumber masalah, setiap gangguan frekuensi dapat ditangani secara cepat dan tepat.

C. Tindak Lanjut

Hasil penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Padang.

Data penanganan gangguan tersebut digunakan sebagai referensi dalam mengidentifikasi potensi gangguan serupa pada frekuensi dan layanan kritis lainnya. Laporan kinerja juga berfungsi sebagai bahan pendukung dalam pelaporan dan evaluasi kinerja kepada pimpinan serta unit kerja terkait. Selain itu, informasi hasil penanganan gangguan dimanfaatkan sebagai bahan koordinasi dan pembinaan kepada pihak-pihak terkait guna mencegah terulangnya gangguan di masa mendatang. Laporan ini selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan monitoring dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada periode berikutnya.

D. Rekomendasi kedepannya

Untuk meningkatkan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, diperlukan penguatan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan frekuensi radio guna mencegah pemanfaatan frekuensi secara tidak sah yang berpotensi menimbulkan interferensi. Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi kepada pengguna frekuensi radio perlu ditingkatkan agar tercipta pemahaman yang lebih baik serta meningkatnya kesadaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam setiap pelaksanaan penanganan gangguan, jika ditemukan pelanggaran penggunaan frekuensi radio, perlu dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan melalui penerapan sanksi administratif, baik berupa teguran tertulis maupun pengenaan sanksi denda.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Penanganan gangguan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan pengguna frekuensi dan keselamatan layanan publik. Tim Balmon merespons aduan gangguan secara cepat dan memberikan informasi perkembangan penanganan kepada pelapor sampai gangguan dinyatakan selesai (*clear*).

Akuntabel

Setiap aduan gangguan dicatat, dianalisis, ditangani, dan dilaporkan secara tertib. Hasil penanganan gangguan didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan dan pihak pelapor.

Kompeten

Tim kerja memiliki kemampuan teknis dalam melakukan monitoring, pengukuran, dan identifikasi sumber gangguan frekuensi. Kompetensi tersebut memastikan penanganan gangguan dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan teknis.

Harmonis

Pelaksanaan penanganan gangguan dilakukan dengan kerja sama tim yang baik serta komunikasi yang sopan dengan pihak pelapor dan pihak terkait. Koordinasi yang harmonis mendukung kelancaran proses penanganan gangguan di lapangan.

Loyal

Tim kerja melaksanakan tugas penanganan gangguan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah negara dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum frekuensi radio, khususnya pada layanan yang berdampak pada kepentingan publik.

Adaptif

Tim kerja menyesuaikan metode penanganan dengan kondisi lapangan dan karakteristik gangguan yang terjadi. Penanganan dilakukan secara fleksibel agar gangguan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

Kolaboratif

Penanganan gangguan dilaksanakan melalui kerja sama tim internal Balmon serta koordinasi dengan pihak pelapor dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini mempercepat identifikasi sumber gangguan dan penyelesaian masalah.

IKSK-1.4.

Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Digital

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong meningkatnya penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi di berbagai sektor. Kondisi tersebut berimplikasi pada tingginya potensi peredaran dan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis serta ketentuan perizinan yang berlaku. Penggunaan perangkat yang tidak sesuai standar teknis dapat menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio, menurunkan kualitas layanan telekomunikasi, serta berpotensi merugikan masyarakat dan penyelenggara jasa telekomunikasi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam fungsinya sebagai pengawas dan pengendali terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi di wilayah Sumatera Barat, Balmon SFR Kelas II Padang wajib memastikan bahwa seluruh alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan dan/atau diedarkan di wilayah kerja Sumatera Barat telah memenuhi standar teknis, ketentuan sertifikasi, serta perizinan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

II. Sasaran Kegiatan

Kegiatan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Digital adalah pengawasan terhadap jenis alat dan/atau perangkat telekomunikasi prioritas yang telah ditetapkan, baik pada tingkat pengguna, pelaku usaha, maupun peredaran perangkat.

III. Capaian Target

Sasaran Program, Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital.

Indikator Kinerja, Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Digital.

Target		75%
Capaian		100%
Persentase		133.33%

Tabel 17.

Capaian target IK-1 Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2025	75%	100%	13.333%

A. Metode Pengukuran

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Gangguan SFR yang ditangani}}{\text{Jumlah Total Gangguan SFR}} \times 100\%$$

B. Perhitungan Monitoring Perangkat

Selama 2025 telah dilakukan monitoring perangkat telekomunikasi di wilayah provinsi Sumatera Barat dengan hasil 399 dari 300 perangkat prioritas telah termonitor, telah dilaksanakan 16 kegiatan monitoring APT.

Capaian akumulasi perangkat kabupaten/kota perbulan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

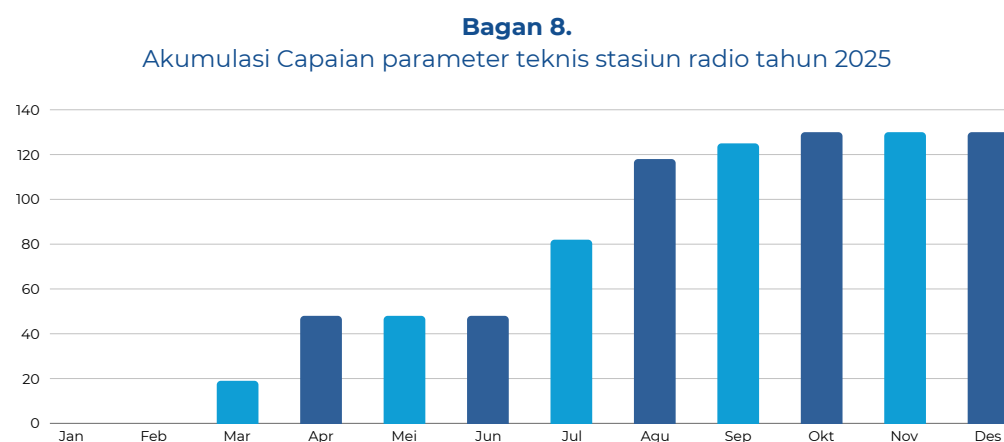
Tabel 18.

Benchmark Capaian Akumulasi Perangkat Kabupaten/Kota

Bulan	Akumulasi Perangkat	Kabupaten/Kota
Maret	58	1. Kota Pariaman : 24 2. Kota Padang Panjang : 34

April	161	1. Kota Padang : 26 2. Kab. Agam : 32 3. Kota Sawahlunto : 21 4. Kota Solok : 24
Juli	252	1. Kab. Tanah Datar : 28 2. Kab. Pasaman Barat : 32 3. Kab. Lima Puluh Kota : 31
Agustus	341	1. Kab. Pesisir Selatan : 18 2. Kab. Solok : 30 3. Kota Payakumbuh : 41
September	366	1. Kab. Sijunjung : 21 2. Kab. Padang Pariaman : 4
Oktober	399	1. Kab. Solok : 14 2. Kota Padang : 19

Persentase capaian pemeriksaan Alat/Perangkat Prioritas Termonitor dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 19.
Benchmark Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Digital

UPT DJID	Target	Capaian	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	75%	100%	Persentase Capaian Balmon Padang dan Balmon Jambi sama-sama 100%
Balmon SFR Kelas II Jambi	75%	100%	

Berdasarkan tabel indikator kinerja terkait persentase tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Kelas II Padang dan Balmon SFR Kelas II Jambi menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik.

Kedua unit pelaksana teknis tersebut memiliki target kepatuhan sebesar 75%, namun pada realisasinya berhasil mencapai capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat telekomunikasi digital yang menjadi objek pengawasan telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja tidak hanya memenuhi target tetapi juga melampauinya secara signifikan. Kesamaan capaian 100% antara Balmon Padang dan Balmon Jambi menunjukkan bahwa kedua UPT memiliki tingkat efektivitas yang seimbang dalam melaksanakan fungsi pengawasan perangkat telekomunikasi. Capaian ini dapat menjadi indikator bahwa mekanisme pengendalian, koordinasi, serta pelaksanaan kegiatan monitoring telah berjalan secara optimal di kedua wilayah kerja. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar teknis perangkat telekomunikasi, pengelolaan ekosistem telekomunikasi menjadi lebih tertib dan mampu mendukung tersedianya layanan komunikasi yang berkualitas bagi masyarakat.

IV. Analisa Pencapaian Target :

A. Analisa

Pada IK-4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Digital dapat dilakukan Analisa sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat, Telekomunikasi Digital meliputi pemeriksaan fisik perangkat, verifikasi sertifikasi dan standar teknis, serta pendataan hasil pengawasan di lapangan.
2. Pencapaian target dari kegiatan ini menunjukkan hasil yang sangat baik yang, mana pelaksanaan pengawasan berjalan secara efektif dan melampaui target yang ditetapkan, sekaligus mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas layanan, ketertiban penggunaan perangkat, serta kepatuhan terhadap regulasi standar teknis perangkat telekomunikasi di wilayah kerja.

B. Analisa Dampak Kinerja terhadap Masyarakat

Kegiatan pengawasan kepatuhan standar teknis perangkat telekomunikasi digital memberikan dampak positif dengan memastikan perangkat yang digunakan telah memenuhi standar dan aman. Melalui pemeriksaan fisik, verifikasi sertifikasi, dan monitoring lapangan, kualitas layanan seperti internet dan telepon seluler menjadi lebih stabil serta minim gangguan. Selain itu, pengawasan ini melindungi masyarakat dari kerugian akibat perangkat yang tidak sesuai standar yang dapat mengganggu sinyal dan layanan. Dengan monitoring di berbagai wilayah, potensi masalah dapat lebih cepat diidentifikasi dan dicegah. Dari kegiatan pengawasan ini mendorong terciptanya ekosistem telekomunikasi yang lebih tertib, aman, dan berkualitas. Masyarakat dapat menggunakan perangkat telekomunikasi dengan lebih nyaman karena kualitas layanan lebih terjaga. Di sisi lain, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan pengguna untuk mematuhi standar teknis perangkat, sehingga perkembangan teknologi digital tetap berjalan sejalan dengan aturan yang melindungi kepentingan masyarakat.

C. Tindak lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja dilakukan secara sistematis untuk mendukung peningkatan kualitas pengawasan. Hasil laporan kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dalam melihat tingkat kepatuhan perangkat telekomunikasi di lapangan, sehingga diketahui kondisi riil serta potensi permasalahan yang masih perlu ditangani. Data hasil monitoring menjadi dasar dalam menentukan wilayah maupun jenis perangkat yang memerlukan pengawasan lebih lanjut agar pelaksanaan kegiatan berikutnya lebih fokus dan efektif. Selain itu, laporan kinerja dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan kegiatan pengawasan pada tahun berikutnya supaya program yang disusun lebih tepat sasaran dan berbasis data. Hasil pengawasan digunakan sebagai sarana edukasi kepada pelaku usaha dan pengguna perangkat agar memahami dan mematuhi ketentuan standar teknis yang berlaku. Di sisi lain, laporan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan sekaligus wujud transparansi dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

D. Rekomendasi kedepannya

Intensitas monitoring perlu ditingkatkan, khususnya wilayah yang capaian pengawasannya belum optimal atau yang memiliki potensi pelanggaran tinggi. Dan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha perlu diperluas agar pemahaman terhadap kewajiban sertifikasi dan pemenuhan standar teknis perangkat semakin meningkat. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pencatatan dan pelaporan hasil monitoring juga perlu dioptimalkan guna memastikan data lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait harus diperkuat untuk mendukung pengawasan yang lebih menyeluruh di lapangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal penting agar petugas selalu mampu mengikuti perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi yang terus berubah dengan cepat.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Pengawasan kepatuhan standar teknis dilakukan dengan mengutamakan perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi. Tim memberikan edukasi kepada pengguna dan pelaku usaha agar menggunakan perangkat yang sesuai standar dan memiliki sertifikasi yang berlaku.

Akuntabel, Setiap kegiatan monitoring perangkat didokumentasikan dan dilaporkan secara tertib. Data hasil pengawasan menjadi dasar evaluasi tingkat kepatuhan perangkat telekomunikasi serta bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan.

Kompeten, Tim kerja memiliki pemahaman teknis terkait standar perangkat, ketentuan sertifikasi, dan perizinan alat telekomunikasi. Kompetensi ini mendukung proses identifikasi perangkat yang sesuai dan tidak sesuai standar teknis.

Harmonis, Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan kerja sama tim yang baik serta komunikasi yang sopan dengan pengguna perangkat dan pelaku usaha. Pendekatan persuasif dilakukan agar pengawasan berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh pihak yang diperiksa.

Loyal, Pegawai melaksanakan tugas pengawasan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga mutu layanan telekomunikasi dan perlindungan konsumen. Setiap penugasan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Adaptif, Petugas menyesuaikan metode pengawasan dengan perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi yang cepat berubah serta kondisi lapangan di berbagai wilayah. Penyesuaian metode kerja dilakukan agar pengawasan tetap efektif.

Kolaboratif, Pengawasan kepatuhan standar teknis dilakukan melalui kerja sama tim internal Balmon serta koordinasi dengan pelaku usaha, instansi terkait, dan pihak lain yang relevan. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas pengawasan di lapangan.

IKSK-1.5.

Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Terkait sarana infrastruktur sistem perangkat, Balmon Padang telah dilengkapi dengan perangkat pendukung Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan alat monitoring/ukur diantaranya terdiri dari stasiun monitor tetap, dan stasiun monitor transportable. Stasiun tetap dan transportable tersebut berlokasi di Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Padang, di Kab. Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi. Keberadaan perangkat pendukung Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan alat monitoring/ukur tersebut sangat diperlukan untuk kegiatan monitoring, sehubungan dengan hal tersebut, Balmon Padang perlu memperhatikan fungsi pengoperasian dan pemanfaatan perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur tersebut agar dapat terjaga kehandalan dan kontinuitasnya.

Dengan demikian, berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT menjadi salah satu indikator kerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Balmon Padang tahun 2025. Indikator ini dimaksudkan agar kondisi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT terawat dan bermanfaat dalam pengelolaan sumber daya Spektrum Frekuensi Radio di wilayah kerja UPT.

II. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari indikator kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT adalah terpeliharanya dengan baik perangkat dan alat monitoring yang menjadi aset Balmon SFR Kelas II Padang. Indikator kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT memiliki target sebesar 85%.

III. Capaian Target

Sasaran Program, **Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital.**

Indikator Kinerja, **Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT .**



Tabel 20.

Perbandingan Realisasi Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring
dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	85%	9.030%	10.624%
2022	95%	95,10%	100,11%
2023	95%	100%	10.526%
2024	95%	100%	10.526%
2025	85%	100%	117,65%

Tabel 21.

Kondisi Perangkat Utama dan Pendukung SMFR Balmon Padang Tahun 2025

Jenis Peralatan	Aktif [unit]	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
Stasiun Bergerak Monitoring	2	-	-	2
Stasiun Bergerak Monitoring	2	-	-	2
Stasiun Tetap	1	-	-	1
Perangkat <i>Transportable</i>	2	-	-	2
Perangkat DF	3	-	-	3
<i>Wideband Receiver</i>	9	-	-	9
Peralatan Ukur	5	-	2	7
Peralatan Pendukung dan Monitoring	20	-	-	20
Antena	9	-	-	9
Unit <i>Tranceiver</i>	33	-	2	35

Pada Tahun anggaran 2025 Balmon Padang juga telah melakukan beberapa pengecekan dan perbaikan perangkat utama dan pendukung. Perbaikan perangkat tersebut diantaranya ada di stasiun tetap Air Dingin berupa relokasi peralatan monitoring *mobile* menjadi stasiun monitoring tetap di kantor Balmon Padang, selain perangkat utama Balmon Padang juga melakukan perbaikan perangkat pendukung.

Ketersediaan dan keandalan peralatan SMFR, baik stasiun bergerak, dan stasiun tetap serta *transportable* menjadi komitmen Balmon Padang dalam menciptakan sistem perawatan dan pemeliharaan yang terintegrasi dan terencana sehingga masalah akibat kerusakan peralatan dapat diketahui lebih dini dan diselesaikan dengan optimal.

Sasaran Kinerja yang ini dicapai Balmon Padang dalam indikator Kinerjanya berfungsi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur sebesar 85% dan pada tahun 2025 ini dapat tercapai 100%. Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Padang melakukan *benchmark* dengan Balai Monitor SFR Kelas II Jambi yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 85%.

Tabel 22.

Benchmark Capaian Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

UPT DJID	Target	Capaian	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	85%	100%	Persentase Capaian Balmon Padang dan Balmon Jambi sama-sama 100%
Balmon SFR Kelas II Jambi	85%	100%	

Dalam melaksanakan program kerja pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio tahun 2025, Balmon Padang berupaya agar perangkat monitoring selalu siap sedia baik secara fungsi maupun kualitas yang diukur pada terjaganya operasional monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT. Ini terlihat pada indikator kinerja yang melebihi target dengan capaian sebesar 117,65%. Adapun target pada indikator kinerja ini untuk semua UPT Monitor di lingkungan DJID yaitu 85%. Di sisi lain, realisasi Balmon Jambi juga tercapai 100% dengan capaian 117,65%. Ini menunjukkan masing-masing UPT dapat menjaga operasional dari stasiun monitor yang ada di wilayah kerjanya secara optimal dan berkesinambungan.

IV. Analisis, Tindak Lanjut serta Efisien

A. Analisa

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang menargetkan 85% dalam terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio yang mana bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur tetap kondisi baik dan terawat. Dari data kondisi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring di Balai Monitor SFR Kelas II Padang yang berlokasi di Kantor Balmon Padang, dan 2 Stasiun Transportable yang berlokasi di Kab. Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi dengan kondisi perangkat 117,65 % berfungsi dengan baik dari yang ditargetkan 85%. Dengan demikian Indikator Kinerja Persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT melebihi target.

Persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT di Balmon SFR Kelas II Padang dapat tercapai melebihi target (117,65%) melalui strategi sebagai berikut:

1. Menyiapkan data perangkat utama maupun pendukung untuk kegiatan monitoring yang akan dilaksanakan pada Balmon SFR Kelas II Padang.
2. Melakukan pemeliharaan dan perawatan untuk semua perangkat monitor yang ada termasuk kalibrasi perangkat stasiun tetap monitoring (*transportable*) dan SPA (*Spectrum Analyzer*).

3. Manajemen sumber daya manusia khususnya untuk pemeliharaan dan perawatan perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring, petugas pemeliharaan ditambahkan dari jabatan fungsional pengendali frekuensi radio yang awalnya hanya memiliki 1 (satu) petugas pelaksana kegiatan pemeliharaan.
4. Melakukan pelaporan rutin untuk pemeliharaan perangkat pendukung SMFR melalui aplikasi SMFR agar pemeliharaan lebih terkontrol dan terjaga.
5. Koordinasi rutin dan efektif dengan direktorat terkait pemeliharaan berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur.
6. Evaluasi terhadap kegiatan pemeliharaan berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur serta tindak lanjut dari kegiatan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan perawatan dan pemeliharaan perangkat pendukung SMFR telah tercapai dari yang ditargetkan 85%, dengan baik. Dengan demikian kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR melebihi target yaitu 117,65%.

B. Tindak Lanjut

Untuk menjaga konsistensi dan peningkatan kinerja berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur, dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang berkesinambungan. Tindak lanjut pada setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi diharapkan dalam bentuk rencana aksi pemeliharaan atau perbaikan perangkat perangkat pendukung SMFR dan Alat/monitoring/ukur maupun pengambilan kebijakan dalam rangka optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Tindak lanjut dan inovasi dari kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR akan dilakukan hal – hal sebagai berikut pada tahun berikutnya:

- Menyusun standar pembagian tanggung jawab penanganan pemeliharaan dan perbaikan termasuk penginputan data pada aplikasi SMFR
- Perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk menangani pemeliharaan dan perbaikan perangkat SMFR
- Melakukan kalibrasi perangkat secara rutin.

C. Efisiensi

Memaksimalkan sistem kerja dan peningkatan pengawasan pekerjaan sehingga mendapat hasil yang optimal, serta peningkatan jumlah peralatan ukur/tes yang digunakan dalam pengecekan dan pemeriksaan perangkat SMFR, dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM terutama fungsional pengendali frekuensi radio.

D. Rekomendasi kedepannya

1. Peningkatan sistem pemeliharaan perangkat secara berkelanjutan, Kegiatan pemeliharaan perangkat pendukung Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) perlu dilaksanakan secara berkesinambungan melalui pemeliharaan preventif dan pemeriksaan berkala guna memastikan seluruh perangkat monitoring tetap berada dalam kondisi optimal serta meminimalisasi potensi gangguan operasional.
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya jabatan fungsional pengendali frekuensi radio, perlu terus dilakukan melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, maupun kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat monitoring dan penggunaan alat ukur spektrum frekuensi radio.
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi dan sistem pelaporan, Pemanfaatan aplikasi SMFR sebagai sarana pelaporan dan pemantauan kondisi perangkat perlu terus dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan perangkat serta memastikan setiap kondisi perangkat dapat terdokumentasi dengan baik.
4. Penguatan standar operasional pemeliharaan perangkat, Penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih sistematis terkait pemeliharaan, perbaikan, serta pembagian tanggung jawab pengelolaan perangkat monitoring diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan perangkat SMFR.

E. Analisa Dampak Kinerja Terhadap Masyarakat

1. Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan penyiaran, Terjaganya operasional perangkat monitoring spektrum frekuensi radio memungkinkan pengawasan penggunaan frekuensi radio dapat dilakukan secara optimal sehingga dapat meminimalisasi potensi gangguan frekuensi yang dapat mempengaruhi kualitas layanan komunikasi dan penyiaran yang diterima oleh masyarakat.
2. Mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, Dengan berfungsinya perangkat monitoring secara optimal, kegiatan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dilaksanakan secara lebih efektif sehingga dapat mencegah terjadinya penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan spektrum frekuensi radio, Capaian kinerja yang melebihi target menunjukkan bahwa pengelolaan spektrum frekuensi radio dilakukan secara optimal dan profesional, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, dengan berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT dengan baik maka dapat mendukung layanan spektrum frekuensi radio kepada masyarakat;

Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;

Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;

Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;

Loyal, dalam bentuk menjaga sebaik-baiknya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur yang merupakan aset negara;

Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;

Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) untuk menjaga perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.

IKSK-1.6.

Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

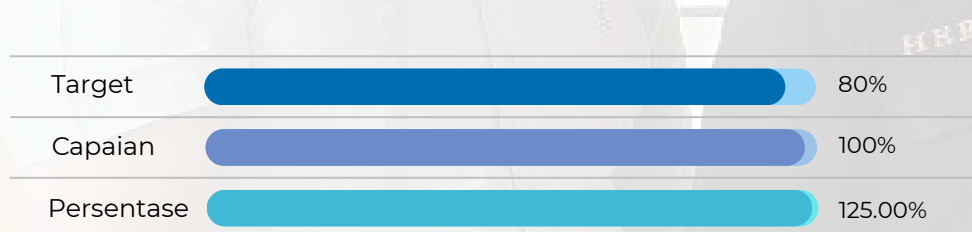
Kegiatan penanganan sanksi denda administratif merupakan suatu upaya untuk melakukan penegakkan hukum di bidang spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi digital. Tindakan pengguna spektrum frekuensi radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi ilegal dapat mengakibatkan terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) terhadap pengguna yang sudah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Semakin meningkatnya jumlah penggunaan spektrum frekuensi radio semakin meningkat pula penggunaan spektrum frekuensi ilegal di masyarakat.

II. Sasaran Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan menyesuaikan jadwal penertiban SFR dan APT Nasional dan sesuai program Kerja Balmon Padang. Selama tahun 2025 dilakukan 3 kegiatan operasi penertiban yang mana jadwalnya menyesuaikan program dari Ditjen Infrastruktur Digital. Penertiban terhadap pelanggaran tidak memiliki ISR/Ilegal/Kadaluarsa/tidak sesuai parameter teknis juga dilakukan pada saat pelaksanaan tupoksi lainnya. Penindakan yang dilakukan mengacu pada peraturan SDPPI Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

III. Capaian Target

Sasaran Program, **Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital.**



Tabel 23.
Capaian target IK-6 Penanganan Denda Sanksi Administratif

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	93%	100%	10.753%
2025	100%	100%	100%

Tabel 24.
Kegiatan Penertiban

Kabupaten/Kota	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kab. Lima puluh Kota	Penertiban Penggunaan SFR/APT Serentak Secara Nasional Tahap I Tahun 2025 pada Dinas Tetap Berdasarkan Izin Kelas	5 s.d 9 Mei 2025
Kota Padang, Kab. Agam dan Kab. Pasaman Barat	Penertiban Serentak Secara Nasional Tahap II Tahun 2025 pada <i>Microwave Link</i> Operator Seluler	4 s.d Agustus 2025

Kota Padang, Kota Solok dan Kab. Solok	Penertiban Penggunaan SFR/APT Serentak Secara Nasional Tahap III Tahun 2025 pada Pelaku Usaha Pengguna Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi pada Dinas <i>Land Mobile</i>	23 s.d 31 Oktober 2025
--	---	------------------------

A. Metode Pengukuran Penanganan Sanksi Denda Administratif:

$$\frac{\sum \text{Inv.Denda yang terbayar} + (\text{Bobot} \times \text{Tindak lanjut Inv.Denda belum terbayar}) + \text{Inv.Baru Belum Jatuh tempo}}{(\sum \text{Inv. Denda Administratif}) \times 100\%}$$

B. Capaian Perhitungan Jumlah Denda Administratif:

Tabel 25.
Capaian Perhitungan Jumlah Denda Administratif

Tibnas	Jumlah Denda
I dan III	Pada 2025 sebanyak Rp.20.189.400 Ditambah denda penertiban tahun 2024 sebanyak Rp. 620.928
II	Ditangani oleh DJID

Pada kegiatan penertiban dilakukan penindakan terhadap temuan pelanggaran berupa peringatan, penghentian langsung dilapangan atau sanksi denda *administrative*, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26.
Penindakan dari Kegiatan Penertiban

Kabupaten/Kota	Pengguna Frekuensi	Tanggal Kegiatan	Jenis/Merek Perangkat	Tindak Lanjut Hasil Penertiban
Kota Padang	PT. PANGERAN SATI HOTEL	5 – 9 Mei 2025	Wireless Access Point / Ruijie	- Menyesuaikan frekuensi
Kab. Lima Puluh Kota	FRIEND NET	5–9 Mei 2025	Wireless Access Point / Mikrotik	- Denda sudah terbayar - Perangkat sudah dikembalikan
Kab. Agam	PT. Telekomunikasi Indonesia (Bukit Tambulun)	4-8 Agustus 2025	Radio Link / Ceragon	- Denda sudah terbayar
Kab. Agam	PT. Telekomunikasi Indonesia (STO Lubuk Basung)	4-8 Agustus 2025	Radio Link / Ceragon	- Denda sudah terbayar - ISR sudah terbit

Kab. Agam	PT. Telekomunikasi Indonesia (STO Lubuk Basung)	4-8 Agustus 2025	Radio Link / Ceragon	- Denda sudah terbayar - ISR sudah terbit
Kota Padang	PT. XLSmart Telecom Sejahtera	4-8 Agustus 2025	Radio Link / NEC	- Denda sudah terbayar
Kab. Agam	PT. XLSmart Telecom Sejahtera	4-8 Agustus 2025	Radio Link / ZTE	- Denda sudah terbayar - Menyesuaikan frekuensi
Kab. Pasaman Barat	PT. XLSmart Telecom Sejahtera	4-8 Agustus 2025	Radio Link / NEC	- Denda sudah terbayar - Menyesuaikan frekuensi
Kota Padang	PT. Indosat	4-8 Agustus 2025	Radio Link / - Huawei - Nokia - NEC	- Denda sudah terbayar - Menyesuaikan parameter teknis
Kota Padang	PT. XLSmart Telecom Sejahtera	4-8 Agustus 2025	Radio Link / NEC	- Denda sudah terbayar - Menyesuaikan frekuensi
Kab. Solok	PT. Bukik Barampuang Basinar – The Sovia Alahan Panjang	27-31 Oktober 2025	HT / WLN	- Denda sudah terbayar
Kab. Solok	Sky Lake Park	27-31 Oktober 2025	HT / BAOFENG	- Belum Bayar
Kab. Solok	Saung Batupang	27 - 31 Oktober 2025	HT / WLN (4 unit) BERLIN (2 unit)	- Denda sudah terbayar - ISR sudah terbit

Tabel 27.

Benchmark Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Digital

UPT DJID	Target	Capaian	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	80%	100%	Persentase Capaian Balmon Padang dan Balmon Jambi sama-sama 100%
Balmon SFR Kelas II Jambi	80%	100%	

Berdasarkan tabel indikator kinerja terkait persentase penanganan sanksi denda administratif, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Kelas II Padang dan Balmon SFR Kelas II Jambi menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Kedua unit pelaksana teknis tersebut memiliki target penanganan sebesar 80%, namun dalam pelaksanaannya berhasil mencapai realisasi sebesar 100%. Kesamaan capaian antara Balmon Padang dan Balmon Jambi menunjukkan bahwa kedua UPT memiliki tingkat efektivitas dan komitmen yang sama dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan regulasi di bidang spektrum frekuensi radio. Keberhasilan melampaui target yang telah ditetapkan ini menjadi indikator bahwa sistem pengendalian dan pengelolaan penanganan sanksi administratif telah berjalan dengan baik di kedua wilayah kerja.

IV. Analisa Pencapaian Target

A. Analisa

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan penertiban nasional, yang mana telah dilaksanakan berbagai aktivitas pemantauan dan pemeriksaan di sejumlah wilayah kerja. Secara umum, mayoritas pengguna frekuensi radio telah memenuhi ketentuan perizinan serta persyaratan teknis yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan beberapa pelanggaran, antara lain penggunaan frekuensi tanpa izin resmi dan pemakaian perangkat yang belum memiliki sertifikasi. Terhadap temuan tersebut, telah dilakukan langkah penanganan berupa pemberian teguran serta penghentian, penyegelan perangkat yang melanggar ketentuan dan denda sanksi administratif.

Tabel 28.

Capaian target IK-6 Penanganan Denda Sanksi Administratif

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	93%	100%	10.753%
2025	100%	100%	100%

B. Tindak Lanjut

Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja dilakukan dengan menjadikan hasil penertiban sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja. Data terkait jenis dan lokasi pelanggaran dianalisis guna menentukan area maupun layanan yang memerlukan pengawasan lebih intensif. Hasil penanganan denda administratif dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun rencana operasi penertiban selanjutnya agar pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran.

Laporan tersebut juga digunakan sebagai materi pembinaan dan sosialisasi kepada para pengguna frekuensi, sehingga mereka memahami kesalahan yang terjadi dan tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa mendatang. Di sisi lain, pencatatan pembayaran denda serta tindak lanjut atas setiap temuan menjadi bentuk akuntabilitas kepada pimpinan sekaligus wujud transparansi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum.

C. Rekomendasi kedepannya

Rekomendasi ke depan diarahkan pada penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kepatuhan pengguna frekuensi radio. Pengawasan rutin perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya penggunaan frekuensi ilegal atau tanpa izin sejak dini. Kemudian, sosialisasi mengenai kewajiban memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) serta kepatuhan terhadap parameter teknis perangkat harus terus diperluas agar pemahaman pengguna semakin baik.

Pemanfaatan sistem digital dalam pencatatan pelanggaran dan pemantauan pembayaran denda juga perlu dioptimalkan untuk mendukung proses yang lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Di samping itu, koordinasi dengan Ditjen Infrastruktur Digital dan instansi terkait perlu diperkuat dalam pelaksanaan operasi nasional agar penertiban berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas juga menjadi hal penting agar penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara profesional, konsisten, dan sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Pelaksanaan penertiban dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan kepada pengguna frekuensi dan perangkat telekomunikasi. Petugas memberikan penjelasan mengenai ketentuan perizinan dan standar teknis agar pengguna memahami kewajiban serta terhindar dari pelanggaran di kemudian hari.

Akuntabel, Setiap kegiatan penertiban dan pengenaan sanksi dicatat dan dilaporkan secara tertib. Data pelanggaran, jenis tindak lanjut (peringatan, penyesuaian parameter, penerbitan ISR, hingga pembayaran denda) didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Kompeten, Petugas melaksanakan penindakan sesuai ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku. Pemahaman terhadap peraturan tentang sanksi administratif dan standar teknis perangkat memastikan penanganan pelanggaran dilakukan secara tepat dan profesional.

Harmonis, Pelaksanaan penertiban dilakukan dengan menjaga sikap sopan, komunikasi yang baik, serta kerja sama tim yang solid. Pendekatan humanis kepada pengguna frekuensi dan pelaku usaha dilakukan agar proses penegakan aturan tetap berjalan tertib dan kondusif.

Loyal, Pegawai melaksanakan penertiban sebagai bentuk komitmen terhadap tugas negara dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.

Adaptif, Pegawai melaksanakan penertiban sebagai bentuk komitmen terhadap tugas negara dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.

Kolaboratif, Kegiatan penertiban dilaksanakan melalui kerja sama tim internal Balmon serta koordinasi dengan pihak terkait, termasuk operator seluler, pelaku usaha, dan instansi pendukung.

IKSK-1.7.

Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Kualitas layanan telekomunikasi merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan di era digital. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi yang andal, cepat, dan berkualitas, diperlukan upaya pengawasan yang sistematis terhadap mutu layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi. Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggara layanan telah memenuhi standar kualitas layanan (*Quality of Service/Quality of Experience*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data hasil pengukuran kualitas layanan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggara, penanganan pengaduan masyarakat, serta perumusan kebijakan pengendalian dan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi di wilayah kerjanya dan menyediakan data hasil pengukuran yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2025, target Perjanjian Kinerja indikator ini adalah tercapainya 100% Monitoring kualitas layanan (*Quality of Service/Quality of Experience*) di 19 Kabupaten/Kota.

III. Capaian Target

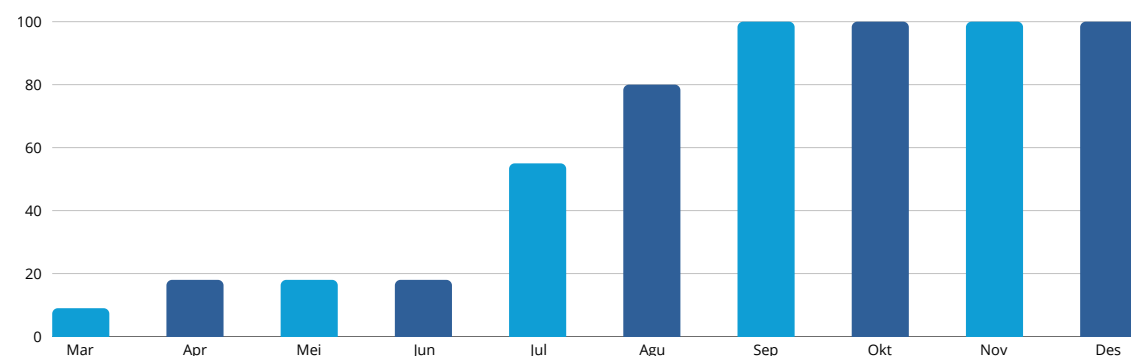
Sasaran Program, **Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital.**

Indikator Kinerja, **Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan.**



Bagan 9.

Akumulasi Capaian Pengukuran Kualitas Layanan tahun 2025



Tabel 29.

Capaian okupansi kabupaten/kota perbulan

Bulan	Akumulasi Okupansi	Kabupaten/Kota	Metode Pengukuran
Maret	1	Kota Padang Pariaman	Sigmon
April	2	Kota Padang	Sigmon
Mei	-	-	Sigmon
Juni	-	-	Sigmon

Juli	8	Kab. Agam Kota Bukittinggi Kab. Lima Puluh Kota Kota Payakumbuh Kab. Sijunjung Kota Sawahlunto	Sigmon
Agustus	12	Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Kota Solok Kota Pariaman	Sigmon
September	15	Kab. Tanah Datar Kab. Pasaman Kota Padang Panjang	Sigmon
Oktober	18	Kota Padang Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat	Alat Ukur QoS
November	18	-	-
Desember	18	-	-

Tabel 30.

Benchmark Capaian Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

UPT DJID	Target	Capaian	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	100%	100%	Persentase Capaian Balmon Padang dan Balmon Jambi sama-sama 100%
Balmon SFR Kelas II Jambi	100%	100%	

Berdasarkan tabel indikator kinerja terkait persentase tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan, Balmon Padang dan Balmon Jambi menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran dan penyediaan data kualitas layanan telekomunikasi. Kedua unit pelaksana teknis memiliki target kinerja sebesar 100%, dan Balmon Padang berhasil mencapai capaian yang sesuai dengan target tersebut yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pengukuran kualitas layanan yang direncanakan telah dilaksanakan secara lengkap serta data hasil pengukurannya telah tersedia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sementara itu, Balmon SFR Kelas II Jambi menunjukkan capaian yang bahkan melampaui target, dengan persentase capaian sebesar 122,20%. Capaian ini mengindikasikan bahwa jumlah kegiatan pengukuran kualitas layanan yang dilaksanakan lebih banyak dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Dengan kata lain, Balmon Jambi tidak hanya memenuhi kewajiban penyediaan data pengukuran kualitas layanan, tetapi juga melakukan upaya tambahan dalam melakukan pengukuran di lapangan sehingga menghasilkan data yang lebih luas dan komprehensif.

IV. Analisa Pencapaian Target

A. Analisa

1. Kegiatan monitoring kualitas layanan (*Quality of Service/Quality of Experience*) telah dilaksanakan di seluruh 19 kabupaten/kota atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi ini menandakan bahwa seluruh wilayah kerja berhasil di monitor sesuai rencana. Pelaksanaan pengukuran dilakukan secara bertahap setiap bulan dengan memanfaatkan aplikasi Sigmon serta alat ukur QoS untuk memastikan hasil yang akurat dan terukur.
2. Kegiatan ini mencakup wilayah perkotaan maupun kabupaten di Sumatera Barat sehingga gambaran kualitas layanan dapat diperoleh secara menyeluruh. Data hasil pengukuran telah terdokumentasi dengan baik dan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara layanan telekomunikasi. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengukuran berjalan sesuai perencanaan dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan mutu layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

B. Analisis dampak kinerja terhadap masyarakat

Ketersediaan data hasil pengukuran kualitas layanan telekomunikasi memberikan dampak positif bagi masyarakat karena membantu memastikan bahwa layanan seperti internet, telepon seluler, dan komunikasi data berjalan dengan baik. Melalui kegiatan monitoring kualitas layanan di seluruh kabupaten/kota, pemerintah dapat mengetahui kondisi nyata kualitas jaringan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dengan adanya data tersebut, penyelenggara layanan telekomunikasi dapat dievaluasi apakah sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan atau masih perlu perbaikan. Data hasil pengukuran ini juga sangat bermanfaat dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kualitas jaringan, seperti sinyal yang lemah, internet lambat, atau panggilan yang sering terputus. Dengan adanya data yang akurat dari hasil pengukuran di lapangan, pihak terkait dapat lebih mudah mengidentifikasi wilayah yang mengalami masalah layanan dan mendorong operator untuk segera melakukan peningkatan kualitas jaringan.

Kegiatan pengukuran kualitas layanan ini membantu menciptakan layanan telekomunikasi yang lebih merata dan berkualitas di berbagai daerah. Masyarakat dapat menikmati akses komunikasi dan internet yang lebih baik untuk mendukung aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, belajar, berbisnis, maupun mendapatkan informasi. Dengan demikian, pengawasan kualitas layanan turut mendukung perkembangan ekonomi digital dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

C. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan data hasil pengukuran sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh setiap penyelenggara telekomunikasi di masing-masing wilayah. Hasil pengukuran tersebut juga menjadi dasar dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait gangguan atau penurunan kualitas layanan, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara lebih tepat dan berbasis data. Selain itu, data yang tersedia dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kepada penyelenggara layanan agar kualitas jaringan dapat ditingkatkan sesuai standar yang berlaku. Laporan hasil pengukuran juga menjadi acuan dalam merencanakan kegiatan monitoring berikutnya, terutama dengan memprioritaskan wilayah yang masih memerlukan peningkatan kualitas layanan. Seluruh dokumentasi hasil pengukuran disusun secara tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan dan instansi terkait.

D. Rekomendasi kedepannya

1. Hal yang dapat dilakukan kedepannya difokuskan pada peningkatan konsistensi dan kualitas pelaksanaan pengukuran layanan telekomunikasi. Pengukuran kualitas layanan perlu dilakukan secara berkala dan merata di seluruh wilayah kerja agar kondisi jaringan dapat terpantau secara menyeluruh. Pemanfaatan teknologi dan alat ukur juga perlu terus diperkuat guna menghasilkan data yang lebih akurat, rinci, dan dapat diandalkan. Selain itu, koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi harus ditingkatkan agar tindak lanjut atas hasil pengukuran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.
2. Analisis data juga perlu dioptimalkan untuk mendeteksi secara dini wilayah yang berpotensi mengalami penurunan kualitas layanan. Di samping itu, peningkatan kapasitas petugas dalam penggunaan alat ukur dan pengolahan data menjadi hal penting agar mampu mengikuti perkembangan teknologi jaringan yang terus berkembang.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Pengukuran kualitas layanan dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi. Data hasil pengukuran menjadi dasar perbaikan kualitas layanan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik, stabil, dan andal.

Akuntabel, Seluruh kegiatan pengukuran QoS/QoE dicatat dan dilaporkan secara tertib. Data hasil pengukuran disusun secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Kompeten, Petugas memiliki kemampuan teknis dalam melakukan pengukuran kualitas layanan menggunakan perangkat Sigmon dan alat ukur QoS lainnya. Kompetensi ini memastikan hasil pengukuran akurat dan sesuai standar yang ditetapkan.

Harmonis, Pelaksanaan pengukuran dilakukan dengan kerja sama tim yang baik serta komunikasi yang sopan dengan pihak terkait di lapangan.

Loyal, Pegawai melaksanakan tugas pengukuran kualitas layanan sebagai bentuk komitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu layanan telekomunikasi dan perlindungan konsumen.

Adaptif, Petugas menyesuaikan metode pengukuran dengan kondisi wilayah, karakteristik jaringan, serta ketersediaan alat ukur. Penggunaan metode Sigmon dan alat ukur QoS dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan lapangan.

Kolaboratif, Kegiatan pengukuran dilaksanakan melalui kerja sama tim internal Balmon serta koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi dan pihak terkait. Kolaborasi ini mendukung kelancaran pelaksanaan pengukuran dan tindak lanjut perbaikan kualitas layanan.

IKSK-1.8.

Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Salah satu fungsi pelayanan pada Balai Monitor SFR Kelas II Padang adalah pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) bagi anggota dan calon anggota Organisasi Amatir Radio (ORARI) berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR). Setelah mendapatkan IAR maka para pegiat amatir radio diperkenankan untuk mengudara atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk amatir radio sesuai dengan tingkatan dan ketentuan teknis yang berlaku. Sistem pelaksanaan UNAR dimulai dengan proses pendaftaran yang dilakukan secara online sampai dengan pencetakan kartu ujian untuk peserta yang dapat dilakukan setelah peserta melakukan proses verifikasi kehadiran pada pelaksanaan.

II. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya pelaksanaan ujian negara amatir radio adalah terciptanya pengguna frekuensi radio yang tertib. Indikator kinerja persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT di Balai Monitor SFR Kelas II Padang memiliki target sebesar 100%.

III. Capaian Target

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT tahun 2025 di targetkan 100% dengan jumlah pelaksanaan 6 kali kegiatan. Berdasarkan jumlah pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 terlaksana sebanyak 8 (delapan) kali kegiatan yang terbagi dalam 2 (dua) kegiatan UNAR Non Reguler dan 6 (enam) kali UNAR Reguler. total peserta dari Januari sampai dengan Desember 2025 adalah sebanyak 105 (seratus lima) peserta, sehingga persentase (%) capaian Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT Tahun 2025 adalah sebesar 133%.

Tabel 31.
Pelaksanaan UNAR Tahun 2025

TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS UNAR	JUMLAH PESERTA	LULUS	TIDAK LULUS
27 Feb 2025	UNAR REGULER 1	4	3	1
24 Apr 2025	UNAR REGULER 2	1	1	0
31 Mei 2025	UNAR REGULER 3	11	10	1
26 Jun 2025	UNAR REGULER 4	2	2	0
31 Jul 2025	UNAR REGULER 5	4	4	0
20 Sep 2025	UNAR NON REGULER 2	37	29	8
30 Okt 2025	UNAR REGULER 6	17	15	2
21 Des 2025	UNAR NON REGULER 3	29	18	11
JUMLAH PESERTA		178	135	43

IV. Analisis, Tindak Lanjut serta Efisien

A. Analisa

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang mempunyai target kinerja 100% untuk Persentase (%) peserta ujian negara amatir radio berbasis CAT. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pengguna amatir radio sudah memiliki izin. Pada tahun 2025 ini Balmon Padang menargetkan untuk jumlah peserta UNAR yaitu 80 dengan realisasi 178 Orang mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR). Keberhasilan pelaksanaan UNAR tentunya didukung adanya keterlibatan dan Kerjasama dengan Organisasi Amatir Radio Lokal yang baik dalam menjaring calon peserta UNAR serta kemampuan dalam memberikan dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas PC/Laptop serta jaringan internet dengan bekerjasama dengan institusi Pendidikan ataupun instansi pemerintahan.

B. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dan inovasi kegiatan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT akan dilakukan hal – hal sebagai berikut pada tahun berikutnya:

1. Melakukan sosialisasi dengan lebih luas ke seluruh pengguna frekuensi radio.
2. Manajemen sumber daya manusia khususnya dalam bidang pelayanan untuk dapat mensosialisasikan perihal Ujian Negara Amatir Radio setiap ada pelayanan.
3. Evaluasi terhadap kegiatan UNAR serta tindak lanjut dari kegiatan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT tercapai 226.25%.

C. Efisiensi

Pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT dilakukan secara efektif dan efisien dengan cara:

1. Optimalisasi jadwal pelaksanaan UNAR Reguler dan Non Reguler.
2. Memanfaatkan sarana perangkat laptop yang digunakan oleh pegawai untuk digunakan saat pelaksanaan ujian Non Reguler di hari libur atau disaat perangkat tersebut tidak digunakan oleh pegawai. Hal ini dapat menghemat anggaran pengadaan perangkat yang dikhususkan untuk UNAR.

D. Rekomendasi Kedepannya

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada indikator Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis *Computer Assisted Test* (CAT), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang perlu melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kegiatan sosialisasi secara lebih luas dan terarah, Sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan Izin Amatir Radio serta pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT perlu ditingkatkan melalui berbagai media informasi dan kegiatan tatap muka kepada komunitas pengguna frekuensi radio serta organisasi amatir radio di wilayah kerja Balmon Padang.
2. Penguatan kerja sama dengan organisasi amatir radio dan pemangku kepentingan terkait, Kerja sama dengan organisasi amatir radio lokal, lembaga pendidikan, serta instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan guna mendukung penyelenggaraan UNAR, khususnya dalam menjaring calon peserta serta penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian, Pemanfaatan perangkat komputer/laptop serta jaringan internet yang tersedia perlu terus dioptimalkan agar pelaksanaan UNAR berbasis CAT dapat berjalan secara efektif dan efisien tanpa memerlukan pengadaan perangkat tambahan yang signifikan.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan UNAR, Peningkatan kompetensi pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan UNAR perlu dilakukan melalui pelatihan maupun bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

5. Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan UNAR, Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan UNAR perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ujian, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Analisa Dampak Kinerja Terhadap Masyarakat

Capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dalam penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT yang melebihi target memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan pengelolaan spektrum frekuensi radio secara umum.

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan frekuensi radio, Dengan meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti dan lulus Ujian Negara Amatir Radio, diharapkan semakin banyak pengguna amatir radio yang memiliki izin resmi sehingga penggunaan frekuensi radio dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, Pelaksanaan UNAR menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memastikan bahwa pengguna amatir radio memiliki pemahaman yang memadai terkait aturan, etika, serta teknis penggunaan frekuensi radio sehingga dapat meminimalisasi potensi gangguan frekuensi.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perizinan spektrum frekuensi radio, Melalui kegiatan UNAR yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya kepemilikan izin dalam penggunaan perangkat radio komunikasi.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunikasi radio, Pelaksanaan UNAR yang menjangkau lebih banyak peserta dapat meningkatkan minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan amatir radio yang bersifat edukatif, teknis, dan sosial.
5. Mendukung kegiatan komunikasi darurat dan kebencanaan, Komunitas amatir radio sering berperan dalam membantu komunikasi pada situasi darurat maupun bencana alam. Dengan semakin banyaknya operator amatir radio yang memiliki izin resmi dan kompetensi yang memadai, maka dukungan komunikasi darurat bagi masyarakat dapat semakin optimal.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, dengan memberikan fasilitas pelaksanaan ujian amatir radio bagi peminat frekuensi radio dengan baik;

Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;

Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;

Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar,

Loyal, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan Instansi;

Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;

Kolaboratif, selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) untuk menjaga perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global (*Global Maritime Distress and Safety System*) yang selanjutnya disingkat GMDSS adalah sistem keselamatan dan marabahaya pelayanan global, baik antara stasiun kapal dengan stasiun kapal lain, antara stasiun kapal dengan stasiun pantai melalui penggunaan komunikasi radio terestrial dan satelit. Tentunya dalam komunikasi diperlukan pengoperasian alat dan/atau perangkat telekomunikasi pada stasiun radio dinas operasi Pelabuhan (*port operations service*), stasiun radio dinas bergerak maritim (*maritime mobile service*) dan stasiun radio dinas satelit bergerak maritim (*maritime mobile satellite service*) yang wajib dilaksanakan oleh Radio Elektronika dan/atau operator radio yang telah memiliki Sertifikat Kewenangan atau Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi Solas. Sertifikat tersebut terdiri dari Sertifikat Jarak Jangkauan Dekat (SRC) dan Sertifikat Jarak Jangkauan Jauh (LRC).

II. Sasaran Kegiatan

Indikator kinerja Bimbingan Teknis SRC/LRC memiliki target sebesar 100% pada Tahun 2025 ini.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Bimbingan Teknis SRC/LRC memiliki target sebesar 100%. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek SRL/LRC telah dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu di Kab. Pesisir Selatan pada tanggal 09 September 2025 dan di Kota Padang pada tanggal 28 Oktober 2025. Dari kegiatan ini berhasil mendapatkan sebanyak 59 sertifikat dari target tetapkan sebanyak 50 sertifikat.

Pada perjanjian kinerja tahun 2025 capaian Bimbingan Teknis SRC/LRC melampaui target sebesar 180%.

Tabel 32.
Jumlah Bimtek SRC/LRC selama tahun 2025

Tgl Bimtek	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah Sertifikat	Ket
9 Sep 2025	Pesisir Selatan	42	SRC
28 Okt 2025	Padang	17	LRC

IV. Analisis, Tindak Lanjut serta Efisien

A. Analisa

Capaian yang diperoleh Balmon Padang Pada 2025 ini yaitu 180%, terhadap target peserta menunjukkan keberhasilan Balmon Padang dalam menarik minat dan partisipasi peserta. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC dapat melebihi target (100%) melalui strategi sebagai berikut: Selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan instansi Kementerian Kelautan dan perikanan melalui Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota yang memiliki potensi perikanan serta kepada para ketua-ketua persatuan nelayan yang ada di Sumatera Barat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mengumpulkan para nelayan dan pemilik kapal untuk dapat diberikan sosialisasi dan bimtek terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan komunikasi keselamatan pelayaran.

B. Tindak Lanjut

Balmon Padang melakukan pemantauan pasca Bimtek SRC/LRC dengan berkunjung ke lapangan dan berkomunikasi dengan peserta. Selain itu Balmon Padang juga akan terus mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Bimtek SRC/LRC.

C. Efisiensi

Dalam upaya mencapai target indikator Bimtek SRC/LCR, Balmon Padang berhasil menerapkan berbagai efisiensi sumber daya, dalam perencanaan kegiatan dipilih jadwal yang sesuai dengan ketersediaan peserta dan pihak terkait. Penentuan waktu yang tepat membantu meminimalkan absensi peserta dan meningkatkan efektivitas bimbingan teknis. Hal ini dilakukan karena biasanya nelayan dan operator radio kapal sangat sulit untuk diminta hadir dalam suatu pertemuan, sehingga perlu komunikasi yang intens oleh pihak terkait dalam hal ini yaitu UPT PPI dan Dinas Perikanan.

D. Rekomendasi Kedepannya

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada indikator Persentase (%) pelaksanaan Bimbingan Teknis *Short Range Certificate* (SRC) dan *Long Range Certificate* (LRC), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang perlu melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkelanjutan

1. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan komunikasi keselamatan pelayaran perlu terus ditingkatkan, khususnya kepada nelayan, pemilik kapal, serta operator radio kapal di wilayah pesisir yang memiliki aktivitas perikanan yang tinggi.
2. Penguatan koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait, Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit Pelaksana Teknis pelabuhan perikanan, serta organisasi atau kelompok nelayan perlu terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang lebih efektif dan menjangkau lebih banyak peserta.
3. Optimalisasi metode pelaksanaan bimbingan teknis, Pelaksanaan bimbingan teknis dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti penyesuaian jadwal kegiatan dengan waktu operasional nelayan serta pelaksanaan kegiatan secara langsung di lokasi yang mudah dijangkau oleh peserta.
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi pasca kegiatan, Monitoring secara berkala terhadap peserta yang telah mengikuti bimbingan teknis perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang diberikan telah dipahami dan diterapkan dalam kegiatan operasional di lapangan.
5. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan bimbingan teknis, Peningkatan kompetensi pegawai (narasumber) dalam memberikan materi sosialisasi dan bimbingan teknis perlu terus dilakukan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, pelayanan yang diberikan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;

Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;

Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;

Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;

Loyal, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pelayanan public yang baik kepada masyarakat;

Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;

Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) serta Masyarakat dalam pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat sehingga dapat melakukan evaluasi dari survey yang telah dilaksanakan.



ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

ISR Maritim adalah pelayanan perizinan yang diberikan kepada pemilik kapal laut (ISR Kapal Laut). Kapal laut dalam kegiatan pelayaran menggunakan frekuensi radio baik di band HF maupun VF. Untuk meningkatkan keselamatan kapal laut dalam pelayarannya, maka penggunaan radio dan frekuensi yang tepat merupakan suatu keharusan. Program MOTS merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat untuk mendorong percepatan perizinan ISR Maritim yang wajib dimiliki oleh setiap kapal nelayan demi terwujudnya penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang aman, tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

II. Sasaran Kegiatan

Indikator kinerja Bimbingan Teknis SRC/LRC memiliki target sebesar 100% pada Tahun 2025 ini.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Kinerja ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN memiliki target 100%. Pada Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang telah berhasil membantu nelayan dalam mengasistensi dan memberikan konsultasi terkait pengurusan ISR maritim. Untuk kegiatan MOTS Balmon Padang di fokuskan untuk penerbitan Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN). Dimana di tahun 2025 telah berhasil mendapatkan 72 IKRAN bagi Masyarakat Nelayan yang mempergunakan perangkat radio komunikasi HF dan VHF dari target yang ditentukan yaitu 50 IKRAN. Berdasarkan data pelaksanaan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator MOTS Program IKRAN melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 144%.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Padang melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas II Jambi yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 100%.

Tabel 33.

Benchmark Capaian Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

UPT DJID	Target	Capaian	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	100%	100%	Persentase Capaian Balmon Padang 100% Balmon Jambi 108%
Balmon SFR Kelas II Jambi	100%	108%	

IV. Analisis, Tindak Lanjut serta Efisien

A. Analisa

Program MOTS-IKRAN dapat mencapai target (144%). Kegiatan ini dapat terlaksana melebihi target tentunya karena Balmon Padang rutin untuk mengenalkan kepada nelayan mengenai program MOTS-IKRAN. Para nelayan dapat mengetahui dan memahami tatacara penggunaan frekuensi radio dan pengurusan IKRAN sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para nelayan akan terbantu pada saat mendapat musibah di tengah laut dan terhindar dari sanksi hukum (administrasi maupun pidana penjara) karena melakukan kegiatan komunikasi yang menimbulkan gangguan dan kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan penerbangan dan jiwa manusia, misalnya, yang dipicu penggunaan frekuensi radio, perangkat telekomunikasi secara ilegal dan tidak sesuai peruntukannya. Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dapat menjadi kendala dalam menyelenggarakan sosialisasi dan memberikan dukungan teknis kepada nelayan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi efektivitas program.

B. Tindak Lanjut

Balmon Padang secara aktif memberikan konsultasi dan asistensi kepada nelayan mengenai program MOTS-IKRAN. Di tahun 2025 dan tahun berikutnya Balmon Padang melaksanakan kegiatan Bimtek SRC/LRC dan IKRAN yaitu sebuah inovasi terbaru Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menyediakan solusi komunikasi radio khusus bagi nelayan dimana sejumlah nelayan, nakhoda kapal ikan dan pemilik kapal berhak mendapatkan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN).

IKRAN diberikan bagi peserta yang berhasil lulus dalam Bimbingan Teknis Sertifikat Jarak Jangkau Jauh (SJJJ) atau Long Range Certificate (LRC) dalam upaya mewujudkan Gerakan Nelayan Tertib Frekuensi.

C. Efisiensi

Pemanfaatan Aplikasi perizinan ISR Maritim secara online membantu efisiensi waktu dan tenaga. Nelayan dapat mengakses informasi dan mengajukan permohonan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Balmon Padang.

D. Rekomendasi Kedepannya

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja program MOTS-IKRAN, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang perlu melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kegiatan sosialisasi program MOTS-IKRAN secara berkelanjutan
Sosialisasi mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio serta pentingnya kepemilikan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN) perlu terus ditingkatkan kepada nelayan, nakhoda kapal ikan, serta pemilik kapal agar pemahaman masyarakat pesisir terhadap penggunaan frekuensi radio yang tertib dan sesuai ketentuan semakin meningkat.

2. Penguatan koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait
Kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, pelabuhan perikanan, serta kelompok atau organisasi nelayan perlu terus ditingkatkan guna memperluas jangkauan program MOTS-IKRAN serta meningkatkan partisipasi nelayan dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan pengurusan izin komunikasi radio.

3. Optimalisasi pelaksanaan bimbingan teknis dan pelayanan perizinan
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikat Jarak Jangkauan Jauh (LRC) serta pelayanan perizinan IKRAN perlu terus dioptimalkan agar nelayan dapat memperoleh pemahaman yang memadai mengenai penggunaan perangkat komunikasi radio secara benar dan sesuai ketentuan.

4. Peningkatan pemanfaatan layanan digital dalam proses perizinan
Pemanfaatan aplikasi perizinan ISR Maritim secara daring perlu terus ditingkatkan untuk memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat, khususnya nelayan, sehingga proses perizinan dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan efisien.

5. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran
Untuk mendukung keberlanjutan program MOTS-IKRAN, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan anggaran yang memadai agar kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.

E. analisa dampak kinerja terhadap masyarakat

Capaian kinerja program MOTS-IKRAN yang melebihi target memberikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan.

1. Meningkatkan keselamatan nelayan dalam melakukan aktivitas di laut
Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan perangkat komunikasi radio, nelayan dapat memanfaatkan sistem komunikasi secara optimal untuk menyampaikan informasi darurat atau meminta bantuan ketika menghadapi situasi berbahaya di laut.

2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio

Melalui program sosialisasi dan bimbingan teknis, nelayan menjadi lebih memahami tata cara penggunaan frekuensi radio yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meminimalisasi penggunaan perangkat komunikasi secara ilegal.

3. Mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah maritim
Dengan meningkatnya jumlah nelayan yang memiliki izin komunikasi radio, penggunaan spektrum frekuensi radio di sektor maritim menjadi lebih tertib sehingga potensi gangguan terhadap sistem komunikasi lainnya dapat diminimalisasi.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan frekuensi radio
Pemanfaatan layanan perizinan secara daring memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, sehingga proses pengurusan izin menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

5. Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir
Dengan adanya sistem komunikasi radio yang lebih tertib dan efektif, nelayan dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih aman dan terkoordinasi, sehingga secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, pelayanan yang diberikan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;

Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;

Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;

Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;

Loyal, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pelayanan publik yang baik kepada masyarakat;

Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;

Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) serta Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

IKSK-1.9.

Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Untuk mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi khususnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio maka Balai Monitor SFR Kelas II Padang telah melaksanakan pendistribusian Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Teguran (ST) kepada seluruh klien yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu Balmon SFR Kelas II Padang juga melakukan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio berupa penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan oleh KPKNL Padang dan KPKNL Bukittinggi. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dukung dokumen penghapusan piutang mutlak.

II. Sasaran Kegiatan

Indikator Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio memiliki target sebesar 100%.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio, dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Tabel 34.

Perbandingan Realisasi IK-9 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%

Indikator Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL memiliki target sebesar 100%. Pada perjanjian kinerja tahun 2025 capaian penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL tercapai 100% sesuai target. Penyampaian Tagihan SPP/IB BHP dilaksanakan secara rutin setiap ada tagihan SPP/IB BHP yang terbit dan pendampingan Pelimpahan Piutang telah selesai dilaksanakan secara keseluruhan pada tahun 2025 dalam 1 kali kegiatan dan juga terdapat pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dukung dokumen penghapusan piutang mutlak.

Tabel 35.

Penyampaian SPP/IB BHP, STP & STT Dalam Rangka Pencegahan Piutang (data tahun 2025)

BULAN	Annual	Renewal	Reminder	Total
Januari	7	5	3	15
Februari	6	5	4	15
Maret	3	3	4	10
April	6	4	3	13
Mei	8	1	1	10
Juni	8	2	-	10
Juli	12	2	1	15
Agustus	11	11	1	23
September	20	4	4	28
Oktober	34	3	3	40
November	7	13	7	27
Desember	12	-	14	26
Jumlah	134	53	45	232

Penyampaian SPP/IB BHP, ST dalam rangka pencegahan piutang dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dikoordinasikan kepada wajib bayar untuk dapat segera menyelesaikan kewajiban pelunasan BHP Frekuensi Radio sebelum jatuh tempo pembayaran. Adapun jumlah Surat Tagihan dan Rincian Tagihan yang terbit selama tahun 2025 dan dapat disampaikan berjumlah 232 SPP/IB BHP, STP pelimpahan piutang ke KPKNL terdapat 1 kali pelaksanaan kegiatan pendampingan pelimpahan piutang ke KPKNL Bukittinggi untuk memastikan penyelesaian piutang a.n PT. Triarga Media Televisi yang sebelumnya mengajukan keringanan pembayaran piutang kepada KPKNL Bukittinggi. Dari kegiatan tersebut status piutang telah PSBDT.

Untuk kegiatan penanganan piutang lainnya yaitu kegiatan pengumpulan dokumen data dukung guna penghapusan mutlak terhadap wajib bayar yang telah dinyatakan PSBDT oleh KPKNL.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Padang melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas II Jambi yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 100%.

Tabel 36.
Benchmark Capaian Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

UPT DJID	Target	Capaian	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	100%	100%	Persentase Capaian Balmon Padang dan Balmon Jambi sama-sama 100%
Balmon SFR Kelas II Jambi	100%	100%	

IV. Analisis, Tindak Lanjut serta Efisien

A. Analisa

Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio (100%) melalui strategi sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan Penanganan piutang, Surat Perintah Pembayaran (SPP) BHP, Surat Informasi Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Surat Tagihan keterlambatan pembayaran BHP dan Surat Teguran (ST) disampaikan secara online melalui WhatsApp ke PIC/Penanggung Jawab dari Perusahaan/Lembaga Pemerintah pemegang ISR sehingga Tagihan dapat tersampaikan langsung. Untuk yang tidak melakukan pembayaran sampai dengan teguran bulan ke 3 dilakukan kunjungan langsung ke Perusahaan/Lembaga untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan penyampaian hal – hal yang timbul apabila piutang tidak segera dilunasi.
2. Sedangkan untuk kegiatan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL dapat terlaksana dengan baik dengan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan KPKNL dan rutin melakukan pendataan bersama kepada wajib bayar.

B. Tindak Lanjut

Pada perjanjian kinerja tahun 2025 capaian penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL tercapai 100% sesuai target. Pada 2025 ini hasil yang dicapai juga telah sesuai target yang ditetapkan yaitu 100%,

hal itu tentu karena adanya analisis dan Tindakan yang diambil oleh Balmon Padang, sehingga meningkatkan frekuensi pembayaran piutang SPP BHP. Balmon Padang juga terus memonitor perkembangan Piutang SPP BHP Frekuensi, dan pemanfaatan sistem pembayaran melalui *Host to Host* melalui Kerjasama DJID dengan Bank tertentu, yang mana laporan pencatatan dan pemantauan piutang SPP BHP langsung masuk ke dalam informasi pembayaran Ditjen Infrastruktur Digital.

C. Efisiensi

Melalui pemanfaatan sistem pembayaran melalui *Host to Host (H to H)* melalui Kerjasama Ditjen Infrastruktur Digital dengan Bank tertentu telah meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pemantauan piutang SPP BHP karena laporan langsung masuk ke sistem informasi pembayaran Ditjen Infrastruktur Digital. Selain itu, sistem pembayaran ini memudahkan bagi klien untuk melakukan efisiensi sumber daya manusia karena pembayaran telah dilakukan secara *online*.

D. Rekomendasi kedepannya

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada indikator Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang perlu melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Optimalisasi penagihan piutang secara digital, Pemanfaatan sistem informasi pembayaran dan mekanisme pembayaran secara *Host to Host (H2H)* perlu terus dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas monitoring serta mempercepat proses pembayaran kewajiban BHP Frekuensi Radio oleh para pemegang Izin Stasiun Radio (ISR).
2. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan wajib bayar, Komunikasi secara aktif dengan penanggung jawab perusahaan atau lembaga pemegang ISR perlu terus ditingkatkan melalui berbagai media komunikasi guna memastikan informasi terkait kewajiban pembayaran dapat diterima secara tepat waktu.
3. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait, Koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), perlu terus diperkuat guna mendukung kelancaran proses penanganan piutang serta pelimpahan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi piutang, Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan piutang BHP Frekuensi Radio perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kendala pembayaran serta menentukan langkah penanganan yang tepat.
5. Peningkatan pemahaman pemegang izin terhadap kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio, Sosialisasi kepada pemegang izin stasiun radio mengenai kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio serta konsekuensi yang timbul apabila terjadi keterlambatan pembayaran perlu terus dilakukan guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib bayar.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;

Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;

Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;

Loyal, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan Instansi;

Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;

Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) serta Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.



IKSK-1.10.

Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta mendorong transparansi dan akuntabilitas layanan, diperlukan upaya yang sistematis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi pengawasan serta pengendalian spektrum frekuensi radio.

Sosialisasi pelayanan publik menjadi sarana strategis bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang untuk menyampaikan informasi mengenai prosedur layanan, standar pelayanan, hak dan kewajiban pengguna layanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan spektrum frekuensi radio secara legal dan sesuai peruntukannya, sekaligus membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman publik, memperkuat kepercayaan terhadap pelayanan pemerintah, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan, dan berintegritas.

II. Sasaran Kegiatan

Indikator Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik memiliki target sebesar 100%.

III. Capaian Target

Pada Tahun 2025, Balmon Padang menargetkan kegiatan sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing kegiatan menargetkan 30 (tiga puluh) orang peserta. Pada realisasinya peserta yang hadir jauh melebihi target yang ditetapkan, dimana terdapat total 115 orang peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi pelayanan publik.

Tabel 37.

Rincian Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2025

Tanggal Sosialisasi	Lokasi Pelaksanaan	Tema	Keterangan
2 Okt 2025	Kota Bukittinggi	Sosialisasi Peraturan Penggunaan Spektrum Frekuensi radio	Hadir 64 (enam puluh empat) peserta
6 Nov 2025	Kota Padang	Balmon Goes to Campus	Hadir 51 (lima puluh satu) peserta

Berdasarkan capaian kedua sub indikator Sosialisasi Pelayanan Publik, realisasi indikator Kinerja terkait Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 38.
Perbandingan Realisasi IK-10 Sosialisasi Pelayanan Publik

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	80%	100%	125%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Padang melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas II Jambi yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 100%.

Tabel 39.
Benchmark Capaian Sosialisasi Pelayanan Publik

UPT DJID	Target	Capaian	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	100%	100%	Persentase Capaian Balmon Padang dan Balmon Jambi sama-sama 100%
Balmon SFR Kelas II Jambi	100%	100%	

IV. Analisis, Tindak Lanjut serta Efisien

A. Analisa

Pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan melampaui target jumlah peserta yang telah ditetapkan. Dari target 2 (dua) kegiatan dengan total 30 peserta, pada realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan tercatat jumlah peserta melebihi target, yaitu 64 peserta di Kota Bukittinggi dan 51 peserta di Kota Padang, dengan kehadiran pada kegiatan sebanyak 115 peserta. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi pelayanan publik di bidang pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi koordinasi, penyampaian informasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio secara legal dan sesuai peruntukannya.

B. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas capaian tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang akan terus memperluas jangkauan sosialisasi dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah daerah, komunitas pengguna radio, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan. Selain itu, materi sosialisasi akan terus diperbarui agar selaras dengan kebijakan dan regulasi terbaru, serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Balmon juga akan meningkatkan metode penyampaian melalui pendekatan interaktif dan pemanfaatan media digital guna menjangkau audiens yang lebih luas.

C. Efisiensi

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya internal sebagai narasumber dan moderator, sehingga mengurangi kebutuhan anggaran untuk honorarium eksternal. Selain itu, kegiatan sosialisasi dirangkaikan dengan agenda koordinasi teknis atau kunjungan kerja di daerah, sehingga mengoptimalkan penggunaan anggaran perjalanan dinas. Dengan pendekatan tersebut, target kinerja dapat tercapai secara efektif tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.

D. Rekomendasi kedepannya

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada kegiatan sosialisasi pelayanan publik di bidang pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang perlu melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Perluasan jangkauan kegiatan sosialisasi
Kegiatan sosialisasi pelayanan publik perlu terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, komunitas pengguna radio, pelaku usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat umum yang memanfaatkan perangkat komunikasi radio.
2. Penguatan metode penyampaian informasi
Metode penyampaian materi sosialisasi perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif, serta memanfaatkan berbagai media komunikasi digital guna meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta.
3. Pembaruan materi sosialisasi secara berkala
Materi sosialisasi perlu terus diperbarui agar selaras dengan perkembangan regulasi, kebijakan, serta teknologi di bidang spektrum frekuensi radio sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap relevan dan aktual.
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait
Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait perlu terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang lebih efektif serta menjangkau masyarakat yang lebih luas.
5. Penguatan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut
Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat pemahaman peserta serta mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat guna meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi di masa mendatang.

E. Analisa dampak kinerja terhadap masyarakat

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik yang melebihi target memberikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio.

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi spektrum frekuensi radio, Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio serta ketentuan perizinan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisasi penggunaan perangkat komunikasi secara tidak sah.
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan frekuensi radio, Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan perangkat komunikasi radio secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio secara tertib sehingga potensi gangguan frekuensi dapat diminimalisasi.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio, Kegiatan sosialisasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi serta menyampaikan pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi terkait layanan spektrum frekuensi radio, sehingga dapat meningkatkan kualitas

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan mengedepankan kebutuhan informasi masyarakat terkait prosedur, standar, serta ketentuan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sehingga peserta memperoleh pemahaman yang jelas dan aplikatif.

Akuntabel, Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan, target kinerja, serta ketentuan peraturan yang berlaku, disertai dokumentasi dan pelaporan yang transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Kompeten, Materi sosialisasi disampaikan oleh pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, serta terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pembaruan regulasi.

Harmonis, Kegiatan dilaksanakan dengan membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang sinergis antara penyelenggara layanan dan peserta, sehingga tercipta suasana dialog yang kondusif dan saling menghargai.

Loyal, Seluruh tim pelaksana menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi serta menjaga nama baik institusi dalam setiap kegiatan pelayanan publik.

Adaptif, Pelaksanaan sosialisasi menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan peserta, perkembangan regulasi, serta pemanfaatan media presentasi dan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas penyampaian materi.

Kolaboratif, Kegiatan sosialisasi melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, komunitas pengguna frekuensi radio, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio.



IKSK.1.11

Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak Masyarakat akan pelayanan publik maka diperlukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan tuntutan Masyarakat dalam hal pelayanan, maka Balmon Padang dituntut untuk memenuhi harapan Masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei pelayanan publik atau survei kepuasan Masyarakat, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No.14 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Selain pelaksanaan Survei Pelayanan Publik, Balmon Padang juga melaksanakan Sosialisasi Pelayanan Publik. Sosialisasi Pelayanan Publik merupakan wadah untuk memberikan informasi kepada Masyarakat terkait peraturan dan proses perizinan pengguna Spektrum Frekuensi Radio, meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang pentingnya penggunaan Spektrum Frekuensi Radio legal dan sesuai peruntukannya, serta menciptakan pengguna SFR yang legal dan tidak saling mengganggu.

II. Sasaran Kegiatan

Indikator Persentase (%) Survei Kepuasan Pelayanan Publik memiliki target sebesar 100%.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada bagandibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

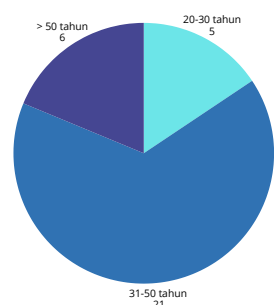
Target		100%
Capaian		119,38%
Persentase		119,38%

Pada Tahun 2025, Balmon Padang melaksanakan Survei Kepuasan Pelayanan Publik pada bulan Juni - Agustus Tahun 2025 menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Publik. Survei dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan jumlah responden yang mengikuti sebanyak 32 responden dengan rincian seperti dalam tabel dan bagan berikut ini:

Tabel 40.
Hasil Survey Pelayanan Publik – Balmon SFR Kelas II Padang

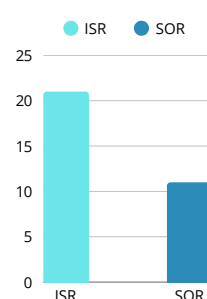
IKM	3,82	IKM	Biaya Tarif	3,81
			Kompetensi Pelaksana	3,94
			Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,84
			Perilaku Pelaksana	3,84
			Persyaratan	3,84
			Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	3,81
			Sarana dan Prasarana	3,75
			Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,72
			Waktu Penyelesaian	3,81

Bagan 10.
Kategori Usia



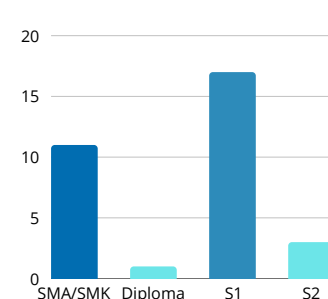
Kategori Usia

Bagan 11.
Jenis Layanan tahun 2025



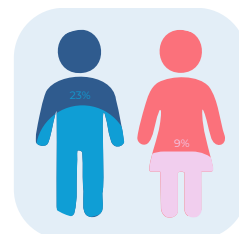
Jenis Layanan

Bagan 12.
Pendidikan Terakhir tahun 2025



Pendidikan Terakhir

Bagan 13.
Kategori Usia



Kategori Usia

Secara umum pada tahun 2025 ini, layanan publik yang diberikan oleh Balmon Padang sudah dinilai sangat Memuaskan dan kecil kemungkinan terjadi praktik korupsi. Seluruh hasil pengukuran unsur/ parameter dari tiap indeks, mulai dari unsur dengan nilai indeks terendah hingga unsur dengan nilai indeks tertinggi berada dalam kategori sangat baik. Balmon Padang perlu mempertahankan kinerja dan terus meningkatkan performa pada tahun berikutnya.

Tabel 41.
Benchmark Capaian Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

UPT DJID	Target	Capaian	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	100%	119,38%	Persentase Capaian Balmon Padang 119,38%
Balmon SFR Kelas II Jambi	100%	117,81%	Persentase Capaian Balmon Jambi 117,81%

IV. Analisis, Tindak Lanjut serta Efisien

A. Analisa

Balai Monitor SFR Kelas II Padang berupaya untuk lebih berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, dengan memperlakukan masyarakat pencari layanan sebagai pelanggan. Dengan demikian, apa yang menjadi kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat akan selalu diperhatikan. Terkait hal itu, masyarakat juga dilibatkan dalam proses evaluasi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Padang. Dengan demikian harapan dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dalam proses pelayanan, sehingga terhadap unsur-unsur atau aspek yang masih dianggap kurang dapat dilakukan pembenahan. Tidak hanya itu, namun Balai Monitor SFR Kelas II Padang juga Meningkatkan koordinasi dengan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Instansi terkait dalam pemberian layanan perizinan dimana dapat memberikan pemahaman dalam hal pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan perangkat komunikasi radio yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

B. Tindak Lanjut

Pada tahun 2025 kegiatan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan target indeks 3,6 dengan realisasi yang berhasil didapatkan dari pelaksanaan survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) tahun 2025 sebesar 3,82. Tindak lanjut yang akan dilakukan dengan tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat penggunaan frekuensi radio.

C. Efisiensi

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Survei Kepuasan Pelayanan Publik ini dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara dengan memanfaatkan sumber daya internal Balai Monitor SFR Kelas II Padang dan melakukan survey secara mandiri langsung memberikan kusioner kepada masyarakat yang telah mendapatkan layanan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio baik secara daring maupun luring dari petugas layanan Balmon Padang, sehingga tidak diperlukan biaya dalam pelaksanaannya, selain itu efisiensi dengan cara merangkaikan kegiatan survei pada pelaksanaan kegiatan yang melibatkan penerima layanan sehingga tidak memerlukan waktu tersendiri.

Selain itu, proses pengolahan dan analisis data dilakukan oleh pegawai internal yang memiliki kompetensi terkait, sehingga dapat menghemat anggaran serta meningkatkan kapasitas internal organisasi dalam pengelolaan evaluasi pelayanan publik. Pendekatan ini tetap menjaga objektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan survei tanpa mengurangi kualitas hasil evaluasi.

D. Rekomendasi kedepannya

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada indikator Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang perlu melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan

Balai Monitor SFR Kelas II Padang perlu terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio dengan memperhatikan hasil evaluasi yang diperoleh dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

2. Optimalisasi pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan layanan

Hasil survei kepuasan pelayanan publik perlu dianalisis secara lebih mendalam untuk mengidentifikasi aspek layanan yang masih perlu ditingkatkan, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan langkah perbaikan pelayanan di masa mendatang.

3. Penguatan sistem pelayanan berbasis digital

Pengembangan dan pemanfaatan layanan berbasis digital perlu terus ditingkatkan guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio secara cepat, transparan, dan efisien.

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan publik

Peningkatan kompetensi pegawai yang bertugas dalam pelayanan publik perlu terus dilakukan melalui pelatihan maupun pembinaan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat semakin profesional dan responsif.

5. Perluasan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap pelayanan publik perlu terus ditingkatkan agar proses evaluasi pelayanan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat secara nyata.

E. Analisa dampak kinerja terhadap masyarakat

Capaian indeks kepuasan pelayanan publik yang melebihi target menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan, sehingga instansi dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintah

Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi pelayanan publik menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah

Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam pengelolaan dan pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio.

4. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib

Pelayanan yang informatif dan responsif dapat membantu masyarakat memahami ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga dapat mendorong penggunaan perangkat komunikasi radio secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada masyarakat

Dengan adanya evaluasi pelayanan secara berkala, instansi dapat terus menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, pelayanan yang diberikan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;

Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;

Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;

Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;

Loyal, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pelayanan publik yang baik kepada masyarakat;

Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;

Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) serta Masyarakat dalam pelaksanaan survey kepuasan pelayanan publik sehingga dapat melakukan evaluasi dari survey yang telah dilaksanakan.

IKSK.1.12.

Persentase (%) Persentase Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan mekanisme evaluasi yang tidak hanya mengukur tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga menilai persepsi publik terhadap integritas penyelenggara layanan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Padang dituntut untuk memastikan bahwa setiap proses pelayanan dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur.

Sebagai salah satu instrumen penguatan tata kelola tersebut, Balmon Padang melaksanakan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK). Survei ini bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap aspek transparansi layanan, implementasi kebijakan anti-gratifikasi, keadilan pelayanan, profesionalisme petugas, kepatuhan terhadap prosedur, serta potensi risiko korupsi dalam proses pelayanan. Pelaksanaan Survei Integritas ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara layanan untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain itu, upaya ini juga selaras dengan kebijakan penguatan sistem pengawasan internal dan pencegahan korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Selain pelaksanaan survei integritas, Balmon Padang juga melaksanakan kegiatan sosialisasi pelayanan publik sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat terkait ketentuan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, mekanisme perizinan, serta kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam proses pelayanan.

Dengan demikian, pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik tidak hanya menjadi alat ukur persepsi masyarakat, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam memperkuat budaya integritas, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa pelayanan di Balai Monitor SFR Kelas II Padang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

II. Sasaran Kegiatan

Indikator Persentase (%) Survei Kepuasan Pelayanan Publik memiliki target sebesar 100%.

III. Capaian Target

Indikator Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik memiliki capaian sebesar 103,61%.

Pada Tahun 2025, Balmon Padang melaksanakan Survei Integritas Pelayanan Publik pada bulan Juni - Agustus Tahun 2025 menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Publik dengan jumlah responden yang mengikuti sebanyak 32 responden dengan rincian seperti dalam tabel dan bagan berikut ini:



Tabel 42.
Hasil Survey Pelayanan Publik – Balmon SFR Kelas II Padang

IIPP	3,73	IIPP	Diskriminasi Pelayanan	3,69
			Pelayanan di Luar Prosedur	3,73
			Penerimaan Imbalan	3,81
			Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3,69
			Pungutan Liar (Pungli)	3,71

Tabel 43.
Benchmark Capaian Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

UPT DJID	Target	Realisasi	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	100%	103,61%	Persentase Capaian Balmon Padang 103,61%
Balmon SFR Kelas II Jambi	100%	107,78%	Persentase Capaian Balmon Jambi 107,78%

IV. Analisis, Tindak Lanjut serta Efisien

A. Analisa

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Padang berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berintegritas, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik dilakukan sebagai instrumen untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap transparansi layanan, profesionalisme petugas, kepatuhan terhadap prosedur, serta potensi risiko korupsi dalam proses pelayanan.

Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai penyelenggaraan pelayanan di Balai Monitor SFR Kelas II Padang telah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, evaluasi terhadap hasil survey tetap menjadi perhatian untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan benar-benar terbebas dari praktik gratifikasi, diskriminasi, maupun penyimpangan prosedur.

Selain itu, Balai Monitor SFR Kelas II Padang terus meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengguna Spektrum Frekuensi Radio guna memperkuat pemahaman terkait hak dan kewajiban dalam proses perizinan, pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio, serta mekanisme pelayanan yang sesuai regulasi. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir potensi risiko penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

B. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil Survei Integritas Pelayanan Publik Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Padang melakukan beberapa langkah perbaikan dan penguatan, antara lain:

1. Meningkatkan transparansi informasi pelayanan melalui publikasi standar pelayanan, prosedur, dan tarif secara terbuka pada media informasi dan ruang pelayanan.
2. Memperkuat implementasi kebijakan anti-gratifikasi dengan sosialisasi internal kepada seluruh pegawai serta penyampaian himbauan kepada masyarakat pengguna layanan.
3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten.
4. Mendorong budaya kerja berintegritas melalui internalisasi nilai BerAKHLAK dan penguatan komitmen Zona Integritas.
5. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga memenuhi prinsip integritas dan akuntabilitas.

C. Efisiensi

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik ini dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara dengan memanfaatkan sumber daya internal Balai Monitor SFR Kelas II Padang dan melakukan survei secara mandiri langsung memberikan kuesioner kepada masyarakat yang telah mendapatkan layanan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio baik secara daring maupun luring dari petugas layanan Balmon Padang, elain itu, proses pengolahan dan analisis data dilakukan oleh pegawai internal yang memiliki kompetensi terkait,

sehingga dapat menghemat anggaran serta meningkatkan kapasitas internal organisasi dalam pengelolaan evaluasi pelayanan publik. Pendekatan ini tetap menjaga objektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan survei tanpa mengurangi kualitas hasil evaluasi.

D. Rekomendasi kedepannya

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada indikator Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang perlu melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan budaya kerja berintegritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Balai Monitor SFR Kelas II Padang perlu terus memperkuat penerapan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui internalisasi nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK, serta penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
2. Peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi pelayanan, Informasi mengenai standar pelayanan, prosedur, serta tarif layanan perlu terus disampaikan secara terbuka melalui berbagai media informasi, baik di ruang pelayanan maupun melalui platform digital, guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan mudah diakses.
3. Optimalisasi pengawasan internal dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Pengawasan internal terhadap proses pelayanan publik perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta bebas dari praktik penyimpangan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik, Keterlibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap pelayanan publik perlu terus didorong melalui pelaksanaan survei integritas secara berkala, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan publik, Peningkatan kapasitas pegawai yang terlibat dalam pelayanan publik perlu terus dilakukan melalui pelatihan maupun pembinaan guna memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

E. Analisa dampak kinerja terhadap masyarakat

Capaian kinerja pada indikator Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik memberikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang.

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, Pelaksanaan survei integritas pelayanan publik yang menunjukkan hasil positif mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

1. Mendorong terciptanya pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, Evaluasi terhadap tingkat integritas pelayanan publik dapat membantu memastikan bahwa proses pelayanan dilaksanakan tanpa adanya praktik gratifikasi, diskriminasi, maupun penyimpangan prosedur.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan, Pelaksanaan survei integritas memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan penilaian terhadap pelayanan yang diterima, sehingga instansi dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna spektrum frekuensi radio, Hasil evaluasi dari survei integritas dapat menjadi dasar bagi instansi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih profesional dan responsif.
5. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Peningkatan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

V. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Survei integritas dilaksanakan untuk memastikan pelayanan berlangsung transparan, adil, dan bebas penyimpangan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;

Kompeten, Didukung oleh tim yang memahami prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan terus meningkatkan kapasitas di bidang integritas dan pengawasan.

Harmonis, Menjaga hubungan kerja yang profesional dan saling menghormati dalam pelaksanaan pelayanan dan evaluasi integritas.

Loyal, Mendukung penuh pembangunan Zona Integritas dan menjaga nama baik institusi melalui pelayanan yang bersih.

Adaptif, Mampu menyesuaikan metode pelaksanaan survei dengan perkembangan teknologi dan dinamika organisasi.

Kolaboratif, Melibatkan masyarakat serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam evaluasi dan penguatan budaya integritas.

IKSK-1.13.

Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (Prima Aksi)

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Penggunaan spektrum frekuensi radio pada layanan *Microwave Link* memegang peranan penting dalam mendukung jaringan telekomunikasi nasional. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) yang sesuai dengan parameter teknis dan kondisi eksisting di lapangan, termasuk kesesuaian lokasi site, koordinat, ketinggian antena, serta konfigurasi teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan *site Microwave Link* yang tidak sesuai antara data ISR dengan kondisi aktual di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio serta menghambat tertib penggunaan spektrum. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan verifikasi lapangan dan tindak lanjut secara sistematis terhadap *site ISR Microwave Link* yang tidak sesuai melalui mekanisme Prima Aksi.

Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) dilaksanakan sebagai upaya pengendalian dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta untuk memastikan kepatuhan pengguna terhadap ketentuan perizinan dan parameter teknis yang telah ditetapkan.

II. Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2025, target Perjanjian Kinerja indikator ini adalah tercapainya 100% site ISR Microwave Link yang tidak sesuai berdasarkan hasil verifikasi data dan/atau hasil pengukuran lapangan.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja tindak lanjut verifikasi site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (Prima Aksi) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Target	100%
Capaian	100%
Persentase	100%

Tabel 44.
Capaian target IK-13 Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR MW Link yang tidak sesuai (Prima Aksi)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%

Tabel 45.

Capaian tindak lanjut evaluasi verifikasi koordinat site

Target (ISR yang Tidak Sesuai)	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Capaian
307 ISR (115 Site)	136 ISR (71 Site)	163 ISR (64 Site)	44,30 % (ISR)

* Target dapat disesuaikan berdasarkan hasil temuan UPT terkini.

** Capaian dihitung akumulatif hingga akhir tahun dan dievaluasi per triwulan

Tabel 46.

Rekapitulasi Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link (Prima Aksi) Tahun 2025

Nama Pemegang ISR	Hasil Verifikasi Tidak Sesuai ISR (Target)		Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site Tidak Sesuai ISR					Capaian (% ISR)	Keterangan
			Sudah Ditindaklanjuti			Belum Ditindaklanjuti (Belum Sesuai)			
			(Sesuai)		Penghentian izin				
	ISR	Site	ISR	Site		ISR	Site		
PT. INDOSAT	40	20	10	7	6	24	13	25%	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	195	69	3	3	66	121	45	15%	3 ISR Habis masa laku 2 dalam modifikasi ISR
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT.	3	1	3	1		0	0	100%	
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT.	43	25	8	4	18	13	6	18,60%	1 Dalam modifikasi ISR 2 Data Sumatera Utara
XLSMART TELECOM	27	13	20	9	2	5	4	74%	
Jumlah	308	128	44	24	92	163	68	44,30%	

Tabel 47.

Benchmark Capaian Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (Prima Aksi)

UPT DJID	Target	Capaian	Keterangan
Balmon SFR Kelas II Padang	100%	100%	Persentase Capaian Balmon Padang 100%
Balmon SFR Kelas II Jambi	100%	100%	Persentase Capaian Balmon Jambi 100%

Berdasarkan tabel diatas Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Kelas II Padang dan Balmon SFR Kelas II Jambi menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Kedua unit pelaksana teknis tersebut memiliki target tindak lanjut verifikasi sebesar 100%, dan dalam pelaksanaannya masing-masing berhasil merealisasikan capaian yang sama yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh temuan atau hasil verifikasi terkait site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai telah ditindaklanjuti secara penuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IV. Analisa Pencapaian Target

A. Analisa

Analisa pencapaian target menunjukkan bahwa pada tahun 2025 telah ditetapkan sasaran 100% tindak lanjut terhadap site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai berdasarkan hasil verifikasi. Realisasi capaian kinerja berhasil mencapai 100% sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Dari total 307 ISR (115 site) yang menjadi target verifikasi, sebanyak 136 ISR (71 site) telah ditindaklanjuti melalui berbagai langkah perbaikan. Tindak lanjut tersebut dilakukan dalam bentuk penyesuaian data ISR, proses modifikasi izin, hingga penghentian izin apabila ditemukan ketidaksesuaian yang tidak dapat diperbaiki. Kegiatan verifikasi dilaksanakan secara bertahap dan hasilnya dilaporkan secara berkala setiap triwulan kepada pusat. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam menertibkan ketidaksesuaian data ISR dengan kondisi aktual di lapangan guna mencegah potensi gangguan spektrum frekuensi radio.

B. Analisa dampak kinerja terhadap masyarakat

Kegiatan tindak lanjut verifikasi site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai memberikan dampak penting bagi masyarakat dalam menjaga ketertiban penggunaan jaringan telekomunikasi. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap lokasi perangkat *microwave link* dan memastikan kesesuaiannya dengan data perizinan, dapat dipastikan bahwa jaringan komunikasi yang digunakan oleh operator berjalan sesuai aturan. Hal ini membantu mencegah potensi gangguan frekuensi yang dapat memengaruhi kualitas layanan komunikasi yang diterima masyarakat.

Selain itu, verifikasi dan penertiban site yang tidak sesuai juga mendorong para penyelenggara jaringan untuk lebih tertib dalam pengelolaan infrastrukturnya. Ketika setiap perangkat yang digunakan sudah terdata dan sesuai dengan izin yang dimiliki, pengelolaan spektrum frekuensi menjadi lebih teratur. Dampaknya, layanan seperti jaringan internet, komunikasi data, dan layanan digital lainnya dapat berjalan lebih stabil dan andal bagi masyarakat.

C. Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja

1. Data hasil verifikasi digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pemegang ISR *Microwave Link*.
2. Hasil verifikasi menjadi dasar untuk meminta operator melakukan penyesuaian data koordinat, ketinggian antena, dan parameter teknis lainnya.
3. Laporan digunakan sebagai bahan pemantauan progres penyelesaian site yang belum sesuai.
4. Data yang terkumpul menjadi dasar perencanaan kegiatan verifikasi berikutnya agar lebih fokus pada operator atau wilayah dengan tingkat ketidaksesuaian tinggi.
5. Dokumentasi tindak lanjut menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dan pusat.

D. Rekomendasi

1. Meningkatkan intensitas verifikasi lapangan pada site yang berpotensi tidak sesuai dengan data ISR.
2. Memperkuat koordinasi dengan operator agar proses modifikasi atau penyesuaian ISR dapat dilakukan lebih cepat.
3. Mengoptimalkan sistem digital untuk pemantauan data koordinat dan parameter teknis site secara berkala.
4. Memberikan pembinaan kepada pemegang ISR agar lebih teliti dalam pengajuan dan pemeliharaan data izin.
5. Meningkatkan kapasitas teknis petugas dalam verifikasi *Microwave Link* sesuai perkembangan teknologi jaringan.

IV. Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Petugas melaksanakan verifikasi dan tindak lanjut dengan mengutamakan kepentingan layanan telekomunikasi bagi masyarakat. Pengguna layanan *Microwave Link* diberikan penjelasan dan pendampingan agar segera menyesuaikan data ISR dengan kondisi aktual di lapangan sehingga kualitas layanan tetap terjaga.

Akuntabel, Seluruh hasil verifikasi dan tindak lanjut dicatat dan dilaporkan secara tertib, baik yang telah ditindaklanjuti maupun yang belum sesuai. Pelaporan dilakukan secara berkala (triwulanan) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan dan pusat.

Kompeten, Petugas memiliki kemampuan teknis dalam melakukan verifikasi koordinat site, ketinggian antena, serta parameter teknis *Microwave Link*. Kompetensi ini memastikan penilaian kesesuaian ISR dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan.

Harmonis, Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan kerja sama tim yang baik serta komunikasi yang sopan dengan operator pemegang ISR. Pendekatan yang baik membantu proses penyesuaian data ISR berjalan lebih lancar.

Loyal, Pegawai melaksanakan tugas verifikasi dan tindak lanjut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan penguatan tata kelola infrastruktur digital nasional.

Adaptif, Petugas menyesuaikan metode kerja dengan kondisi lapangan, keterbatasan akses lokasi site, serta perkembangan teknologi jaringan *Microwave Link*. Penyesuaian dilakukan agar kegiatan verifikasi tetap efektif.

Kolaboratif, Kegiatan Prima Aksi dilaksanakan melalui kerja sama tim internal Balmon serta koordinasi dengan operator seluler/pemegang ISR dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini mempercepat proses penyesuaian data ISR dan penyelesaian temuan ketidaksesuaian.

SASARAN II

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

IKSK-2.1.

Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025

A. Analisa Pencapaian Target

Nilai kinerja anggaran Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang adalah jumlah antara Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berikut adalah formulasi perhitungan nilai kinerja anggaran Balai/Loka Tahun 2025:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} + \text{NK Pelaksanaan } ((\text{Baru} + \text{Lama})/2) \times 50\%$$

Capaian kinerja dimaksud dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Target		86,95%
Realisasi		84,39%
Persentase		97,06%

Nilai Kinerja Perencanaan DIPA Baru : 75
Nilai Kinerja Pelaksanaan DIPA Baru : 90,10
Nilai Kinerja Pelaksanaan DIPA Lama : 97,44

$$\begin{aligned} \text{NKA} &= (75 \times 50\%) + \left[\frac{90,10 \times 97,44}{2} \right] \times 50\% \\ \text{NKA} &= 37,5 + 46,89 \\ \text{NKA} &= 84,39 \end{aligned}$$

a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 sebagai indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga kementerian/lembaga. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Indikator ini diukur melalui aplikasi Monev Kemenkeu, mencakup dimensi efektivitas dan efisiensi.

1)Efektivitas memiliki bobot sebesar 75% yang diukur melalui capaian Realisasi Output (RO) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Penilaian ini untuk menegaskan kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan kerja dalam memastikan output benar-benar tercapai sesuai rencana;

2)Efisiensi memiliki bobot sebesar 25% yang diukur melalui perbandingan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK). Melalui pendekatan ini, satuan kerja didorong untuk mengelola anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Dalam aplikasi Monev Kemenkeu hanya output yang telah terhubung dengan SBK yang diperhitungkan dalam penilaian efisiensi.

Pada tahun 2025 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang mendapatkan nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 75,00 dengan efektivitas (capaian RO) dinilai 100,00 dan Efisiensi (Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK) dinilai 0,00.

Tabel 48.
capaian RO

Rincian Output	Pagu	Blokir	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres
GL.7437.BAH.078	2.073.183.000	332.847.000	1.737.371.948	1	1	100
GL.7437.BAH.U00	22.300.000	7.950.000	14.350.000	6	6	100
GL.7437.BAH.U01	244.798.000	12.870.000	231.870.800	19	19	100
GL.7437.BAH.U03	38.800.000	800.000	38.000.000	2	2	100
GL.7437.BAH.U04	7.734.000	4.185.000	3.500.000	1	1	100
GL.7437.BAH.U05	68.440.000	13.730.000	54.630.000	2	2	100
GL.7437.CAN.101	503.000.000	151.000.000	351.918.800	5	5	100
GL.7437.CCL.101	81.015.000	11.500.000	68.428.611	1	1	100
WA.7427.EBA.960	2.000.000	0	1.954.000	1	1	100
WA.7427.EBA.994	4.023.256.000	533.578.000	3.462.987.937	2	2	100
WA.7427.EBB.951	25.000.000	0	24.959.999	7	7	100

Untuk dimensi efisiensi mendapatkan nilai 0,00 disebabkan tidak ada output yang terhubung dengan SBK. Pada tahun 2025 terdapat restrukturisasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Restrukturisasi ini menyebabkan perubahan nomenklatur Ditjen SDPPI menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID). SBKK yang dilaksanakan DJID pada tahun 2025, masih ter-tagging pada SOTK Ditjen SDPPI (kode unit kerja:059.03) sesuai dengan PMK SBK No.92 tahun 2024. SBKK pada unit Ditjen SDPPI tidak dapat diberlakukan sebagai SBKK pada unit DJID mengingat adanya perbedaan kodifikasi pada masing-masing SBKK.

b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah alat ukur yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan value for money belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L

Tabel 49.
Indikator Penilaian IKPA

Kualitas Perencanaan Anggaran [25%]	Kualitas Pelaksanaan Anggaran [50%]	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran [25%]
Revisi DIPA [10%]	Penyerapan Anggaran [20%]	Capaian output [25%]
Deviasi Halaman III DIPA [15%]	Belanja Kontraktual [10%]	
	Penyelesaian Tagihan [10%]	
	Pengelola UP dan Tup [10%]	
	Dispensasi SPM [Menjadi Pengurangan Nilai IKPA]	

Penilaian IKPA Tahun 2024 meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu:

1) Kualitas Perencanaan Anggaran

Aspek ini terdiri dari 2 indikator yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.

a) Revisi DIPA, Indikator kinerja revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan Satker dalam satu triwulan. Revisi DIPA tersebut merupakan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Revisi DIPA dalam rangka penghematan atau refocusing anggaran yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dari perhitungan indikator kinerja revisi DIPA.

Selama tahun 2025 Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang telah melakukan sebanyak 9 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini disebabkan oleh adanya pemblokiran anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Pada tahun 2025 juga terjadi perubahan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029, sehingga Ditjen SDPPI berubah nomenklatur menjadi Ditjen Infrastruktur Digital. Hal ini juga berdampak ke Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang harus melakukan likuidasi dari satuan kerja lama ke satuan kerja yang baru.

Likuidasi tersebut menyebabkan DIPA Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang Deviasi Halaman III DIPA terbagi menjadi 2, DIPA Lama dan DIPA Baru. Adapun revisi DIPA yang dilakukan selama 2025 adalah sebagai berikut:

● DIPA Lama

□ DIPA Awal tanggal 2 Desember 2024 dengan pagu Rp11.966.248.000. Pada DIPA awal ini telah terdapat pagu pada akun perjalanan dinas yang diblokir sebesar Rp1.616.506.000 sesuai dengan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024;

□ Revisi DIPA I tanggal 22 Februari 2025 dengan pagu Rp11.910.248.000. Revisi ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Revisi yang dilakukan berupa pemblokiran anggaran sesuai Surat Menkeu S-37/ MK.02/2025 sebesar Rp1.333.810.000 sehingga total anggaran yang diblokir menjadi Rp2.950.316.000. Selain revisi dalam rangka efisiensi, revisi DIPA I juga terdapat pergeseran anggaran belanja modal Layanan Sarana Internal ke DIPA Kantor Pusat sebesar Rp56.000.000 untuk memenuhi kebutuhan perubahan struktur organisasi dan perubahan tugas dan fungsi yang belum memiliki alokasi anggaran;

□ Revisi DIPA II tanggal 15 April 2025 dengan pagu Rp11.910.248.000. Revisi ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dan perbaikan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA;

□ Revisi DIPA III tanggal 19 Mei 2025 dengan pagu Rp11.910.248.000. Revisi ini dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional;

□ Revisi DIPA IV tanggal 8 Juli 2025 dengan pagu Rp3.719.628.000. Revisi ini dilakukan dalam rangka cut off DIPA karena terdapat likuidasi dan perubahan kode satker dimana pagu anggaran disesuaikan dengan anggaran yang telah terealisasi sedangkan sisa pagu yang ada dipindahkan ke pagu DIPA Baru.

● DIPA Baru

□ DIPA Awal tanggal 8 Juli 2025 dengan pagu Rp8.190.620.000. Pagu ini merupakan sisa pagu dari DIPA Lama yang dipindah ke DIPA Baru karena terjadi likuidasi. Dari pagu tersebut terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp2.950.316.000;

□ Revisi DIPA I tanggal 2 September 2025 dengan pagu Rp8.190.620.000. Revisi ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data POK;

□ Revisi DIPA II tanggal 1 Oktober 2025 dengan pagu Rp8.190.620.000. Revisi ini dilakukan dalam rangka Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional dan penyesuaian dan perbaikan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA;

□ Revisi DIPA III tanggal 28 Oktober 2025 dengan pagu Rp8.703.032.000. Revisi ini dilakukan dalam rangka penambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp512.412.000;

□ Revisi DIPA IV tanggal 20 November 2025 dengan pagu Rp7.089.526.000. Revisi ini dilakukan dalam rangka relaksasi dimana terdapat pembukaan pagu blokir sebesar Rp1.881.856.000 sehingga pagu blokir menjadi Rp1.068.460.000. Dari pagu blokir yang dibuka tersebut sebesar Rp268.350.000 dimanfaatkan untuk belanja barang dan belanja modal di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang, sedangkan sisanya sebesar Rp1.613.506.000 direlokasi ke DIPA Satker Pusat.

□ Revisi DIPA V tanggal 12 Desember 2025 dengan pagu Rp7.089.526.000. Revisi ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran KPA.

b) Deviasi Halaman III DIPA

Indikator kinerja deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bulanan pada setiap jenis belanja. RPD bulanan yang dimaksud merupakan Rencana Penarikan Dana yang tercantum pada Halaman III DIPA pada setiap awal triwulan. Satker dapat melakukan pemutakhiran RPD bulanan paling lambat pada hari kesepuluh awal triwulan.

Tabel 50.

Deviasi Halaman III DIPA Kode Satker 654094

Periode	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Deviasi (Rp)	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
Januari	103.185.265	115.275.525	12.090.260	0	100
Februari	638.215.246	389.716.737	248.498.509	0	100
Maret	1.249.207.824	874.081.203	375.126.621	0	100
April	666.188.369	676.837.772	10.649.403	41	100
Mei	957.210.654	771.859.395	185.351.259	491	100
Juni	1.053.150.163	698.111.880	355.038.283	1.459	8.541
Juli	192.653.234	192.539.075	114.159	1.251	8.749

Tabel 51.

Deviasi Halaman III DIPA Kode Satker 694709

Periode	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Deviasi (Rp)	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
Juli	781.613.076	195.593.692	586.019.384	1.959	8.041
Agustus	1.001.375.004	663.760.445	337.614.559	2.399	7.601
September	1.010.108.502	1.165.637.842	155.529.340	2.857	7.143
Oktober	1.484.886.432	1.137.421.099	347.465.333	2.747	7.253
November	1.016.147.325	1.332.679.213	316.531.888	2.680	7.320
Desember	1.016.147.325	1.332.679.213	316.531.888	2.680	7.320

2) Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari 5 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

a) Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan.

Tabel 52.

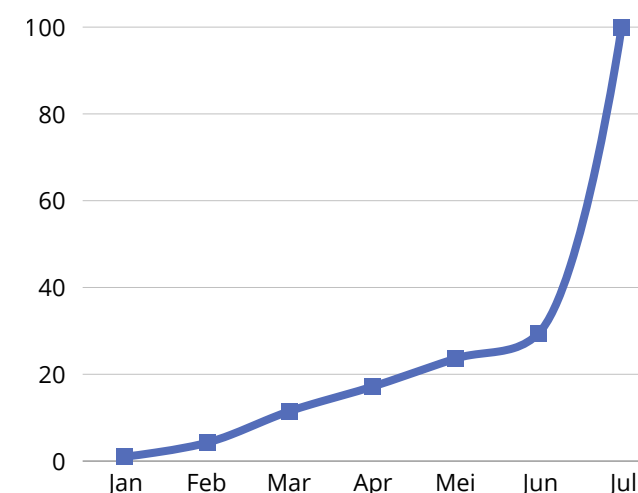
Rekapitulasi Penyerapan Anggaran 2025

Kode Satker	Periode	Pagu (Rp)	Realisasi Kumulatif (Rp)	Persentase Kumulatif
654094	Januari	11.966.248.000	115.275.525	96%
654094	Februari	11.910.248.000	504.992.262	422%
654094	Maret	11.910.248.000	1.379.073.465	1.152%
654094	April	11.910.248.000	2.055.911.237	1.718%
654094	Mei	11.910.248.000	2.827.770.632	2.363%
654094	Juni	11.910.248.000	3.525.882.512	2.947%
654094	Juli	3.719.628.000	3.718.421.587	9.997%
694709	Juli	8.190.620.000	195.593.692	239%
694709	Agustus	8.190.620.000	859.354.137	1.049%
694709	September	8.190.620.000	2.024.991.979	2.472%
694709	Oktober	8.703.032.000	3.162.413.078	3.634%
694709	November	7.089.526.000	4.495.092.291	6.340%
694709	Desember	7.089.526.000	5.989.972.095	8.449%

Realisasi penyerapan anggaran 2025 adalah sebesar 84,49%. Hal ini disebabkan adanya pagu blokir sebesar Rp1.068.460.000. Jika dihitung realisasi penyerapan tanpa pagu blokir, maka realisasi anggaran adalah sebesar 99,48%.

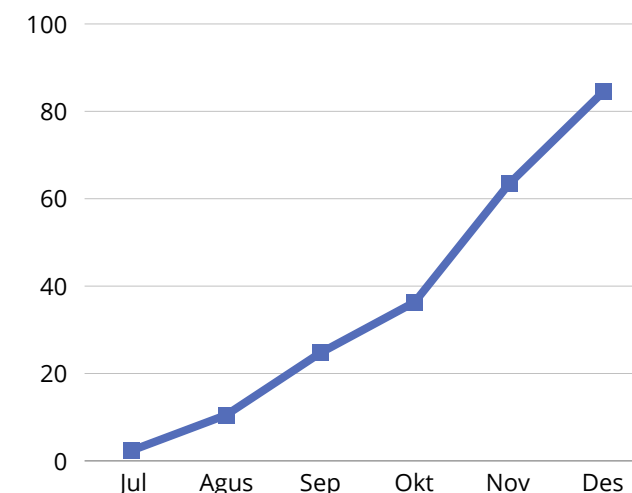
Grafik 1.

Grafik Penyerapan Anggaran 2025



Grafik 2.

Grafik Penyerapan Anggaran 2025



b) Belanja Kontraktual

dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen Distribusi Akselerasi Kontrak, Akselerasi Kontrak Dini, dan Akselerasi Belanja Modal

Tabel 53.

Penilaian Aspek Belanja Kontraktual 2025

Periode	Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak			Komponen Akselerasi Kontrak Dini			Komponen Akselerasi Belanja 53			Nilai
	Jumlah Kontrak	Jumlah Kontrak SMT I	Nilai	Jumlah Kontrak TW I	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai	Jumlah Kontrak Belanja 53	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
11	2	0	5.000	0	0	0	1	0	7.000	6.333

Tabel 54.

Penilaian Aspek Belanja Kontraktual 2025

Periode	Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak			Komponen Akselerasi Kontrak Dini			Komponen Akselerasi Belanja 53			Nilai
	Jumlah Kontrak	Jumlah Kontrak SMT I	Nilai	Jumlah Kontrak TW I	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai	Jumlah Kontrak Belanja 53	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai	
12	3	0	5.000	0	0	0	2	0	7.000	6.333

c) Penyelesaian Tagihan

Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

Tabel 55.

Penilaian Aspek Penyelesaian Tagihan 2025

Periode	Tepat Waktu (akumulatif)	Terlambat (akumulatif)	Total (akumulatif)	Persentase
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0
April	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	0	0	0
Oktober	1	0	1	100
November	2	0	2	100
Desember	3	0	3	100

d) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu, persentase GUP, dan setoran TUP.

Tabel 56.

Penilaian Aspek Pengelolaan UP dan TUP 2025

Periode	Komponen Ketepatan Waktu			Komponen Persentase GUP		Komponen Setoran TUP			Nilai
	Jumlah Pertanggung-jawaban GUP/ GU Nihil/ PTUP	Tepat Waktu	Nilai	Jumlah GUP	Nilai	Jumlah TUP (Nominal)	Jumlah Setoran (Nominal)	Nilai	
1	0	0	0	0	0	0	0	100	100
2	1	1	100	1	100	0	0	100	100
3	2	2	100	2	100	0	0	100	100
4	3	3	100	3	100	0	0	100	100
5	6	6	100	5	100	0	0	100	100
6	6	6	100	5	100	0	0	100	100
7	6	6	100	5	100	0	0	100	100
8	1	1	100	1	100	0	0	100	100
9	5	5	100	5	100	0	0	0	100
10	8	8	100	8	100	0	0	0	100
11	10	10	100	0	100	1	0	100	100
12	13	13	100	11	9.887	33.000.00	2.397.000	9.274	9.815

e) Dispensasi Surat Perintah Membayar

Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian SPM dihitung berdasarkan jumlah rasio SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan kepada KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV. Jumlah dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan akan menjadi pengurang nilai IKPA. Pada tahun 2025. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang telah mengajukan SPM sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sehingga tidak terdapat pengajuan dispensasi SPM

3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

a) Capaian Output, Dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data output dan nilai kinerja atas capaian RO. Data capaian output disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya.

Tabel 57.

Penilaian Aspek Capaian Output 2025

Periode	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
Januari	11	1.100	100	100	100
Februari	11	1.100	100	100	100
Maret	11	1.100	100	100	100
April	11	40.449	3.677	100	5.574
Mei	11	40.148	3.650	100	5.555
Juni	11	38.281	3.480	100	5.436
Juli	11	700	6.364	100	7.455
Agustus	11	88.176	8.016	100	8.611
September	11	98.230	8.930	100	9.251
Oktober	11	104.416	9.492	100	9.644
November	11	106.468	9.679	100	9.775
Desember	11	1.100	100	100	100

B. ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET

Nilai total dari Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang pada tahun 2025 adalah sebesar 84,39. Sehingga capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang pada tahun 2025 adalah sebesar 97,06% dari target 86,95. Hal ini berarti target untuk nilai kinerja anggaran tahun 2025 tidak tercapai. Ketidakberhasilan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Nilai Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang mendapatkan nilai 37,5. Hal ini disebabkan perubahan nomenklatur pada Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Restrukturisasi ini juga menyebabkan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) masih ter-tagging pada SOTK Ditjen SDPPI dan tidak dapat melakukan tagging SBKK/SBKU pada SOTK DJID. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital sudah bersurat kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan nomor B-962/DJID.1/PR.04.07/12/2025 tanggal 1 Desember 2025 hal Permohonan Dispensasi Tagging SBKK pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital TA 2025. Surat tersebut ditanggapi oleh Direktur Sistem Anggaran a.n. Direktur Jenderal Anggaran dengan surat nomor S-9/AG/AG.9/2025, tanggal 17 Desember 2025. Surat tersebut menyampaikan SBKK pada unit Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tidak dapat diberlakukan sebagai SBKK pada unit Ditjen Infrastruktur Digital mengingat adanya perbedaan kodifikasi pada masing-masing SBKK. Akibatnya SBKK Ditjen SDPPI tidak dapat diakui sebagai SBKK DJID. Hal ini menyebabkan DJID tidak bisa memperoleh nilai efisiensi maksimal 25% dan nilai yang didapat hanya dari komponen efektivitas sebesar 75% atau 37,5 pada perhitungan Nilai Kualitas Anggaran.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pada nilai IKPA Desember 2025 terdapat beberapa komponen yang nilai capaiannya lebih rendah dari bobot yang diberikan, yaitu :

- Deviasi Halaman III DIPA

Dari bobot 15, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang hanya mendapat nilai 10,98. Hal ini disebabkan DIPA yang telah disusun pada awal bulan Juli untuk Triwulan III tidak dapat terlaksana karena DIPA SOTK Baru terbit di tanggal 8 Juli 2025 dan izin penggunaan PNPB baru terbit di bulan Agustus 2025 sesuai dengan surat Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Pelaksana Anggaran Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu nomor S-277/PB.2/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Persetujuan Penggunaan MP PNPB Tahap I Tahun 2025 pada satker lingkup Kementerian Komunikasi dan Digital, sehingga penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan di hal III DIPA tidak dapat terlaksana sesuai rencana. Relaksasi yang dilaksanakan pada akhir November 2025 juga turut berperan dalam menyebabkan ketidaksesuaian perencanaan dengan realisasi.

- Penyerapan anggaran

Dari bobot 20, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang hanya mendapat nilai 17,97. Faktor pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi, DIPA yang terbit pada tanggal 8 Juli 2025, dan persetujuan PNPB yang baru terbit di bulan Agustus 2025 menyulitkan Balmon SFR Kelas II Padang dalam mencapai target penyerapan anggaran sesuai jenis belanja per triwulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun pada bulan Desember 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang telah berhasil melakukan realisasi anggaran sebesar sebesar 84,49%. Hal ini disebabkan adanya pagu blokir sebesar Rp1.068.460.000. Jika dihitung realisasi penyerapan tanpa pagu blokir, maka realisasi anggaran adalah sebesar 99,48%.

- Belanja Kontraktual

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang mendapatkan nilai 6,33 dari bobot 10 untuk komponen belanja kontraktual. Hal ini disebabkan pendaftaran untuk belanja kontraktual baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV. Keterlambatan ini disebabkan karena beberapa dinamika yang terjadi seperti adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa paket pengadaan yang merupakan belanja modal diblokir, perubahan nomenklatur, keterlambatan keluarnya persetujuan penggunaan PNPB dan relaksasi untuk pembukaan anggaran yang diblokir termasuk belanja modal yang baru terlaksana pada tanggal 20 November 2025.

C. EFISIENSI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang mengalami 2 (dua) kali pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi yaitu menindaklanjuti Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 dengan nilai blokir anggaran Rp1.616.506.000 dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan nilai blokir anggaran Rp1.333.810.000 sehingga total anggaran yang diblokir menjadi Rp2.950.316.000. Pada tanggal 20 November 2025 terbit DIPA Revisi dalam rangka relaksasi rangka relaksasi dimana terdapat pembukaan pagu blokir sebesar Rp1.881.856.000 sehingga pagu blokir menjadi Rp1.068.460.000.

Dengan adanya efisiensi tersebut menyebabkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang memberikan beberapa dampak antara lain :

- 1) Pembatasan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi. Sebagian besar undangan rapat dari pusat dihadiri secara online, sedangkan untuk offline ditujukan untuk kegiatan yang bersifat strategis;
- 2) Untuk perjalanan dinas dalam rangka tupoksi juga dilakukan penyesuaian seperti pengurangan jumlah hari kegiatan dan jumlah personel pelaksana perjalanan dinas. Efisiensi juga dilakukan dengan menggabungkan 2 (dua) kabupaten/kota tujuan kegiatan tupoksi dalam 1 (satu) kegiatan;
- 3) Pengurangan jumlah kegiatan seperti sosialisasi SMFR, Bimtek SRC/LRC, UNAR, Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio dan Kalibrasi Perangkat Monitoring;
- 4) Efisiensi dalam Operasional dan Pemeliharaan Kantor seperti pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2, operasional perkantoran dan pimpinan, pemeliharaan gedung dan pemeliharaan peralatan kantor;
- 5) Realisasi belanja modal baru terlaksana pada triwulan IV karena relaksasi anggaran baru dilaksanakan pada 20 November 2025. Hal ini menyebabkan penilaian Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran dan Belanja Kontraktual tidak mendapatkan bobot yang penuh pada penilaian IKPA.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Radio Kelas II Padang, namun dengan beberapa penyesuaian Balai Monitor Spektrum Radio Kelas II Padang secara keseluruhan tetap berhasil mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja. Dari 15 (lima belas) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja yang diberikan, 6 (enam) indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, 8 (delapan) indikator kinerja tercapai melebihi target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator kinerja tercapai di bawah target yang ditetapkan.

Jika dilihat selama 5 (lima) tahun terakhir maka nilai kinerja anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 58.
Capaian Nilai Kinerja Anggaran 2021 s.d. 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	86	8.365	9.727%
2022	87	8.903	10.233%
2023	87	8.902	10.232%
2024	8.902	9.101	10.224%
2025	8.695	8.439	9.706%

Fenomena naik-turunnya capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang selama lima tahun terakhir :

a. Perubahan Kebijakan dan Regulasi

Penyesuaian kebijakan pemerintah, perubahan struktur organisasi, refocusing anggaran, atau perubahan nomenklatur/program dapat mempengaruhi stabilitas capaian kinerja anggaran dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi pada 2025 dimana terjadi restrukturisasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

b. Efisiensi Anggaran

Adanya pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi pada prinsipnya bertujuan meningkatkan kualitas belanja, namun dapat mempengaruhi capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) melalui beberapa aspek, antara lain menurunnya realisasi anggaran dan meningkatnya deviasi penarikan dana karena sebagian anggaran tidak dapat digunakan sesuai rencana, potensi tidak tercapainya target output akibat kegiatan tertunda atau dikurangi, serta perubahan struktur efisiensi apabila pengurangan anggaran tidak diikuti penyesuaian target kinerja.

c. Faktor Manajerial dan SDM

Kapasitas perencanaan, pengendalian internal, koordinasi tim, serta pemahaman terhadap mekanisme pengukuran Nilai Kinerja Anggaran turut mempengaruhi kualitas pengelolaan anggaran.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja dan memperbaiki indikator Nilai Kinerja Anggaran, langkah-langkah tindak lanjut berikut telah diterapkan:

a. Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran

Menyusun perencanaan berbasis kebutuhan riil dan target output yang terukur, memperbaiki akurasi rencana penarikan dana (RPD) agar deviasi minimal, dan meminimalkan revisi anggaran yang tidak strategis.

b. Perbaikan Pola Penyerapan Anggaran

Menetapkan target triwulanan dan early warning system terhadap deviasi penyerapan dan mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun.

c. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Internal

Melakukan monitoring kinerja anggaran secara berkala (bulanan/triwulanan) dan menggunakan lembar kontrol untuk memantau deviasi, capaian output, dan efisiensi.

d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Anggaran

Penguatan pemahaman indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Pelatihan perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, dan manajemen risiko.

e. Penguatan Mitigasi terhadap Faktor Eksternal

Menyusun rencana kontinjensi terhadap perubahan kebijakan dan refocusing.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang melakukan benchmark dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi yang mendapatkan nilai kinerja anggaran sebesar 84,24. Pada indikator nilai kinerja anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang mendapatkan nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Perbedaan capaian ini mencerminkan keberagaman pendekatan dan kondisi operasional masing-masing unit. Kedepannya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang akan terus melakukan perbaikan dari segi Nilai Kinerja Perencanaan dan Nilai Pelaksanaan Anggaran.

Bagan 14.
Benchmark Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2025



86,95	TARGET	86,95
84,39	REALISASI	84,24
97,06%	PERSENTASE	96,88%

D. Implementasi BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infradigi tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan, dengan memastikan pengelolaan anggaran mendukung kualitas layanan dan pencapaian output;

Akuntabel, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran yang transparan serta sesuai ketentuan;

Kompeten, dengan meningkatkan kapasitas SDM pengelola anggaran dan pemahaman indikator kinerja;

Harmonis, melalui penguatan koordinasi dan kerja sama tim lintas fungsi;

Loyal, dalam menjalankan kebijakan dan prioritas organisasi secara konsisten;

Adaptif, terhadap perubahan regulasi, kebijakan efisiensi, dan dinamika pelaksanaan kegiatan;

Kolaboratif, dengan memperkuat sinergi antara unit perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guna menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan stabilitas capaian Nilai Kinerja Anggaran.

IKSK-2.2.

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Nilai kualitas pelaporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan penting karena mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku dan menjadi syarat karakteristik pelaporan keuangan yang dapat dipercaya oleh penggunanya.

Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diukur berdasarkan komponen penilaian kualitas pelaporan keuangan UAKPA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang.

Tabel 59.
nilai laporan keuangan UAKPA tahun 2025

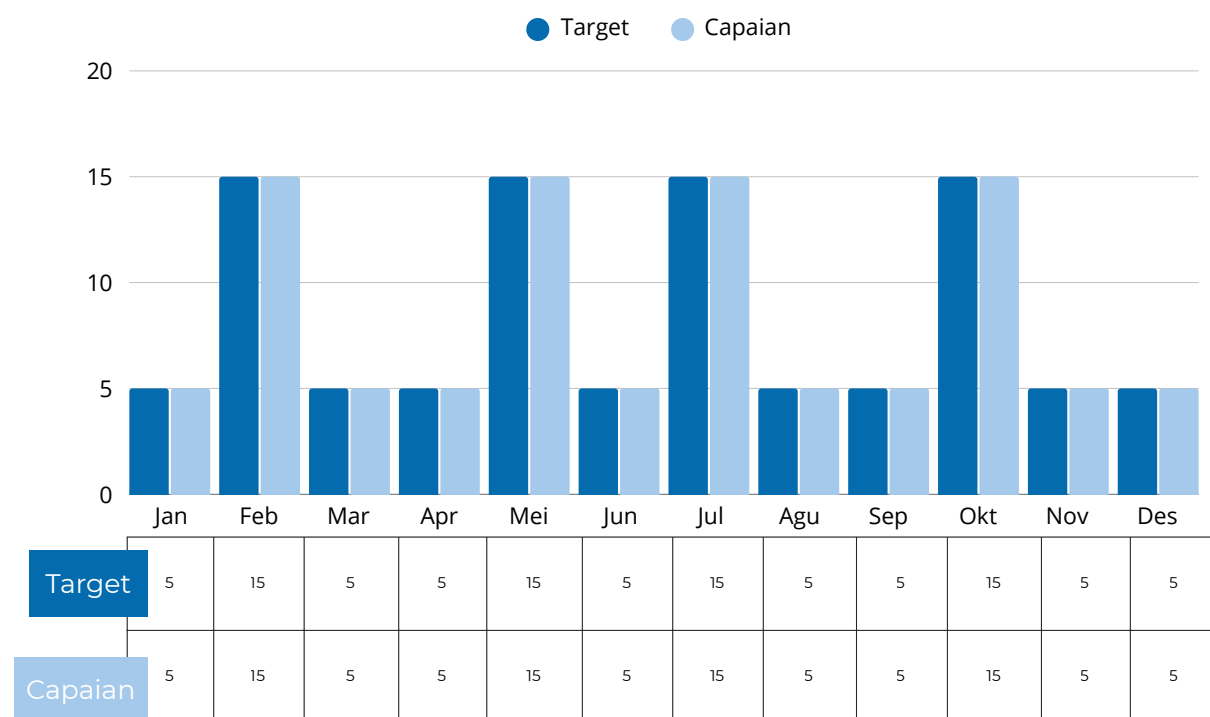
Bulan	Bobot	Rencana Aksi
Januari	5	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2024 2. Penyusunan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat UAKPA TA 2024 3. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan
Februari	15	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan 2. Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024
Maret	5	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan
April	5	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan 2. Menerima dan Melaksanakan Hasil Pelaksanaan Tripartit (Kementerian Komdigi, Kementerian Keuangan, dan BPK) sebagai UAKPA
Mei	15	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan 2. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA TA 2024 Audited 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d. April TA 2025.
Juni	5	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2025
Juli	15	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat UAKPA TA 2025 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2025
Agustus	5	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2025
September	5	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2025
Oktober	15	1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat UAKPA TA 2024; 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2025
November	5	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2025
Desember	5	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode November 2025

Capaian target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Target		97%
Realisasi		100%
Persentase		103,09%

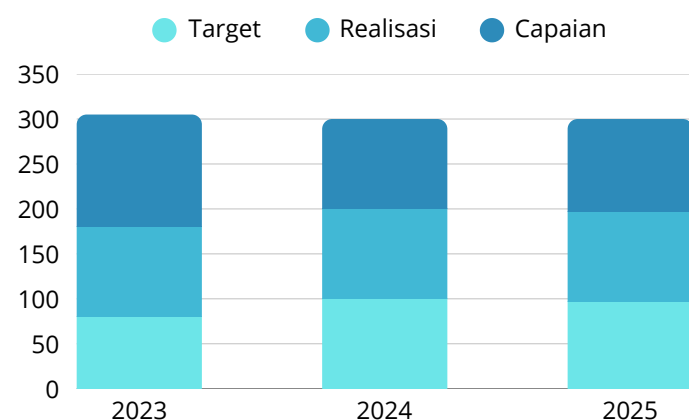
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang telah mencapai realisasi nilai kualitas pelaporan keuangan sebesar 100 dari target 97 atau sebesar 103,09%. Hal ini menggambarkan bahwa nilai kualitas pelaporan keuangan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang melampaui target yang telah ditetapkan.

Bagan 15.
Target dan Capaian Bulanan Nilai Kualitas Pelaporan [UAKPA]



Jika dilihat selama 3 (tiga) tahun terakhir maka nilai kinerja anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang adalah sebagai berikut :

Bagan 16.
Nilai kinerja anggaran Balmon SFR Kelas II Padang [3 tahun terakhir]



Bagan 17.
Nilai kinerja anggaran Balmon SFR Kelas II Padang [3 tahun terakhir]

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	80	100	125.00%
2024	100	100	100.00%
2025	97	100	103.09%

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang selalu dapat memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan untuk indikator capaian kualitas pelaporan keuangan UAKPA. Faktor yang menyebabkan keberhasilan ini adalah :

1. Tidak terdapat transaksi koreksi audit;
2. Tidak terdapat kesalahan penganggaran berdasarkan LHP BPK;
3. Tidak terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran/penerimaan pada akhir tahun;
4. Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu kepada Eselon I dan KPPN Padang;
5. Penilaian Pengendalian Intern atas laporan keuangan dinilai efektif.

Untuk kedepannya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang akan mempertahankan nilai kualitas laporan keuangan yang maksimal ini melalui langkah sebagai berikut :

1. memastikan pencatatan transaksi tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP);
2. melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal secara rutin serta tanpa selisih;
3. menjaga kelengkapan dan keabsahan dokumen sumber;
4. meningkatkan kualitas pengendalian internal (SPI);
5. meminimalkan kesalahan akun dan koreksi berulang;
6. menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan lengkap;
7. serta menindaklanjuti seluruh temuan audit atau review sebelumnya; dan
8. menjaga kompetensi SDM pengelola keuangan.

Benchmark nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang merupakan proses membandingkan kinerja nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA suatu satuan kerja (Satker) dengan satuan kerja (Satker) yang sejenis, dalam hal ini dilakukan benchmark dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi.

Bagan 18.
Benchmark nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Balai Monitor SFR Kelas II Padang	SATKER	Balai Monitor SFR Kelas II Jambi
97	TARGET	97
100	REALISASI	100
103,09	PERSentase	103,09%

Untuk perbandingan hasil penilaian kualitas laporan keuangan tahun 2025 belum tersedia disebabkan laporan keuangan masih dalam tahap penyusunan, sehingga perbandingan dilakukan pada hasil penilaian kualitas laporan keuangan tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 60.
perbandingan hasil penilaian kualitas laporan keuangan tahun 2025

No	Indikator	Bobot	Nilai Pengurang	Balmon SFR Kelas II Padang	Balmon SFR Kelas II Jambi
I	Indeks			100	100
II	Faktor Pengurang				
1	Jumlah Transaksi Koreksi Audit	50%	0	0	0
2	Kesalahan Penganggaran Berdasarkan LHP BPK	20%	0	0	0
3	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Akhir Tahun	10%	0	0	0
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%	0	0	0
5	Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	10%	0	0	0
6	Ketepatan Waktu Penyampain Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%	0	0	0
NILAI TOTAL				100	100

Berdasarkan hasil perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian nilai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi adalah sama. Hal ini menunjukkan baik Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang maupun Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi telah melakukan kualitas pengelolaan keuangan yang akurat, tertib, transparan, dan sesuai regulasi.

Dalam proses pencapaian target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagai berikut:

Implementasi BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan sebagai bentuk layanan informasi kepada pemangku kepentingan;

Akuntabel, diterapkan melalui pencatatan transaksi yang tertib, sesuai SAP, didukung dokumen sah, serta dapat dipertanggungjawabkan;

Kompeten, terlihat dari peningkatan kemampuan SDM pengelola keuangan dalam penggunaan aplikasi SAKTI/OM-SPAN dan pemahaman regulasi;

Harmonis, diwujudkan melalui koordinasi dan rekonsiliasi yang baik antar pengelola keuangan dan unit terkait;

Loyal, tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan dan komitmen menjaga kualitas laporan;

Adaptif, dilakukan dengan respons cepat terhadap perubahan kebijakan, sistem, dan perbaikan atas temuan/review;

Kolaboratif, diwujudkan melalui kerja sama aktif dengan KPPN, APIP, dan unit internal sehingga kualitas laporan keuangan meningkat, minim kesalahan, dan memperoleh nilai optimal.

KINERJA LAINNYA

A. Pengelolaan Anggaran

Pagu Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang di awal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp11.966.248.000. Dalam rangka likuidasi dilakukan cut off DIPA yang menyebabkan adanya DIPA Lama dan DIPA Baru pada tanggal 8 Juli 2025.

Tabel 61.
Riwayat Revisi Anggaran Tahun 2025

Riwayat Revisi	Tanggal DIPA	Pagu (dalam Rp)	Pagu Blokir (dalam Rp)	Pagu Setelah Blokir (dalam Rp)
DIPA Lama				
Dipa Awal	2 Des 2024	11.966.248.000	1.616.506.000	10.349.742.000
Revisi DIPA I	22 Feb 2025	11.910.248.000	2.950.316.000	8.959.932.000
Revisi DIPA II	15 Apr 2025	11.910.248.000	2.950.316.000	8.959.932.000
Revisi DIPA III	19 Mei 2025	11.910.248.000	2.950.316.000	8.959.932.000
Revisi DIPA IV	8 Jul 2025	3.719.628.000	0	3.719.628.000

Tabel 62.
Riwayat Revisi Anggaran Tahun 2025

DIPA Baru				
DIPA Awal	8 Jul 2025	8.190.620.000	2.950.316.000	5.240.304.000
Revisi DIPA I	2 Sep 2025	8.190.620.000	2.950.316.000	5.240.304.000
Revisi DIPA II	1 Okt 2025	8.190.620.000	2.950.316.000	5.240.304.000
Revisi DIPA III	28 Okt 2025	8.703.032.000	2.950.316.000	5.752.716.000
Revisi DIPA IV	20 Nov 2025	7.089.526.000	1.068.460.000	6.021.066.000
Revisi DIPA V	12 Des 2025	7.089.526.000	1.068.460.000	6.021.066.000

Realisasi penyerapan anggaran 2025 untuk DIPA Lama Rp3.718.421.587 adalah dari pagu Rp3.719.628.000 atau sebesar 99,97%. Sedangkan untuk DIPA baru realisasi anggaran sebesar Rp5.989.972.095 dari pagu Rp7.089.526.000 atau sebesar 84,49%. Hal ini disebabkan adanya pagu blokir sebesar Rp1.068.460.000 atau 15,07% dari total pagu DIPA Baru. Jika dihitung realisasi penyerapan tanpa pagu blokir, maka realisasi anggaran adalah sebesar 99,48%.

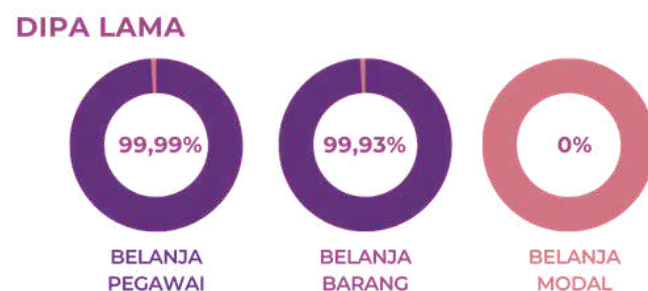
Bagan 19.
Realisasi Anggaran Tahun 2025



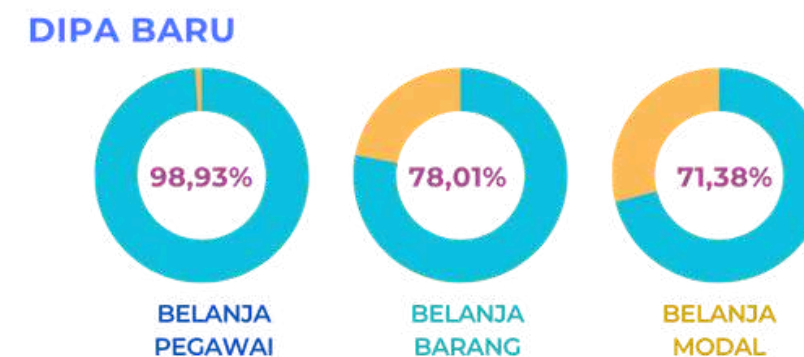
1. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

Secara umum penyerapan anggaran pada tahun 2025 untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal terserap dengan baik. Untuk DIPA Lama belanja pegawai dan belanja barang terealisasi sebesar 99,99% dan 99,93%, sedangkan belanja modal tidak terdapat realisasi, disebabkan belanja modal direalisasikan pada DIPA Baru. Pada DIPA Baru realisasi belanja pegawai sebesar 98,93%, belanja barang 78,01% dan belanja modal 71,38%. Untuk belanja barang dan belanja modal tidak dapat direalisasikan maksimal karena terdapat pagu blokir sebesar 21,36% untuk belanja barang dan 28,60% untuk belanja modal.

Bagan 20.
Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja



Bagan 21.
Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

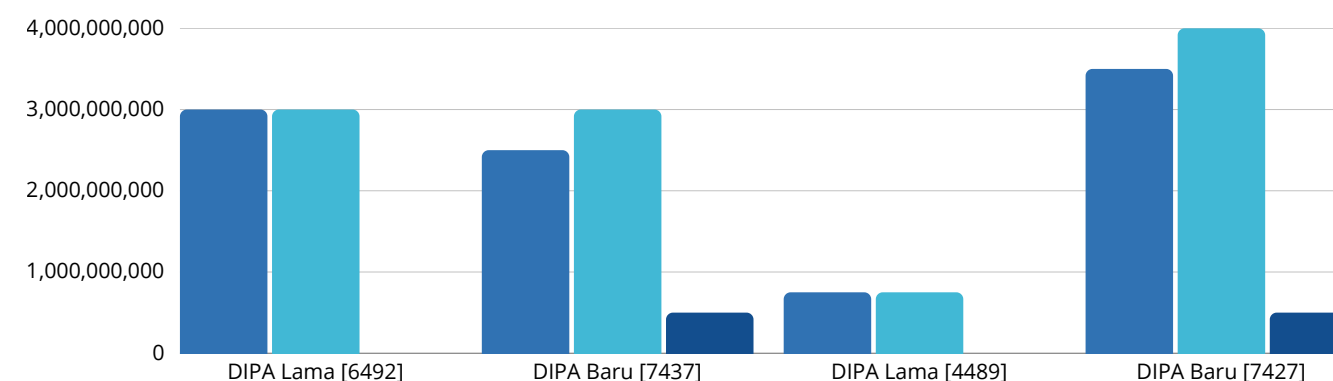


2. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Nama Kegiatan

Pada Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Digital dan Kualitas Layanan Telekomunikasi (7437) dan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (7427).

Realisasi Anggaran berdasarkan nama kegiatan adalah sebagai berikut:

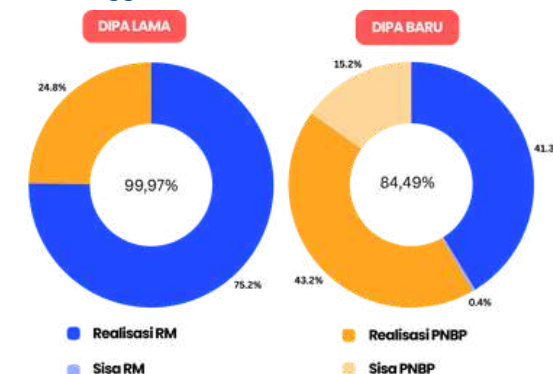
Bagan 22.
Realisasi Anggaran Berdasarkan Nama Kegiatan



3. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana

Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang terdapat 2 (dua) sumber dana yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni (RM). Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sumber dana:

Bagan 23.
Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana



B. Penatausahaan Kepegawaian

Pada awal tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang memiliki sumber daya manusia sejumlah 48 ASN (28 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 18 Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K)), serta 2 orang PJLP. Sehingga total pegawai pada bulan Desember 2024 sebanyak 48 orang ASN dan 2 Pegawai Non ASN (PJLP).

Tabel 63.
perbandingan hasil penilaian kualitas laporan keuangan tahun 2025

No	Nama	NIP	Gol/ Ruang	Jabatan
1	Helmi. ST. MM	19700726 199003 1 001	IV/a	Kepala Balmon SFR Kelas II Padang
2	Tojo Irnanto. S. Kom. MH	19850204 200803 1 003	III/d	Kasubag TU & RT
3	Syamsuddin. S.IP. MM	19691101 199003 1 002	III/d	Pengendali Ahli Muda
4	Tirta Dhany, S.T., M. T	198406192011011000	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Adrisoni	19681001 198903 1 002	III/d	Pengendali Penyelia
6	Elinurfemi. SE	19691027 199003 2 001	III/d	Pengelola Data Operasi dan Pelayanan
7	Erlisnawati. ST. SH	19750801 200604 2 006	III/d	Pengendali Ahli Muda
8	Siska Destalia Syahrias. ST	19841216 200901 2 005	III/d	Pengendali Ahli Muda
9	Hendry Junaidi. SH..MH	19860418 200502 1 001	III/c	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda
10	Intan Merina. S. IP	19880817 201101 2 013	III/d	Analisis sumber daya monitoring Level 3
11	Kosar Manurung. S. Kom	19820412 200803 1 001	III/c	Pengendali Ahli Muda
12	Gazali Syam. A. Md	19820428 200502 1 001	III/c	Pengendali Penyelia
13	Nasrullah. SE	19850815 200912 1 003	III/c	Analisis sumber daya monitoring Level 2
14	Martina Heppy Hutapea. ST	19840329 200803 2 001	III/c	Pengendali Ahli Muda

15	Popi Sandora. SE	19810806 200912 2 001	III/b	Analisis sumber daya monitoring Level 2
16	Elmira Puspa Sari. ST	19910904 201902 2 005	III/b	Pengendali Pertama
17	Wiyono	19830616 200604 1 002	III/a	Analisis sumber daya monitoring Level 2
18	Muchlis	19691122 198903 1 002	III/a	Analisis sumber daya monitoring Level 2
19	M. Ilham. Z. A. Md	19950816 201902 1 001	II/d	Pengendali Pelaksana
20	Darmil	19830815 200701 1 002	II/c	Analisis sumber daya monitoring Level 2
21	Gusrian Antoni	19850813 200912 1 002	II/d	Pengendali Pelaksana
22	Riana Syafriyanti. A.MD.T.	20000427 202303 2 001	II/c	Pengelola Manajemen Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Informatika
23	Fauzan Fitrah, S.A.P.	199104182025041000	III/a	Fungsional Analisis Anggaran Ahli Pertama
24	Ollivia Shadena, S. Ak.	199610122025042000	III/a	Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
25	Dicky Novriandi, S.T.	199611052025041000	III/a	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama
26	Agung Ikhsan Setiawan, S.T.	200012102025041000	III/a	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama
27	Harry Satria, A. Md	199402282025041000	II/c	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana
28	Tria Yuliandita, A. Md	199707032025042000	II/c	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana

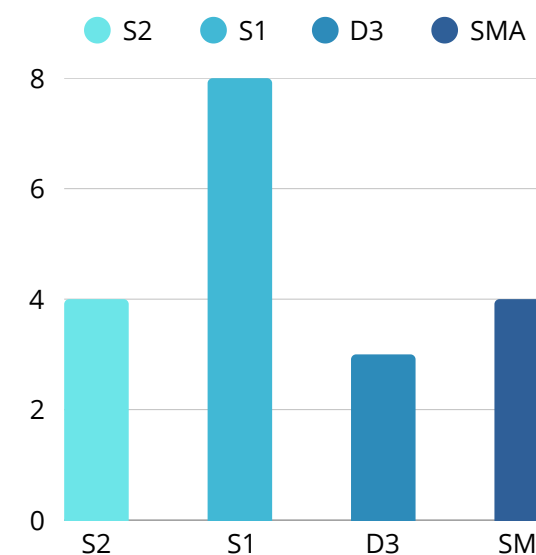
Tabel 64.
Tabel PPPK

No	Nama	NIP	Gol/ Ruang	Jabatan
1	Satria Budi Permata, S. Kom	99605232024211000	III/a	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama
2	Elva Agustina, S.E.	198608132025212000	III/a	Penata Layanan Operasional
3	Elfira, S.E.	198511042025212000	III/a	Penata Layanan Operasional
4	Greas Carla Edel Wies, S.E.	198810252025212000	III/a	Penata Layanan Operasional
5	Cynthia Monica, S. AP.	199102272025212000	III/a	Penata Layanan Operasional
6	Yogi Ardy Putra, A. Md	198808142025211000	II/c	Pengelola Layanan Operasional
7	Sri Handayani, A. Md	198304302025212000	II/c	Pengelola Layanan Operasional
8	Ardi Hidayat	199006302025211000	II/a	Pengadministrasi Perkantoran
9	Devi Putri Juita	197911072025212000	II/a	Pengadministrasi Perkantoran
10	Hendri Zulmaidi	198410052025211000	II/a	Pengadministrasi Perkantoran
11	Hendriko	198706082025211000	II/a	Pengadministrasi Perkantoran
12	Nofrianus	197511082025211000	II/a	Pengadministrasi Perkantoran
13	Berti Tutuarima	198010042025211000	II/a	Pengadministrasi Perkantoran
14	Jony Efendi	199803142025211000	II/a	Pengadministrasi Perkantoran
15	Randa Afrianto	199504262025211000	II/a	Pengadministrasi Perkantoran
16	Soni Candra	197901252025211000	II/a	Pengadministrasi Perkantoran
17	Delvianto	198106052025211000	II/a	Pengadministrasi Perkantoran
18	Hendriza	198301042025211000	II/a	Pengadministrasi Perkantoran
19	Nasrul	198601012025211000	II/a	Pengadministrasi Perkantoran
20	Anhar Karim	199605082025211000	I/a	Pengelola Umum Operasional

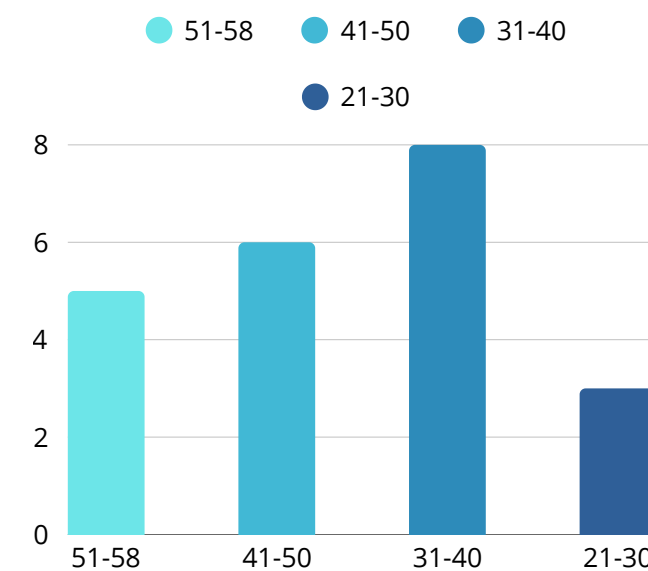
Tabel 65.
Tabel PJLP

No	Nama	Jabatan
1	Cindy Dwi Ramadany, S. H.	PJLP
2	Yuafrizal	PJLP

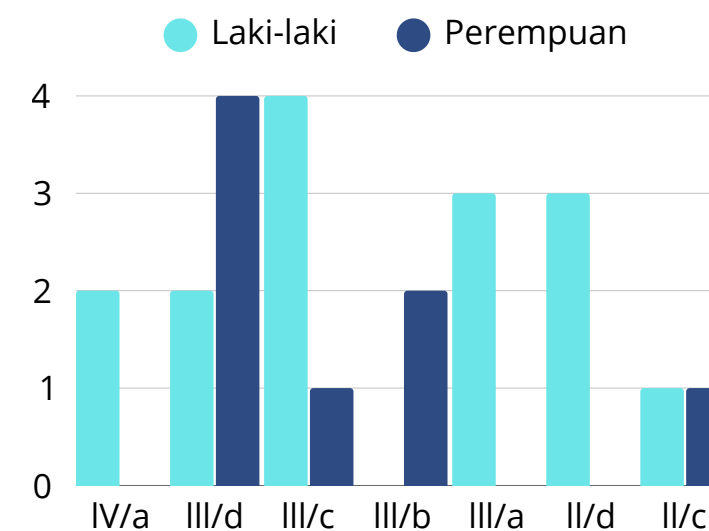
Bagan 24.
Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Bagan 25.
Pegawai Berdasarkan Usia



Bagan 26.
Pegawai Berdasarkan Gender



Perpindahan dari PPNPN ke PPPK (P3K)

Pada bulan April dan Oktober 2025, terdapat 18 pegawai PPNPN Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang lulus seleksi PPPK seperti yang terlihat pada tabel berikut:

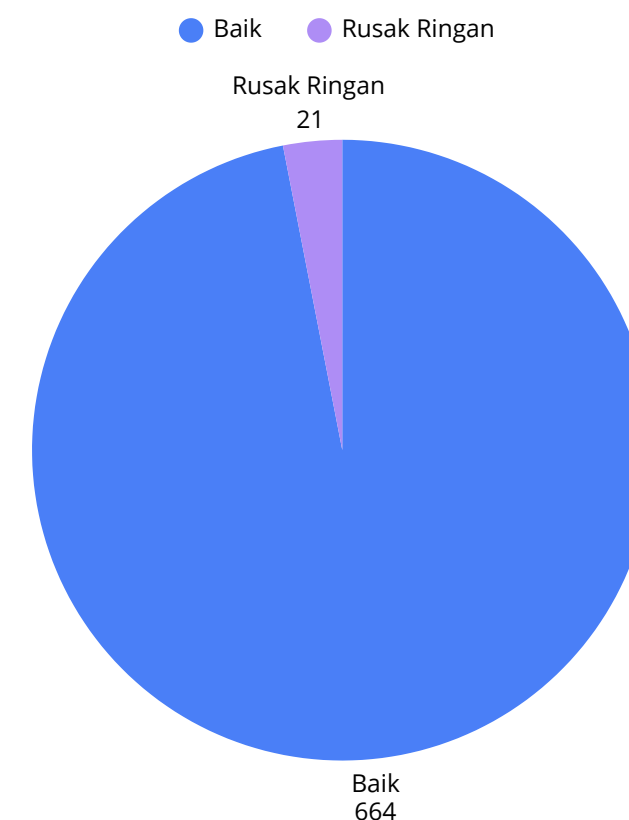
Tabel 66.
perbandingan hasil penilaian kualitas laporan keuangan tahun 2025

Nama	Jabatan sebelumnya	Jabatan Sekarang	TMT
Elva Agustina, S.E.	PPNPN ADM	PPPK	1 Apr 2025
Elfira, S.E.	PPNPN ADM	PPPK	1 Apr 2025
Greas Carla Edel Wies, S.E.	PPNPN ADM	PPPK	1 Apr 2025
Cynthia Monica, S. AP.	PPNPN ADM	PPPK	1 Apr 2025
Yogi Ardy Putra, A. Md	PPNPN ADM	PPPK	1 Apr 2025
Sri Handayani, A. Md	PPNPN ADM	PPPK	1 Apr 2025
Ardi Hidayat	PPNPN ADM	PPPK	1 Apr 2025
Devi Putri Juita	Cleaning Service	PPPK	1 Okt 2025
Hendriko	Cleaning Service	PPPK	1 Okt 2025
Jony Efendi	Cleaning Service	PPPK	1 Okt 2025
Hendri Zulmaidi	Driver	PPPK	1 Okt 2025
Nofrianus	Security	PPPK	1 Okt 2025
Berti Tutuarima	Security	PPPK	1 Okt 2025
Randa Afrianto	Security	PPPK	1 Okt 2025
Soni Candra	Security	PPPK	1 Okt 2025
Delvianto	Security	PPPK	1 Okt 2025
Hendriza	Security	PPPK	1 Okt 2025
Nasrul	Security	PPPK	1 Okt 2025
Anhar Karim	Cleaning Service	PPPK	1 Okt 2025

C. Pengelolaan BMN

Nilai BMN pada Neraca yang disajikan pada Tahun 2024 ini adalah sebesar Rp28.045.279.527,00. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan pengurangan nilai BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. Balai Monitor SFR Kelas II Padang sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital telah melakukan kegiatan penatausahaan BMN Tahun 2024. Pelaksanaan penatausahaan BMN ini dilakukan melalui Aplikasi SIMAN dan SAKTI. Tahun 2024 ini total BMN di Balmon Padang 687 unit, terdiri dari, kondisi baik 664 aset, rusak ringan 23 aset.

Bagan 27.
Inventarisasi BMN Tahun 2025



Tabel 67.

perbandingan hasil penilaian kualitas laporan keuangan tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Barang Konsumsi	42.390.444
2	Tanah	8.212.342.000
3	Peralatan dan Mesin	30.300.951.770
4	Gedung dan Bangunan	14.949.501.488
5	Irigasi	36.364.000
6	Aset Tetap Lainnya	14.278.600
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(23.820.268.585)
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.783.377.390)
9	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(11.039.069)
10	Software	2.793.364.179
11	Lisensi	50.128.570
14	Akumulasi Amortisasi Software	(2.689.227.910)
15	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(50,128,570)
TOTAL		28.045.279.527

D. Pengelolaan Arsip

Proses penerimaan dan pengiriman surat pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui konvensional maupun secara elektronik dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SiMaya). Surat dinas, nota dinas, serta dokumen kedinasan lainnya yang berasal dari internal Kementerian Komunikasi dan Digital diterima dan diproses secara daring melalui SiMaya sebagai bagian dari upaya penerapan tata kelola administrasi perkantoran yang tertib, cepat, dan akuntabel.

REKAPITULASI ARSIP PERSURATAN JANUARI S.D. DESEMBER TAHUN 2025 BALAI MONITOR SFR KELAS II PADANG

Tabel 68.

perbandingan hasil penilaian kualitas laporan keuangan tahun 2025

Dokumen/Berkas Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar	Surat Tugas
Januari	31	52	7
Februari	35	17	10
Maret	46	24	16
April	43	35	22
Mei	52	42	12
Juni	44	14	8
Juli	58	40	21
Agustus	38	38	23
September	53	50	26
Oktober	64	45	43
November	55	30	25
Desember	50	43	22
TOTAL	569	430	235

BAB IV PENUTUP

Sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi arah dan komitmen kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dalam mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Seluruh program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan selaras dengan Renstra 2025–2029, dengan sebagian besar target berhasil dicapai serta tetap berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengendalian infrastruktur digital, termasuk pengawasan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas negara. Pada tahun 2025, telah ditetapkan 15 indikator kinerja yang seluruhnya berhasil dicapai sesuai tugas dan fungsi yang diemban.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja ke depan, serta menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam menilai capaian dan kontribusi Balai Monitor secara objektif dan terukur.



Pendataan APT



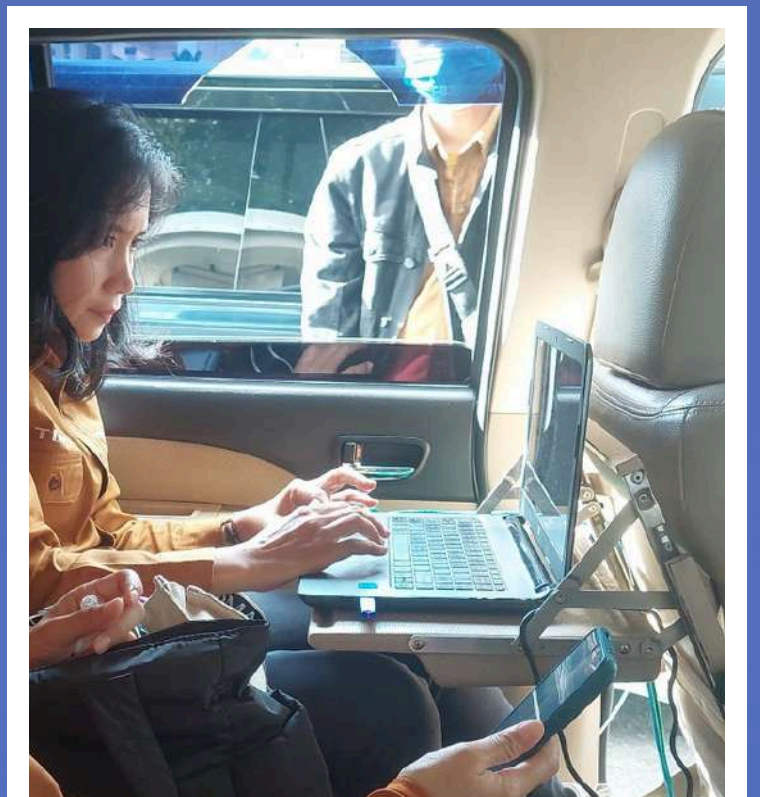
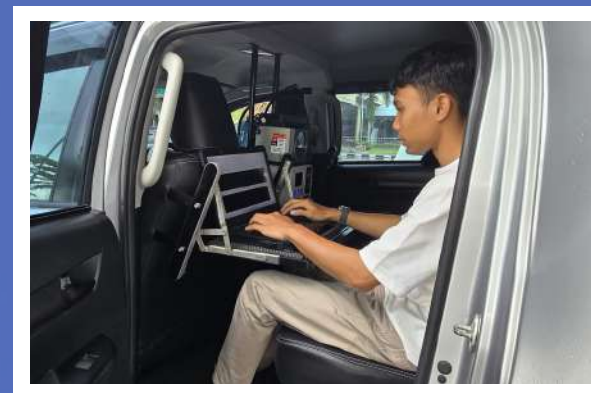
Pengukuran Kualitas Layanan



Posko Terpadu Idul Fitri 1446 H/2025 M



Observasi dan Monitoring



UNAR



Hari Bhakti Postel



Penertiban Dalam Kota



Dukungan Komunikasi Kebencanaan



Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Airnav



Evaluasi Kinerja





Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang
Jl. TPU Air Dingin Balai Gadang Kec. Koto Tengah Padang Sumatera Barat, Padang, Indonesia
📷 balmonsfr_padang 📺 Balmon Pdg